



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 ...

- Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ^A Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1 ...

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program serta Matrik Program Pembangunan Tahun 2016.
- (2) RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016;
- b. pedoman Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 25 Mei 2015

Plt.BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
[RKPD]
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2015**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 Tahun 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) TAHUN 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	i-1
1.1. Latar Belakang.....	i-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	i-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	i-8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	i-10
1.5. Maksud dan Tujuan.....	i-14
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBESARNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN.....	ii-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	2-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	2-53
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-121
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	2-134
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	2-161
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	iii-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	3-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3-16
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	3-18
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	3-25
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-30
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	iv-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	4-1
4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah.....	4-13



BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1	Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah	5-1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan SKPD	5-20
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	6-1
6.2	Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan	6-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur	2 - 2
Tabel 2.2	Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur	2 - 4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Penggunaan Lahan (ha) Tahun 2001	2 - 5
Tabel 2.4	Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur	2 - 7
Tabel 2.5	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur	2 - 10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 18
Tabel 2.7	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 19
Tabel 2.8	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 20
Tabel 2.9	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2014	2 - 20
Tabel 2.10	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 22
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013	2 - 24
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013 (Juta Rp)	2 - 27
Tabel 2.13	Kontribusi Sektorai Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2009-2013	2 - 29
Tabel 2.14	PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013	2 - 31
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 34
Tabel 2.16	IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012	2 - 37
Tabel 2.17	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 39
Tabel 2.18	Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun ke atas Tahun 2010-2014	2 - 40
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2010-2014	2 - 41
Tabel 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 42
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2014	2 - 43



Tabel 2.22	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2014	2 - 44
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2010-2014	2 - 45
Tabel 2.24	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 47
Tabel 2.25	Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014	2 - 48
Tabel 2.26	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2010-2014	2 - 51
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2010-2014	2 - 52
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 54
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 55
Tabel 2.30	Rasio Guru Terhadap Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 56
Tabel 2.31	Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 58
Tabel 2.32	Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 60
Tabel 2.33	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 61
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kesehatan	2 - 64
Tabel 2.35	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 65
Tabel 2.36	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 66
Tabel 2.37	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 68
Tabel 2.38	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2014	2 - 70
Tabel 2.39	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 76
Tabel 2.40	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 77
Tabel 2.41	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 78
Tabel 2.42	Sarana Peribadatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2014	2 - 78
Tabel 2.43	Capaian Indikator Urusan Perumahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 80
Tabel 2.44	Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 81



Tabel 2.45	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 82
Tabel 2.46	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 83
Tabel 2.47	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 83
Tabel 2.48	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2014	2 - 84
Tabel 2.49	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 85
Tabel 2.50	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 85
Tabel 2.51	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 86
Tabel 2.52	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tahun 2010-2014	2 - 86
Tabel 2.53	Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 89
Tabel 2.54	Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 89
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014	2 - 91
Tabel 2.56	Capaian Indikator Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	2 - 92
Tabel 2.57	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 92
Tabel 2.58	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 93
Tabel 2.59	Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 94
Tabel 2.60	Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 94
Tabel 2.61	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 97
Tabel 2.62	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 98
Tabel 2.63	Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 98
Tabel 2.64	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 99
Tabel 2.65	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 99
Tabel 2.66	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 100
Tabel 2.67	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 101



Tabel 2.68	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 101
Tabel 2.69	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 102
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 102
Tabel 2.71	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 103
Tabel 2.72	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 105
Tabel 2.73	Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 105
Tabel 2.74	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 106
Tabel 2.75	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 106
Tabel 2.76	Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 107
Tabel 2.77	Jumlah Surat Kabar, Radio, Televisi Lokal/Nasional di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 108
Tabel 2.78	Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 108
Tabel 2.79	Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 110
Tabel 2.80	Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 111
Tabel 2.81	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dengan Migas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 113
Tabel 2.82	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian tanpa Migas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 114
Tabel 2.83	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 116
Tabel 2.84	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 117
Tabel 2.85	Produksi Minyak Bumi dan Batu bara di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 118
Tabel 2.86	Kunjungan Wisata di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 120
Tabel 2.87	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 120
Tabel 2.88	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 122
Tabel 2.89	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 123
Tabel 2.90	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 124



Tabel 2.91	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif, Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 124
Tabel 2.92	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 125
Tabel 2.93	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 126
Tabel 2.94	Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 127
Tabel 2.95	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 128
Tabel 2.96	Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 129
Tabel 2.97	Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 129
Tabel 2.98	Lama Proses Perijinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012	2 - 130
Tabel 2.99	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 131
Tabel 2.100	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 132
Tabel 2.101	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 133
Tabel 2.102	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD	2 - 135
Tabel 2.103	Sinkronisasi Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur	2 - 171
Tabel 2.104	Identifikasi Permasalahan Untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	2 - 175
Tabel 3.1	Perkembangan Capaian dan Target Beberapa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	3 - 7
Tabel 3.2	Nilai Sektor dalam PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 s.d 2013 (dalam jutaan)	3 - 9
Tabel 3.3	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kabupaten Kutai Timur	3 - 19
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012-2016	3 - 27
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi /Target Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012-2016	3 - 33
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi /Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012-2016	3 - 35
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah	4 - 13
Tabel 4.2	Penjelasan program Prioritas Pembangunan Daerah	4 - 28
Tabel 5.1	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2016	5 - 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahap Penyusunan RKPD Kabupaten	1 - 5
Gambar 1.2	Bagan Alur Perencanaan	1 - 10
Gambar 2.1	Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur	2 - 6
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013	2 - 25
Gambar 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013	2 - 26
Gambar 2.4	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	2 - 28
Gambar 2.5	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	2 - 30
Gambar 2.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013	2 - 32
Gambar 2.7	Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013	2 - 33
Gambar 2.8	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012	2 - 36
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan Tahun 2012	2 - 38
Gambar 2.10	Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 38
Gambar 3.1	Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Dengan Migas dan Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 (%)	3 - 10
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	3 - 11



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan organisasi pemerintah yang merefleksikan misi dan visi digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Perencanaan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah guna menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat di daerah. Rencana pembangunan tersebut digunakan sebagai (1) pendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) penjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3) penjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalisasi partisipasi masyarakat; (5) penjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan tahunan daerah didokumentasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Langkah-langkah penyusunan dokumen RKPD meliputi: (1) penyusunan rancangan awal RKPD, (2) rancangan RKPD, (3) rancangan akhir RKPD dan (4) penetapan RKPD. Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan tersebut, terdiri dari: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) *bottom up* dan (5) *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated program*.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk pengumpulan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan



mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja SKPD dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga partisipasi semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstream*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Sehingga diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian maupun evaluasi.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 yang merupakan tahun peralihan dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 dan Tahun 2016-2020, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Dokumen RKPD Tahun 2016 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara lain:

- a. Merupakan sarana pelaksanaan peralihan menuju RPJMD Tahun 2016-2020;
- b. Menjadi referensi penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
- c. Mewujudkan konsistensi program dan pemenuhan pencapaian sasaran RPJMD 2011-2015 yang belum terealisasi;
- d. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS tahun 2016 guna menyusun RAPBD tahun 2016;
- e. Menjadi acuan dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016.

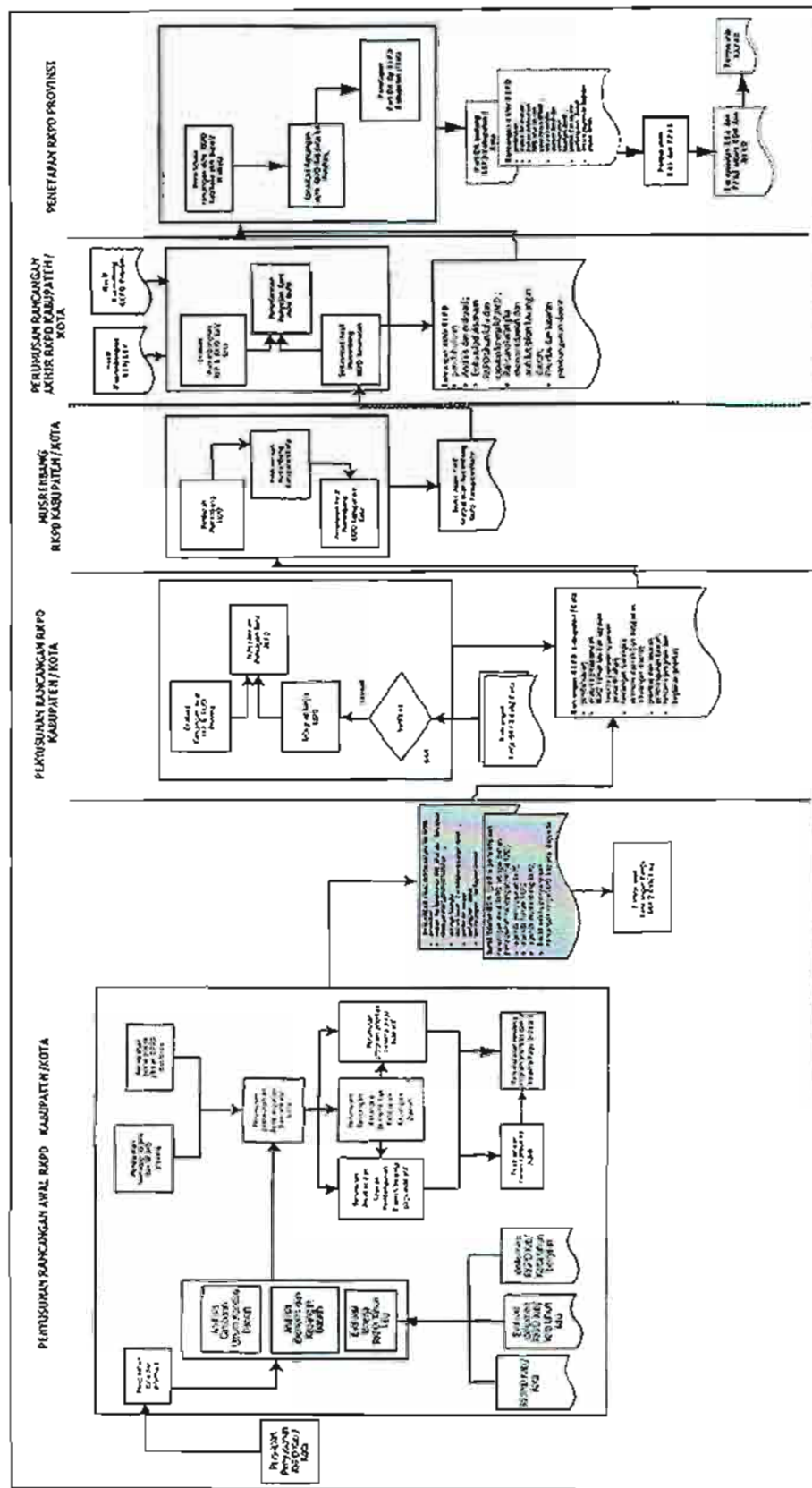
RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD mengacu pada: (1) RPJMD, (2) RPJPD dan (3) hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.



RKPD juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang mendasari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian di atas maka tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 adalah seperti dituangkan pada bagan alir Gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Permenandagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun



2009 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

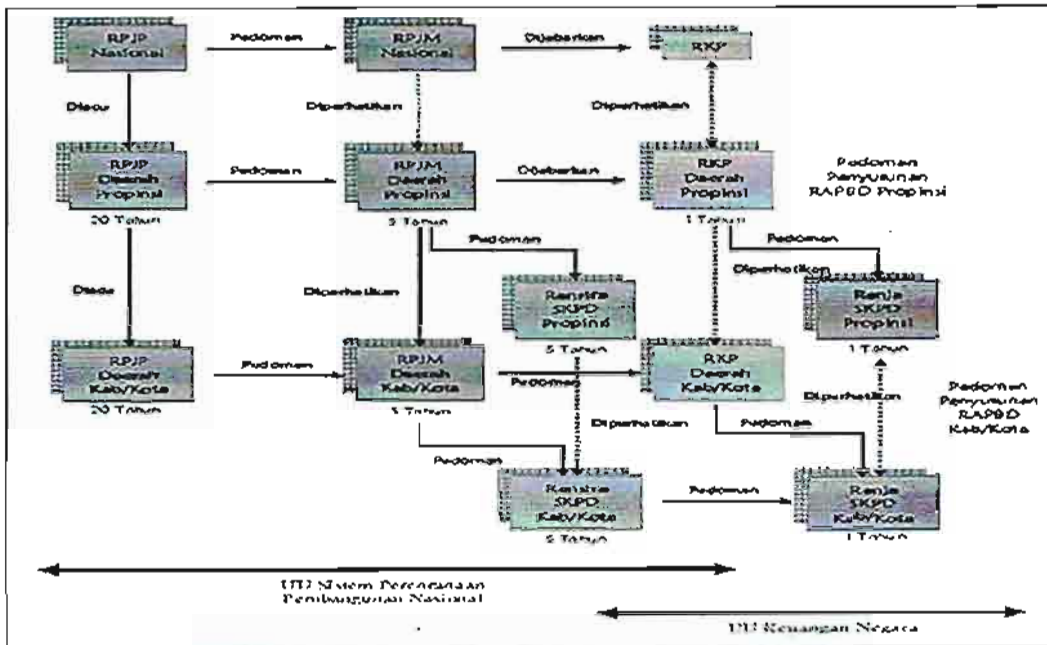
RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Khusus untuk RKPD Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan yang berada pada masa transisi 2011-2015 dan Tahun 2016-2020. Dengan

demikian RKPD Tahun 2016 diprioritaskan untuk melaksanakan pemenuhan target-target yang belum terpenuhi pada RPJMD 2011-2015.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2
Bagan Alur Perencanaan



Sumber : UU SPPN No 25 Tahun 2004

Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, sehingga RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.4 Sistematika dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

I.3 Hubungan antar dokumen

Bagian ini menguraikan tentang dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD

I.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya

I.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD



Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk:

- a) Mengetahui tingkat kemajuan atas target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral.
- b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2014.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi permasalahan umum pembangunan daerah meliputi :

- a) Permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- b) Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

III. RANCANGAN RERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menarasikan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah menjelaskan :

- a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah
- b. Kesesuaian asumsi butir a. dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan pilihan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah berdasarkan analisis.



3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menjelaskan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan;
- b) Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah
- c) Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai target.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menguraikan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, minimal yang terkait langsung dengan pengeluaran Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian



kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan serta sasaran pembangunan lima (5) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD berikutnya.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

VI. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD.

Bagian ini dapat memuat antara lain:

- a) Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja SKPD untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dalam RKPD.
- b) Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara SKPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas SKPD.
- c) Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang, forum diskusi, dan forum-forum konsultasi publik.
- d) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD.



- e) Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.
- f) Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

I.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan penyusunan RKPD ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi :

1. Penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Tahun 2016;
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauhmana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Berikut analisis lebih lanjut masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi menarasikan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan.

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek :

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari lima (5) kecamatan merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² atau 17 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan kabupaten lain, yaitu: sebelah utara dengan Kabupaten Berau, sebelah





selatan dan barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Secara detail, tabel 2.1 berikut menginformasikan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kutai Timur:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa	Luas	
			Km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muara Ancalong	8	2.739,30	7,66
2	Busang	6	3.721,52	10,41
3	Long Mesangat	7	526,98	1,47
4	Muara Wahau	9	5.724,32	16,01
5	Telen	7	3.129,61	8,75
6	Kombeng	7	581,27	1,63
7	Muara Bengkel	7	1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	6	204,50	0,57
9	Sangatta Utara	4	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11	3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6	831,00	2,32
12	Rantau Pulung	8	1.660,85	4,65
13	Sangatta Selatan	4	143,82	0,40
14	Kaliorang	7	3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	13	438,91	1,25
16	Sanderan	7	3.419,30	9,57
17	Kaubun	8	257,45	0,72
18	Karangan	7	3.064,36	8,57
Kabupaten Kutai Timur		135	35.747,50	100,00

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. 115°58'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:



- a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde Ibu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur.
- b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa daratan landai, bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai, dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah dataran mencapai 46 persen, pegunungan 30 persen, perbukitan 16 persen dan lainnya mencapai 8 persen.

Variasi topografi yang dimaksud adalah:

- a) Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman, pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan prioritas untuk pengembangan bandara.
- b) Kawasan pegunungan kapur terdapat di daerah Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong, sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan tertentu seperti jati dan karet.
- c) Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan terutama Sungai Sangatta, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Sungai-sungai di daerah tersebut airnya dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai sumber air minum dan jalur transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Sedangkan danau terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang, berpotensi sebagai sumber mata air maupun pengembangan perikanan budidaya air tawar.



- d) Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten dengan ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai kemiringan lereng datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan.

4. Geologi

Geologi Kabupaten Kutai Timur sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemeluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar disepanjang pantai. Disamping itu terdapat kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwartier. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat.

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi. Semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur

No	Fisiografi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.84
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007

5. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur memiliki suhu udara rata-rata 26°C



dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2000 hingga 4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga 150 hari/tahun.

6. Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 sebanyak 38,6 persen merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan primer, hutan bekas tebangan, hutan belukar, hutan kerangas, hutan di karst, hutan sejenis (HTI), hutan rawa, dan mangrove. Hutan primer banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kabupaten Kutai Timur memiliki 2 danau sebagai sumber mata air, yaitu Danau Ngayau (1900 ha) dan Danau Karang (750 ha) yang semuanya terdapat di Muara Bengkal.

Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 52,01 persen didominasi oleh belukar (32,2 persen) dan alang-alang (13,2 persen). Kawasan pertanian sebanyak 3,5 persen atau sekitar 106.056 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Lahan untuk perikanan masih kecil. Lahan lainnya adalah untuk pertambangan batubara sebesar 0,22 persen atau sekitar 7.113 Ha.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Menurut Penggunaan Lahan (ha) Tahun 2001

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hutan Primer	443.035	13,40	13	Belukar	1.062.811	32,15
2	Hutan Bekas Tebangan	562.816	17,03	14	Padang rumput	28.819	0,87
3	Hutan Belukar	84.465	2,56	15	Alang-Alang	437.488	13,24
4	Hutan Kerangas	1.382	0,04	16	Perkebunan	29.083	0,88
5	Hutan di karst	106.338	3,22	17	Sawah	3.479	0,11
6	Hutan rawa	11.788	0,36	18	Tambak	78	0,00
7	Mangrove	34.318	1,04	19	Tambang Batubara	7.113	0,22
8	HTI	30.865	0,93	20	Pemukiman	18.902	0,57
9	Ladang	15.775	0,48	21	Danau	304	0,01
10	Lahan Basah	38.740	1,17	22	Sungai	14.506	0,44
11	Lahan Terbuka Karst	53.124	1,61	23	Awan	8.682	0,26
12	Lahan terbuka	9.019	0,27	24	Tidak ada data	302.538	9,15
					Jumlah	3.305.469	100,00

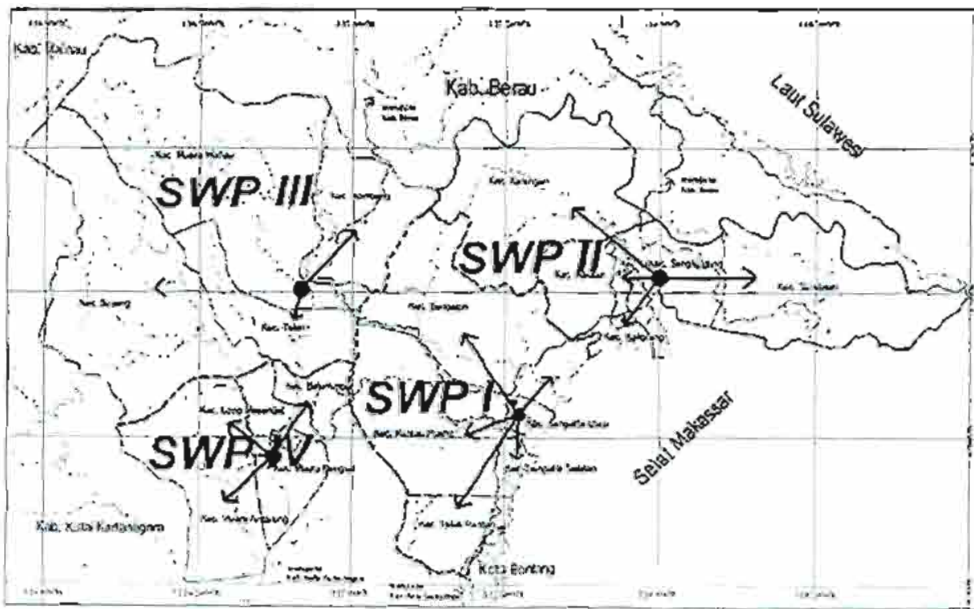
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007



b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan kawasan yang berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada Ibukota Kabupaten yaitu Sangatta karena posisi geografisnya berada di kawasan pesisir pantai yang memudahkan transaksi barang dan jasa lebih mudah. Tetapi seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karakteristik yang ada tersebut mengalami penggeseran sehingga menciptakan kluster-kluster perkembangan.

Gambar 2.1
Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

Pengembangan wilayah yang berpotensi di dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007, selain memperhatikan adanya pergeseran tersebut di atas, juga direncanakan terdapat 4 SWP (Subwilayah Pengembangan). Adapun SWP tersebut terdiri dari :

- SWP I : Berpusat di Sangatta Utara
- SWP II : Berpusat di Ibukota Kecamatan Sangkulirang
- SWP III : Berpusat di Ibukota Kecamatan Muara Wahau
- SWP IV: Berpusat di Muara Bengkal



Potensi masing-masing kawasan perencanaan di 18 kecamatan pemekaran Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Potensi
(1)	(2)	(3)
1	Muara Ancalong (Ibukota Kecamatan: Kelinjau Jlu dan Kelinjau Ilir)	Terdapat potensi perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh PT. 3 S (Sawit Sukses Sejahtera).
2	Buseng	Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi lading Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk, dan pisang Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
3	Long Mesangat (Ibukota Kecamatan: Sumber Sari)	Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani, dengan komoditas pada umumnya adalah: Padi, Kacang, Jagung. Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku yang berasal dari Indonesia Timur, Bali, Jawa, dan Sunda yang memiliki budaya bentani dan bercocok tanam. Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber Sari (komoditi ikan Patin) di Sungai Long Mesangat bantuan merupakan salah satu program dari Pemkab.
4	Muara Wahau	Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat Memiliki hamparan dominan yang landai (0-7%) dengan ketinggian yang variatif antara 0-1000 dpl dan pegunungan kapur sehingga sangat kondusif untuk pengembangan perkebunan jati dan karet.
5	Telen	Memiliki perkebunan produktif dengan komoditas utama kelapa sawit dan coklat Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6	Kongbeng	Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit Sektor Peternakan dengan komoditas sapi
7	Muara Bengkal (Ibukota Kecamatan: Muara Bengkal Ulu)	Danau kecil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku dan sudah terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM-nya berasal dari danau tersebut. Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Gunung putra daerah yang berasal dari Muara Bengkal). Potensi perikanan dengan jenis komoditi ikan: Pipi, Baong, Saleh, Patin, Jelawat, Ikan Betutu (orientasi ekspor berdasarkan survei wawancara).
8	Batu Ampar (Ibukota Kecamatan: Batu Timbau)	Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9	Sanggata Utara	KPC (Kallim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan 'kota mandiri' di Kawasan Perkotaan Sanggata merupakan potensi sebagai pusat pertumbuhan khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa. Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sanggata yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir. Sungai Sanggata sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.
10	Bengalon	Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsat dan Keralitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat
11	Teluk Pandan (Ibukota Kecamatan: Teluk Pandan)	Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi sawah, pisang, dan coklat. Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kecamatan ini adalah: Jeruk Martadinata, PinE, Nenas, Salak
12	Rantau Pulung (Ibukota Kecamatan: Margo Mulyo)	Memiliki potensi pertanian karena pada umumnya masyarakatnya adalah transmigran yang sudah terlatih untuk membudidayakan lahan pertaniannya (sawah tadah hujan dan buah-buahan)



		Memiliki kandungan tambang batu bara.
13	Sangatta Selatan (Ibukota Kecamatan: Sangatta Selatan)	Potensi sektor pertanian yaitu sayur-sayuran dan produksi ikan segar khususnya ikan bandeng dan ikan kakap. Potensi perikanan tersebut lebih banyak dibudidayakan di tambak dan sebagian lagi dari hasil tangkap nelayan laut. Memiliki potensi wisata lokal di Teluk Lombok maupun Teluk Kabak. Pusat pertumbuhan di kecamatan ini adalah pasar ikan yang terdapat di Desa Sangatta Selatan.
14	Kalorarang	Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa, coklat, kopi dan pisang Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan tangkap Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gips, pasir kuarsa
15	Sangkuling (Ibukota Kecamatan: Benua Baru Ulu)	Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut dan outlet barang se-kabupaten. Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan komoditi adalah udang lobster.
16	Sendaras	Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama kelapa, pisang, coklat, lada Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayur Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik tambak, kolam ataupun perikanan tangkap
17	Kaubun (Ibukota Kecamatan: Bumi Etam)	Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang telah untuk bertani dan berkebun sehingga memudahkan untuk pengembangan program pertanian.
18	Karangan (Ibukota Kecamatan: Karangany Dalam)	Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari. Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan milik perusahaan. Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara yang saat ini sudah mulai eksplorasi, pariwisatanya yaitu wisata air panas (desa mukti testan) dan goe lelelawar, wadot serta terdapat air panas dan air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).

Sumber:

- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008
- Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007
- Data diolah

Potensi permintaan hasil produksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya hasil produksi yang berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui, diantaranya adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya mencakup kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan, pariwisata, kawasan Hankam dan kawasan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kabupaten Kutai Timur terdapat di 11 wilayah kecamatan dengan peruntukan perkebunan yang dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.5
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur

No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan	No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Bengalon		8	Sandaran	
	- Tepian Langsat	Sawit		- Susuk Dalam	Sawit, Karet
	- Keratar	Sawit		- Susuk Luar	Sawit
	- Sekerat	Kakao		- Manubar	Karet
2	Kallorang			- Marukangan	Karet
	- Selangkau	Kakao	9	Sangatta	
	- Bumi Ripak	Sawit, Kakao		- Rantau Pulung	Kenaf
	- Bumi Eau	Sawit	10	Sangkulirang	
	- Cipta Graba	Sawit		- Karangan Dalam	Sawit, Cokelat, Pisang, Kakao
	- Bukit Makmur	Sawit		- Tp.Terap	Sawit
	- Bukit Permata	Sawit, Kakao		- Pelawan	Sawit
3	Kaubun			- Kerayuan	Sawit, Cokelat, Pisang
	- Bunti Papak	Sawit		- Munda Dalam	Sawit
4	Kongberg			- Saka	Sawit
	- Miao Baru	Cokelat/Lada, Jarak, Pagar		- Bt.Lepoq	Sawit, Kakao
5	Muara Ancalong			- Karangan	Sawit
	- Long Tesak	Sawit		- Baay	Sawit, Pisang
	- Senyur	Sawit		- Pengadan	Sawit, Kakao
6	Muara Wahau			- Manda	Sawit
	- Dabeq	Sawit		- Sempayan	Sawit
	- Nohes Liahbing	Sawit		- Keratan	Sawit, Kakao
	- Benhes	Sawit		- Tanjung Manis	Sawit, Cokelat
	- Diaklay	Sawit	11	Telen	
7	Muara Bengkal			- Jukayaq	Sawit
	- Batu Ampar	Sawit		- Bt.Rodi	Sawit
8	Sandaran			- Muara Halog	Sawit
	- Susuk Dalam	Sawit, Karet		- Marhalog	Sawit
	- Susuk Luar	Sawit			
	- Manubar	Karet			
	- Marukangan	Karet			

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan yang berada dalam pengawasan Unit Hamparan Pengkajian (UHP) dan hutan rakyat. Sedangkan Hutan Produksi menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dibedakan menjadi 3 macam



kawasan yaitu: a) Kawasan hutan produksi terbatas, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, b) Kawasan hutan produksi tetap, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pengaturan kawasan hutan produksi menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi: a) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, b) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian di kawasan hutan produksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau koperasi yang telah memperoleh ijin dapat menanam dengan sistem tumpang sari sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan tersebut.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2 bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten



dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi polemik dimasa yang akan datang yang meliputi berkurangnya produktivitas padi yang mengakibatkan goyahnya swasembada pangan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal mungkin pencegahan berkurangnya lahan sawah seminimal mungkin, terutama untuk lahan irigasi teknis dan lahan produktif lainnya.

3. Kawasan Perkebunan

Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan hasil produksi berupa cengkeh, colilat, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan karet.

Hasil produksi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, colilat, nenas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri.

4. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Kutai Timur, baik peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti kambing, sapi, dll) mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan yang cukup besar kebutuhan lokal kabupaten maupun kebutuhan regional Provinsi Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan diantaranya dengan adanya surplus produksi unggas dan daging besar.





5. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kutai Timur mencakup perikanan darat, laut dan tambak, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatan potensi, dengan upaya sebagai berikut:

- a) Kawasan darat dikembangkan dengan pola budidaya berbentuk kolam/empang, atau sistem karamba di kali dan waduk.
- b) Kawasan pesisir dikembangkan pola tambak air tawar, air payau dan air laut dengan tetap mempertimbangkan ekosistem pesisir.
- c) Kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut sebagai *outlet* dengan pengembangan dermaga ikan, TPI dan pasar ikan.

Perikanan laut, pesisir dan perikanan darat di kawasan Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi pasar yang cukup baik. Hasil produksi perikanan laut mempunyai peluang pasar ekspor, sedangkan perikanan darat, meskipun ada peluang ekspor, namun lebih dominan peluang pasar dalam negeri.

6. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kutai Timur perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan kawasan lindung, karena potensi kawasan pertambangan yang ada sekarang ini dimasa yang akan datang kemungkinan berada di kawasan lindung. Oleh karena itu mempertahankan kawasan lindung adalah upaya pertama, sedangkan upaya selanjutnya adalah revitalisasi kawasan bekas pertambangan, agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal dikemudian hari.

7. Kawasan Industri

Pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur diorientasikan pada pembentukan kawasan industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan industri kecil dengan membuat sentra-sentra industri. Pengembangan kawasan industri meliputi industri kecil dan industri besar, dengan pertimbangan-pertimbangan potensi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk dikembangkan. Pengembangan industri yang dilakukan mencakup industri hulu maupun hilir yang meliputi industri manufaktur dan industri pendukung pertanian.

Kawasan Industri direncanakan dengan pertimbangan memenuhi syarat zona industri, yaitu :

- a) terletak pada jalur arteri
- b) memenuhi syarat secara geografis



- c) tersedia sumber air baku cukup
- d) adanya sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- e) tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah
- f) tidak menimbulkan dampak sosial negatif
- g) menempati wilayah landai atau kemiringan lahan kurang dari 15%
- h) daya dukung lahan dan potensi air bawah tanah sedang sampai tinggi
- i) tidak rawan gerakan tanah, banjir dan bencana alam lainnya
- j) aksesibilitas mudah

Berdasarkan kriteria di atas, maka pengembangan kawasan perindustrian terutama industri menengah besar dapat dilakukan di lokasi kecamatan yang masuk dalam jalur transportasi nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, yang sesuai peruntukannya adalah di Maloy. Sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat dikembangkan di Kota Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kaliorang, Muara Wahau dan Sangkulirang.

Kawasan industri dikembangkan didekat kawasan pelabuhan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan sistem transportasi yang ada yaitu di Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang. Sehingga lahan yang diperlukan disediakan di sekitar kawasan perkotaan, sebagai bagian pengembangan kawasan perkotaan.

8. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial memberikan masukan bagi pendapatan asli daerah (PAO) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur berupa daya tarik kesenian rakyat, bangunan peninggalan sejarah, produksi kerajinan rakyat ataupun atraksi keseharian masyarakat lokal.

9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman di



Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan atas perkembangannya mencakup kawasan perkotaan di sekitar muara sungai, kawasan perdesaan di sekitar sungai dan kawasan transmigrasi. Sedangkan perkembangan yang terjadi seiring perubahan perilaku transportasi yang digunakan, maka banyak berkembang kawasan permukiman di sekitar jaringan jalan terutama pada kawasan atau lokasi yang cukup strategis.

Tuntutan perkembangan kawasan yang semakin berkembang maka akan banyak tuntutan pada pengembangan kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan, untuk itu perlu dipersiapkan kawasan-kawasan permukiman baru bagi pengembangan kawasan permukiman yang bisa berupa kawasan kota baru, desa baru dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi.

Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

a) Pemenuhan kebutuhan perumahan

Kebutuhan perumahan yang cukup besar memerlukan upaya penyediaan lahan, sebagai kawasan permukiman. Kawasan permukiman bisa dikembangkan disekitar kawasan permukiman yang telah berkembang maupun kawasan baru yang memungkinkan. Permukiman ini bisa dikembangkan di beberapa lokasi terkait dengan kegiatan berikut: kawasan perkebunan sebagai plasma, kawasan hutan sebagai pengelola kehutanan, kawasan pertambangan dan industri serta di kawasan baru sebagai kota baru dan desa baru.

b) Penataan kawasan permukiman liar

Kawasan permukiman liar yang dimaksud adalah kawasan permukiman yang berkembang di kawasan yang bukan atau dilarang untuk permukiman, seperti di Tamar Nasional Kutai. Penataan yang dimaksud mencakup pemahaman dan pemberdayaan masyarakatnya baik dari sisi pengetahuan hukum positif, pemberdayaan sosial dan ekonomi serta penyiapan lokasi baru atau tetap di lokasi tersebut tetapi dilakukan pembatasan-pembatasan dengan dilokalisasi terbatas.

c) Revitalisasi permukiman adat

Revitalisasi permukiman adat yang dilakukan merupakan upaya pelestarian bentuk dan fungsi perumahan yang ada, tetapi revitalisasi yang dilakukan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Revitalisasi permukiman adat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap adat dan budaya serta keraifan budaya lokal yang dimiliki oleh suku



setempat.

d) Pengembangan permukiman perdesaan

Pengembangan permukiman perdesaan harus mendapat perhatian sebagai upaya mereduksi arus urbanisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi potensi perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, sehingga kawasan perdesaan akan semakin berkembang, jika kawasan pertanian juga diperhatikan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi yaitu rawan bencana banjir dan gerakan tanah.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi kawasan penanggulangan. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian alam yang lebih berorientasi pada masa depan demi kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
- b) Gerakan penghijauan lingkungan
- c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir

Kawasan rawan bencana terutama kawasan dengan kemiringan lahan yang landai seperti kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.



2. Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaannya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan bencana longsor yaitu wilayah yang mempunyai kelerengan $>40\%$ terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Busang.

d. Aspek Demografis

1. Kependudukan

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan maupun perencanaan program. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil batu bara dan dengan wilayah hutan yang sangat luas menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Pada sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh dua faktor. *Pertama*, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. *Kedua*, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 jumlah penduduk Kutai Timur sebesar 245.817 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 554.751 jiwa tahun 2013. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak 175.179 jiwa atau sebesar 31,58 persen dari total penduduk Kutai Timur. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 7.851 jiwa atau sebesar 1,42% dari total penduduk Kutai Timur.



Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	367.247	430.865	527.723	554.751	
2	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jiwa	121.430	63.618	96.858	27.028	
3	Pertumbuhan Penduduk	(%)	49.40	17.32	22.47	5.12	
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	7.36	12.05	14.76	15.52	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,

Sementara itu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio 121,56 pada tahun 2011 menjadi 123,81 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak daripada penduduk perempuan. Perubahan demografis ini dapat dimungkinkan karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Timur berada diatas rata-rata rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 111. Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2013 Kecamatan Sangatta Utara (31,58%), Kecamatan Bengalon (9,52%), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,96%).

Tabel 2.7
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Muara Ancalong	7.296	6.745	8.661	8.061	9.913	9.013	9.908	8.945		
Busang	3.124	2.790	3.691	3.282	4.286	3.722	4.200	3.666		
Long Mesangat	3.729	3.157	4.483	3.860	5.236	4.454	5.312	4.499		
Muara Wahau	11.750	9.752	14.497	11.977	17.688	14.659	20.397	16.739		
Telen	4.577	3.608	5.780	4.585	7.143	5.671	7.228	5.752		
Kongbeng	8.791	7.662	10.329	8.891	15.205	12.680	16.980	14.354		
Muara Bengkal	8.427	7.708	9.620	8.555	11.609	10.353	11.273	9.929		
Batu Ampar	3.665	3.182	3.724	3.173	4.334	3.627	4.251	3.600		
Sangatta Utara	63.910	52.300	80.081	64.095	93.935	74.101	98.424	76.755		



Kecamatan	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bengalon	14.882	12.279	15.576	12.692	27.649	22.054	29.651	23.170		
Teluk Pandan	11.854	9.826	12.354	10.051	15.854	12.515	16.963	13.328		
Sanggata Selatan	18.667	15.600	21.417	17.708	23.918	19.635	24.370	19.794		
Rantau Pulung	4.666	4.030	5.426	4.668	6.441	5.573	6.742	5.832		
Kalioreng	4.980	4.319	7.775	6.614	9.145	7.783	9.522	8.083		
Kaubun	5.010	4.161	5.518	4.541	7.695	6.282	8.749	7.126		
Sangkulirang	13.057	11.316	12.691	10.700	13.999	11.755	14.588	12.271		
Karangan	6.793	4.779	9.016	6.477	10.308	7.467	10.953	7.956		
Sandaran	5.022	4.227	5.543	4.553	6.518	5.292	7.522	5.919		
Jumlah	199.990	167.257	236.392	194.473	290.667	236.836	303.945	245.464		
Jumlah L + P	367.247		430.865		527.723		554.751			
Rasio Jenis Kelamin	119.57		112.56		122.82		123.94			
Pertumbuhan (%)	9.29		17.32		22.47		5.12			

Sumber: Diras Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara hingga tahun 2013 sebesar 31,61 persen. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Persebaran penduduk di kecamatan lain relatif sedikit karena merupakan kecamatan-kecamatan pemekaran dan aksesibilitas yang masih belum baik.

Tabel 2.8
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Anealong	3,82	3,93	3,59	3,40	
2	Busang	1,61	1,62	1,52	1,42	
3	Long Mesangat	1,98	1,94	1,84	1,77	
4	Muara Wahau	5,85	6,14	6,13	6,69	
5	Telen	2,23	2,41	2,43	2,34	
6	Kongbeng	4,48	4,46	5,32	5,65	
7	Muara Bengkal	4,37	4,22	4,16	3,82	
8	Batu Ampar	1,86	1,60	1,51	1,42	
9	Sanggata Utara	31,61	33,46	31,84	31,58	
10	Bengalon	7,36	6,56	9,42	9,52	
11	Teluk Pandan	5,91	5,20	5,38	5,46	
12	Sanggata Selatan	9,32	9,08	8,25	7,96	
13	Rantau Pulung	2,37	2,34	2,28	2,27	



No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Kaliorang	2,53	3,34	3,21	3,17	
15	Kaubun	2,50	2,33	2,65	2,86	
16	Sangkulirang	6,64	5,43	4,88	4,84	
17	Karangan	3,15	3,60	3,37	3,41	
18	Sandaran	2,52	2,34	2,24	2,42	
Jumlah (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2013 sebagaimana Tabel 2.9, tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 66.580 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 63.441 jiwa dan selanjutnya umur 20-24 tahun sebanyak 58.919 jiwa.

Tabel 2.9
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2014

No	Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	0 - 4	22,501	19,982	47,225	28,220	
2	5 - 9	28,063	45,438	51,713	52,675	
3	10 - 14	24,259	41,464	45,604	51,850	
4	15 - 19	21,455	35,260	48,372	43,454	
5	20 - 24	22,392	43,173	59,003	56,832	
6	25 - 29	21,272	50,591	61,964	66,460	
7	30 - 34	22,644	49,758	53,704	65,875	
8	35 - 39	23,317	40,585	44,019	53,648	
9	40 - 44	18,784	34,285	34,554	43,079	
10	45 - 49	15,447	24,008	24,099	32,846	
11	50 - 54	12,426	17,835	17,968	21,930	
12	55 - 59	8,965	11,413	10,579	15,084	
13	60 - 64	7,203	7,651	6,721	10,342	
14	65 - 69	5,884	4,343	4,023	5,758	
15	70 - 74	4,335	2,612	2,334	3,388	
16	75 +	4,025	2,467	1,970	3,310	
Jumlah		213.762	245.817	430,865	527.723	554.751

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Dari Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari *dependency ratio* sebagai daerah terbuka yang terkenal potensi sumber daya alam yang melimpah, menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama dari mereka yang datang untuk bekerja/mencari kerja ke daerah ini, dimana sebagian besar berusia antara 18-40 tahun pada usia produktif.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.10
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	9,33	11,43	12,68*	11,43**	
2	PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	34.247.873,45	45.748.819,68	50.184.447,90*	60.931.393,14*	
3	PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)	18.978.570,44	18.919.768,22	21.319.122,21*	23.756.968,22*	
4	Pendapatan perkapita per tahun (Rp)	133.704.808	150.211.374	150.886.068	-	
5	Jumlah penduduk miskin	29.200	27.432	24.295 ¹⁾	21.158 ²⁾	
6	Persentase penduduk miskin	7,95	6,37	6,12 ¹⁾	5,87 ²⁾	
7	IPM	74,51	74,95	75,21 ¹⁾	75,46 ²⁾	
8	Daya beli (ribuan rupiah/bulan)	675,99	600,29	602,23		

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

1) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2013

2) LKPJ 2013



A. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRB juga dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam serta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-tiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas {batubara} masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2008-2012 antara 85,80% sampai 88,21% dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan Migas.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2009-2013 cenderung meningkat dari Rp 27.380.004,69 juta di tahun 2009 menjadi Rp 60.931.993,14 juta pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 27.380.004,69 juta, Rp 34.179.895,99 juta, Rp 41.206.892,30 juta, Rp 50.173.447,91 dan Rp 60.931.993,14.

PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2009-2013 berturut-turut sebesar Rp 4.101.439,75 juta, Rp 4.769.080,56 juta, Rp 5.553.647,49 juta, Rp 6.390.800,63 juta dan Rp 7.522.322,06.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dari 5,60% tahun 2008 menjadi 11,43% pada tahun 2013, tanpa migas dari tahun 2009 5,57% menjadi 11,53% pada tahun 2013, serta tanpa migas dan



batubara dari tahun 2009 sebesar 4,15% menjadi 4,35% pada tahun 2013 . Dari beberapa periode seperti tampak dalam Tabel 2.10 memberikan gambaran bahwa komposisi pembentukan PDRB masih didominasi oleh batubara. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.



Tabel 2.11
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2010-2014

Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2010	34.247.873,45	16.978.570,44	33.495.735,77	16.814.677,68	4.769.080,56	2.146.080,56	9,33	9,80	6,42
2011	45.748.619,66	18.919.768,22	44.900.228,87	18.759.584,10	5.553.647,49	2.294.852,25	11,43	11,57	6,89
2012	50.184.447,90	21.319.122,21	49.223.005,18	21.163.592,17	6.390.800,63	2.554.611,46	12,68	12,81	11,33
2013*	60.931.993,14	23.756.968,22	59.833.657,52	23.605.844,81	7.522.322,06	2.665.750,89	11,43	11,53	4,35
2014**									

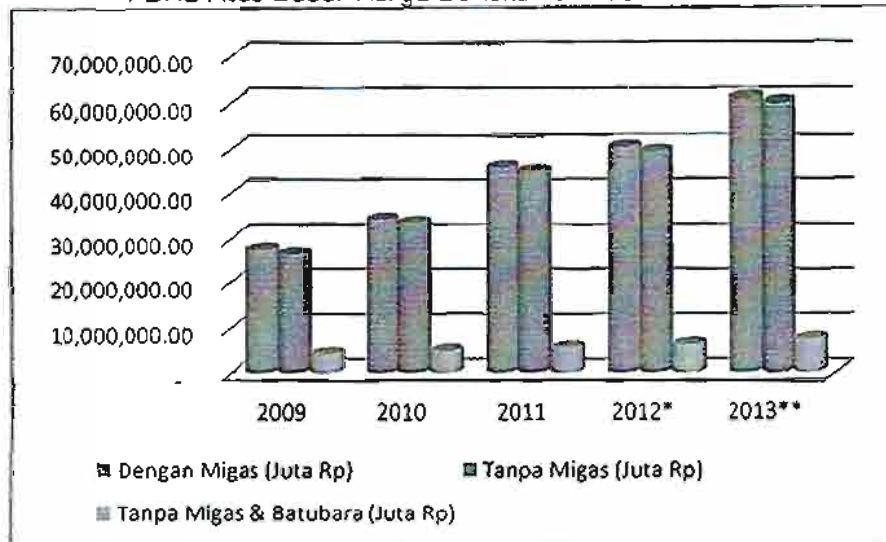
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2014

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara juga relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwasanya potensi batubara merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur. Sektor migas dan sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur, namun bukan berarti sektor migas dan sektor lainnya tidak diperhatikan melainkan justru sektor migas dan sektor lainnya masih berpotensi dikelola secara lebih maksimal lagi.

Gambar 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013

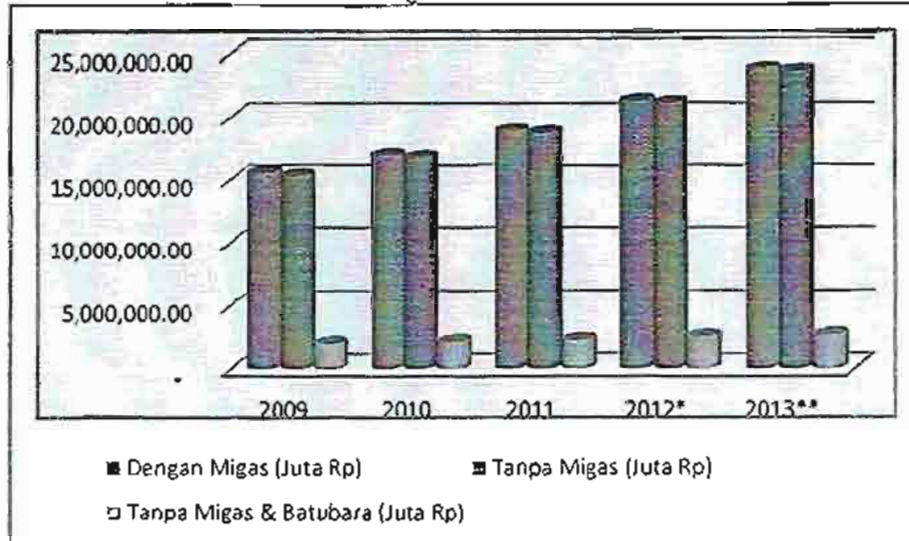


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 2.2 dan 2.3 menjelaskan betapa peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) sangat dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian bahwa terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang batubara hingga rata-rata 86%. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara.

Oleh karenanya visi Kabupaten Kutai Timur yakni "*Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri*" perlu segera ditindaklanjuti dan dikembangkan dengan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi ketergantungan PDRB terhadap subsektor pertambangan batubara. Penguatan kualitas SDM yang berkompetensi dalam sektor pertanian serta mengutamakan kebijakan dan program-program yang terkait dengan sektor pertanian menjadi prioritas bagi segenap pemangku kepentingan.

Gambar 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

a) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan suatu sektor terhadap sektor lainnya di Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stabil antara 4,29% - 5,04%, sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4%.

Sektor dengan kontribusi terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor industri pengolahan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi kurang dari 1%. Hal tersebut sekilas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kutai Timur belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder apalagi sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya diantaranya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini memberikan kontribusi 3,43%. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berpeluang menjadi sektor penopang bagi perkembangan ekonomi Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir. Subsektor perdagangan maupun subsektor Hotel dan Restoran perlu mendapatkan dorongan agar menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan angkatan kerja pada sektor pertambangan.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini :



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Juta Rp)

No	Sektor Usaha	2009		2010		2011		2012*		2013**	
		Harga berlaku	%	Harga berlaku	%	Harga berlaku	%	Harga berlaku	%	Harga berlaku	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian	1.196.216,10	4,37	1.292.751,66	3,77	1.487.765,19	3,25	1.752.385,65	3,49	2.066.877,26	3,39
2	Pertambangan dan Penggalian	23.492.820,36	85,80	29.705.414,58	86,74	40.454.400,37	88,43	44.089.901,16	87,86	55.746.332,55	88,21
3	Industri Pengolahan	86.433,78	0,32	95.255,08	0,28	104.040,34	0,23	112.805,68	0,22	122.922,38	0,20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	30.068,20	0,11	32.177,87	0,09	36.308,16	0,08	40.490,51	0,08	44.360,23	0,07
5	Bangunan dan Konstruksi	654.900,38	2,39	731.254,70	2,14	801.354,61	1,75	869.451,02	1,73	1.031.582,73	1,69
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	956.595,87	3,49	1.213.959,58	3,54	1.577.186,40	3,45	1.727.152,66	3,44	2.062.218,37	3,39
7	Pengangkutan dan Komunikasi	542.403,46	1,98	597.836,41	1,75	651.535,19	1,42	849.551,09	1,69	1.007.665,84	1,65
8	Kecamatan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	246.713,83	0,90	269.273,69	0,84	324.151,06	0,71	332.176,37	0,66	356.737,15	0,59
9	Jasa jasa	173.852,70	0,63	269.949,88	0,85	311.778,32	0,68	410.523,75	0,82	493.296,83	0,81
	Jumlah	27.380.004,69	100,00	34.247.873,45	100,00	45.748.619,66	100,00	50.184.447,90	100,00	60.931.993,14	100,00

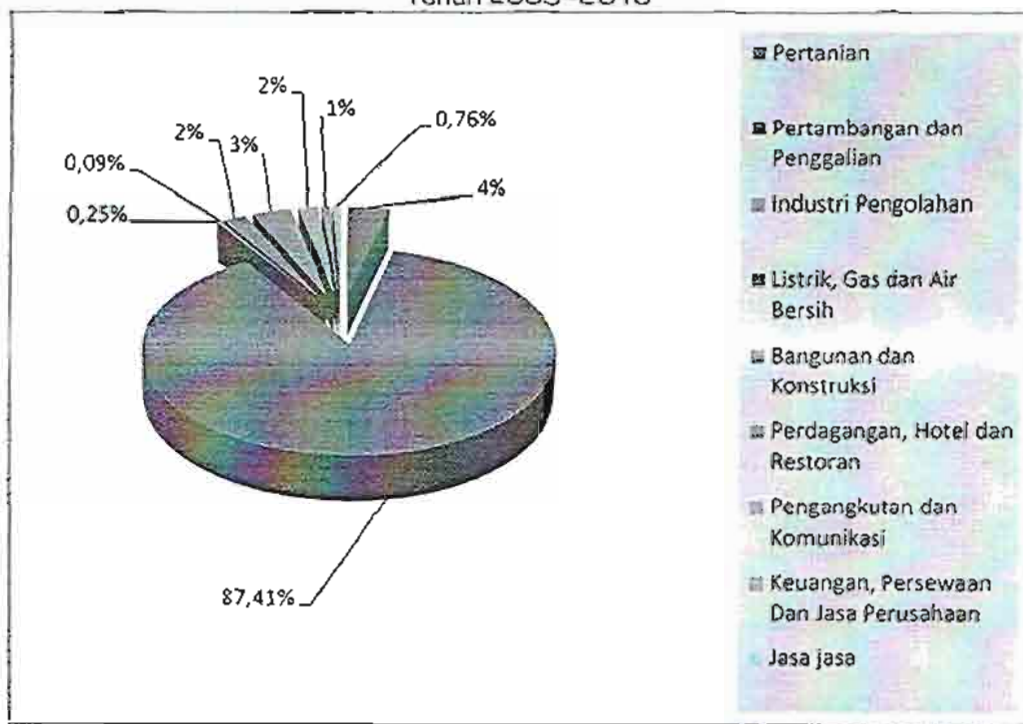
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2014
Keterangan : *) Angka sementara
*) Angka Sangat Sementara



Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam lima tahun terakhir (2009-2013) masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Bahkan terus mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB dari 85,80% meningkat menjadi 88,21%. Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya justru mengalami penurunan, tidak terkecuali sektor pertanian yang menjadi tumpuan bagi pengembangan agribisnis Kabupaten Kutai Timur juga mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi bukan karena terjadi penurunan sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan, melainkan masih mendominasi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur.

Namun bila nilai PDRB tidak mengikutsertakan migas dan batubara, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian disusul sektor bangunan. Sementara itu subsektor pekebunan merupakan penyumbang terbesar pada sektor pertanian. Oleh karenanya di masa mendatang, sektor pertanian masih berpeluang dan diharapkan menjadi sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada agribisnis.

Gambar 2.4
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014



b) Struktur Perekonomian Tanpa Migas dan Batubara

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, migas dan bahan tambang lainnya, akan tetapi komoditi-komoditi tersebut adalah komoditi SDA yang tidak dapat terbaharui (*unrenewable*). Perubahan yang terjadi pada komoditi tambang tersebut khususnya batubara baik pada produksi maupun harga, pasti berpengaruh terhadap besarnya sumbangan sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan bangunan. Jika komoditi batubara dan migas ini dikeluarkan dari PDRB Kutai Timur maka peranan sektor-sektor lainnya akan lebih nyata terlihat pengaruh dan andilnya.

Tabel 2.13
Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2009-2013

No	Sektor Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	29,17	27,11	26,79	27,42	27,48	27,59
2	Pertambangan dan Penggalian	5,22	4,75	4,67	4,64	4,48	4,75
3	Industri Pengolahan	2,11	2,00	1,87	1,77	1,63	1,88
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,73	0,67	0,65	0,63	0,59	0,65
5	Bangunan dan Konstruksi	15,97	15,33	14,43	13,60	13,71	14,61
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,32	25,45	28,40	27,03	27,41	26,32
7	Pengangkutan dan Komunikasi	13,22	12,54	11,73	13,29	13,40	12,84
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	6,02	6,07	5,84	5,20	4,74	5,57
9	Jasa jasa	4,24	6,08	6,61	6,42	6,56	5,78
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BFS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2014

Berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2009-2013, sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian sebesar 27,48% dengan sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar. Urutan kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan *share* 27,41%, kemudian disusul sektor bangunan dan konstruksi sebesar 13,71%. Selanjutnya sektor pengangkutan dan

RKPD Tahun 2016

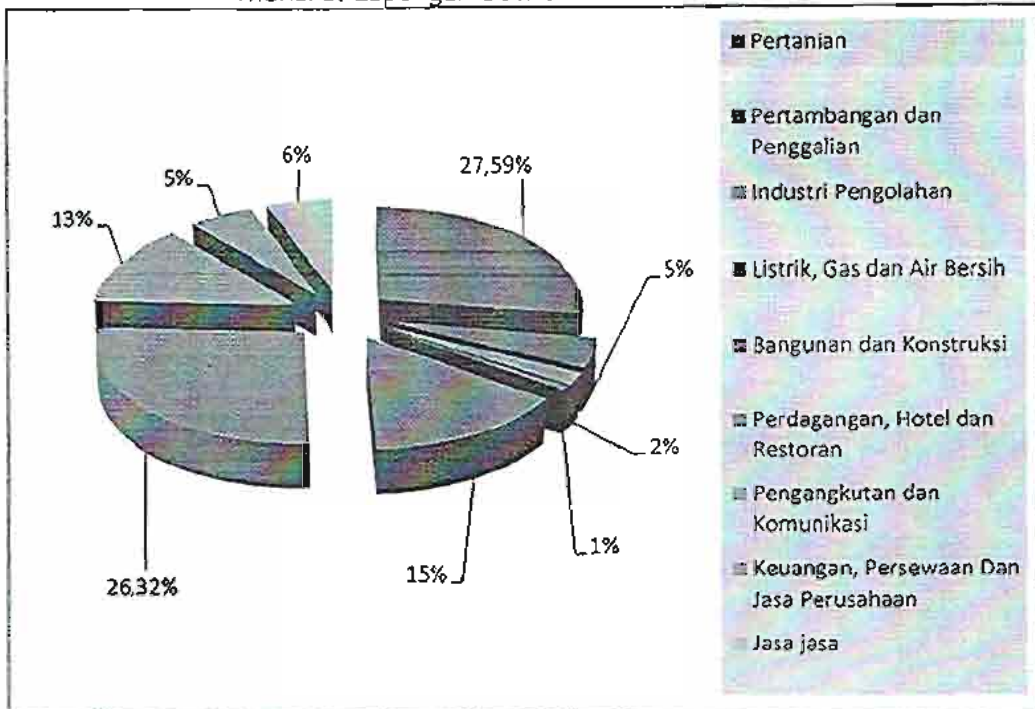
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



komunikasi sebesar 13,40. Sedangkan sektor lainnya jasa-jasa, keuangan dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan dibawah 7%.

Gambar 2.5

Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

B. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB Per Kapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Sedangkan pendapatan regional per kapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.

PDRB perkapita pada tahun 2009-2013 cenderung meningkat pada setiap tahunnya, demikian pula halnya dengan pendapatan regional per kapita. Sejalan dengan distribusi PDRB yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara, maka akan terlihat besaran PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita apabila unsur migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan. Selisih antara PDRB perkapita yang tidak terpaut begitu jauh dengan



pendapatan regional perkapita menunjukkan bahwasanya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur tidak begitu besar. Dengan kata lain, seluruh masyarakat secara mayoritas ikut menikmati dampak adanya pembangunan yang terjadi di daerah. Secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan terjadinya perbaikan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009- 2013

Tahun	Dengan Migas (Rp)		Tanpa Migas		Tanpa Migas dan Batubara	
	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita	PDRB Perkapita	Pendapatan Regional Perkapita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2009	133.736.487	100.623.213	129.097.120	97.046.875	20.033.311	14.774.195
2010	133.970.722	100.898.900	131.028.512	98.630.828	18.655.674	13.861.970
2011	172.297.557	129.764.317	169.102.364	127.301.220	20.916.039	15.516.327
2012*	179.410.863	131.541.241	175.973.678	129.625.777	22.847.298	16.977.011
2013**	201.694.780	n.a	198.059.111	n.a	24.900.106	n.a

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

*} Angka Sementara

**} Angka sangat sementara

n.a data belum tersedia

Namun penting untuk diperhatikan bahwa antara PDRB perkapita [dengan migas] dibandingkan dengan PDRB perkapita [tanpa migas dan batubara] selama kurun waktu 2009 hingga 2013, mencerminkan kesenjangan hasil pembangunan yang didapatkan oleh pelaku-pelaku pembangunan antara sektor pertambangan [khususnya] dengan sektor-sektor diluar sektor pertambangan. Dengan kata lain, hasil pembangunan di Kabupaten Kutai Timur masih menggantungkan pada sektor dominan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bila kondisi tersebut tidak diiringi dengan upaya percepatan pembangunan di sektor-sektor lainnya, maka dalam jangka panjang struktur PDRB akan semakin tergantung pada keberadaan sektor pertambangan. Sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang tidak terbarukan.

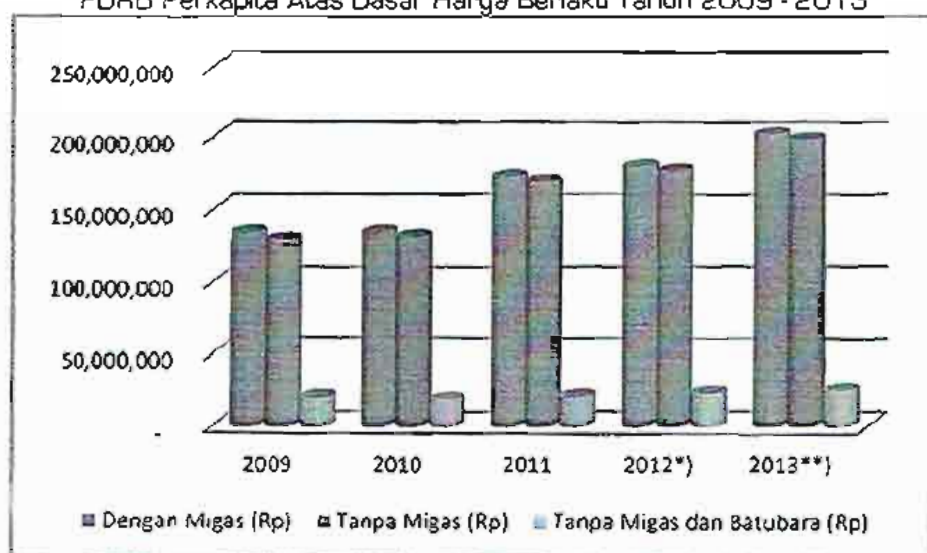
Berdasarkan komposisi PDRB perkapita seperti ini maka diperlukan usaha ekstra keras untuk melepaskan dari ketergantungan terhadap hasil tambang yang demikian dominan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor di luar non migas dan non pertambangan melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau



sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Karena hal ini seiring dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa mendatang.

Sementara itu pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka akan dihasilkan suatu pendapatan regional perkapita. Namun demikian pendapatan regional tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk di daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi dan mengalir ke pihak luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tersebut.

Gambar 2.6
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013

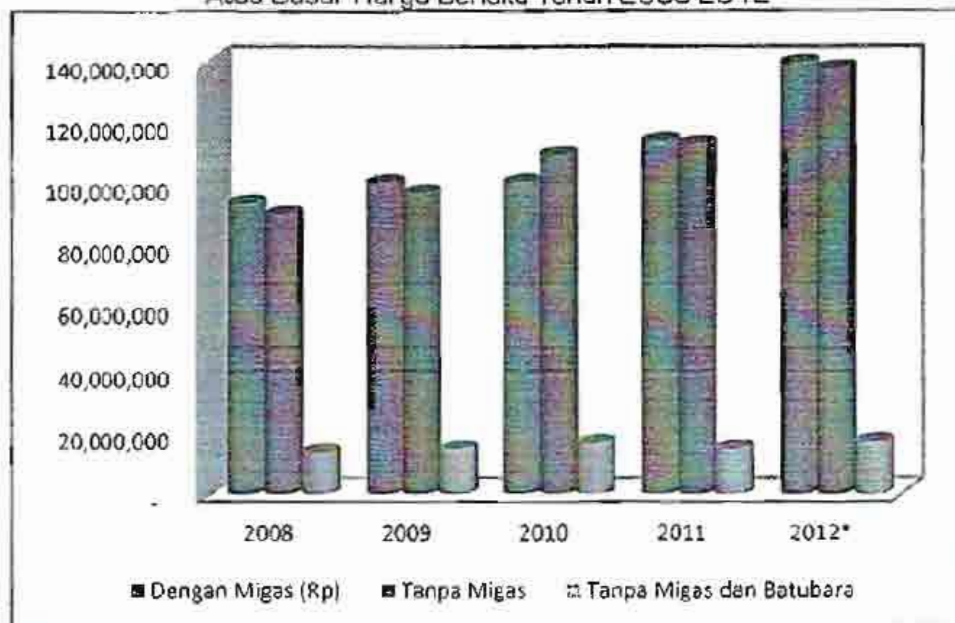


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2008-2012 tetap mengalami peningkatan cukup berarti. Tidak terjadi perbedaan antara pendapatan perkapita total dengan pendapatan regional tanpa migas. Namun bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita tanpa migas dan batubara nampak jelas kesenjangan. Kondisi ini dapat dimengerti karena kontribusi minyak dan batubara memberi sumbangan terhadap pendapatan regional hingga 87 %.



Gambar 2.7
Pendapatan Regional Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

C. Kemiskinan

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, sangat penting manfaatnya untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Hal ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Indikator penentu dalam melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan salah satu suksesnya pembangunan *millennium* (MDGs) adalah pengentasan kemiskinan absolut.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan



pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. Pengurangan penduduk miskin hingga separuh merupakan salah satu target MDGs pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi kemiskinan tingkat nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 12,49 persen berhasil menurunkan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 13,33 persen. Sementara itu angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur secara kuantitatif justru mengalami kenaikan dari 6,63 persen atau sebesar 247.900 jiwa pada tahun 2011 menjadi 6,68 persen atau sebesar 253.340 jiwa pada tahun 2012. Situasi ini menunjukkan terjadi pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang sangat tinggi dan tambahan masuknya penduduk migran yang ditengarai mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
	(Jiwa)	(%)
(1)	(2)	(3)
2010	29.200	7,95
2011	27.432	6,37
2012	24.295*	6,12*
2013	21.158**	5,87**
2014		

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

*) Data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

**) LKPJ

Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun 2012 yakni masing-masing sebesar 6,37 persen dan 6,12 persen telah berada



pada posisi dibawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, yakni 6,68 persen pada tahun 2012, serta masih lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional tahun 2011 sebesar 12,49 persen. Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2009-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.15

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

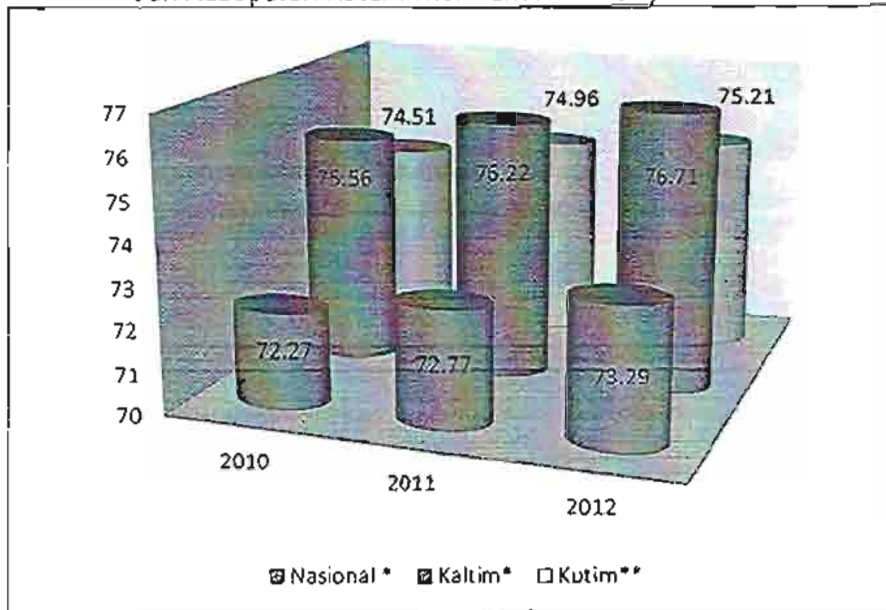
Pengertian Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Davies A and G. Qunlivan-2006).

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah menggunakan indikator *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pembangunan manusia akan tercermin dalam kualitas sumberdaya manusia. Kondisi kualitas sumberdaya manusia sebagai obyek maupun subyek pembangunan tampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan untuk melihat tujuan atau produk akhir pembangunan, yakni {1} masa hidup [*longevity*] yang diukur dengan usia harapan hidup, {2} pengetahuan [*knowledge*] yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang dan rata-rata tahun bersekolah, serta {3} standar kehidupan [*standard of living*] yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli [*purchasing power parity*] untuk mencerminkan biaya hidup (Todaro, 2004: 68).

Berdasarkan perkembangan tingkat nasional, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan peringkat. Walaupun dalam laporan *United Nations Development Programme* (UNDP), tahun 2011 IPM Indonesia berada di peringkat 108, dan pada tahun 2011 turun ke peringkat 124 dari 187 negara. Capaian IPM pada tingkat nasional besar kemungkinannya berdampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini terlihat dari perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2009, angka IPM mencapai 75,11 dan tahun 2010 mencapai nilai 75,56, dan semua capaian diatas nilai target yang ditetapkan tahun 2010 sebesar 75,38. Kemudian tahun 2011 mencapai 76,22 melampaui rata-rata nasional sebesar 72,77. Pencapaian tersebut menempatkan Kalimantan Timur posisi di peringkat 5 setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau dan DIY.



Gambar 2.8
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur
dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 s/d 2012



Sumber:

*) Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

**) Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Sementara itu Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari 497 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, pada tahun 2010-2013 menempati posisi di atas rata-rata IPM nasional namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur.(Lihat Gambar 2.8).

Pencapaian IPM Kabupaten Kutai Timur menurut kecamatan pada tahun 2008-2012 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan
Tahun 2008-2012

Kecamatan	Angka IPM				
	2008	2009	2010*	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muara Ancalong	70,45	70,67	59,86	60,98	63,14
Busang	68,92	69,14	56,92	57,21	60,11
Long Mesangat	70,63	70,84	63,13	64,14	66,18
Muara Wahau	71,46	71,67	64,53	64,80	67,31
Telen	68,87	69,07	60,09	60,37	61,53
Kongbeng	70,11	70,31	63,52	63,81	65,95
Muara Bengkal	70,21	70,41	62,00	62,29	64,17
Batu Ampar	69,06	69,27	62,55	62,94	63,14
Sanggata Utara	70,83	72,03	74,85	75,18	77,01



Kecamatan	Angka IPM				
	2008	2009	2010*	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengalon	70,01	70,20	65,26	65,33	67,11
Teluk Pandan	70,33	70,55	64,99	65,35	67,42
Sanggatta Selatan	71,58	71,78	70,66	70,98	73,53
Rantau Pulung	70,35	70,56	62,81	63,15	66,39
Sangkulirang	70,84	71,04	63,91	64,19	66,54
Kaliorang	70,80	71,00	62,39	61,68	64,31
Sandaran	68,06	68,27	60,42	60,72	61,83
Kaubun	70,67	70,87	65,23	65,58	67,45
Karangan	68,08	68,29	62,82	63,16	64,24
Kutai Timur	70,84	71,23	74,51	74,96	75,21

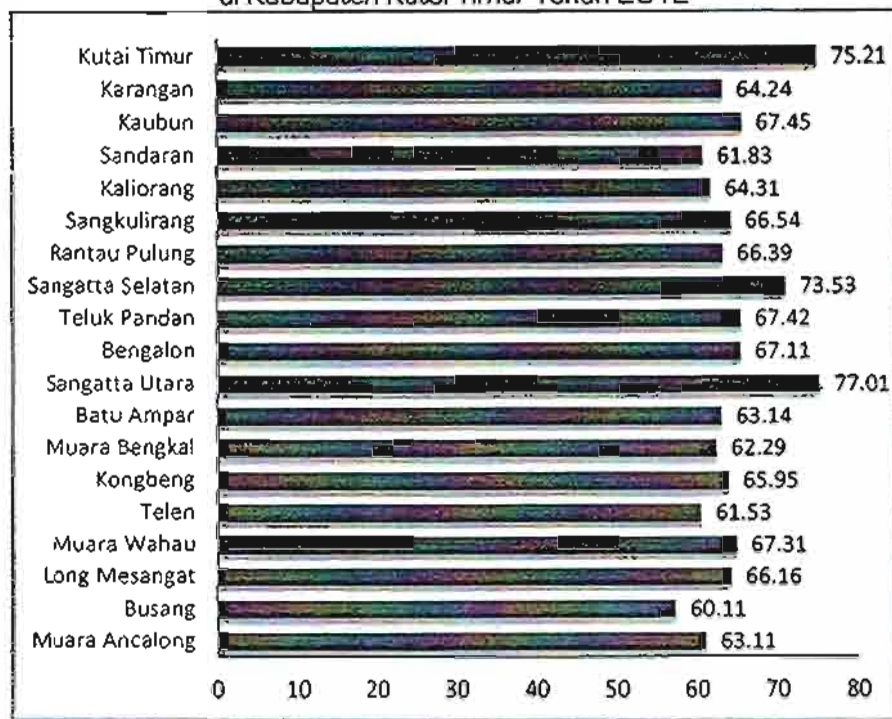
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Keterangan: *) Hasil perhitungan lokal

Pada tahun 2011 Angka IPM kecamatan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi, antara 57,21 sampai 75,18. Nilai APM tertinggi pada Kecamatan Sangatta Utara sebesar 75,18 sebagai ibukota kabupaten hal ini wajar karena relatif memiliki fasilitas dan sarana/prasarana lebih lengkap dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Kemudian IPM tertinggi kedua diduduki oleh Kecamatan Sangatta Selatan dengan angka 70,98. Sementara 5 kecamatan dengan IPM terendah adalah Kecamatan Busang, Telen, Sandaran, Muara Ancalong dan Kaliorang yaitu berturut-turut sebesar 57,21, 60,37, 60,72, 60,98 dan 61,68. Gambar lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Kondisi geografis kecamatan ternyata baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan manusianya. Kecamatan-kecamatan yang paling sulit dijangkau di Kabupaten Kutai Timur, kesulitan sarana transportasi inilah yang diperkirakan menjadi sebab tertinggalnya dari kecamatan lain. Selain itu, secara umum kecamatan pemekaran cenderung memiliki angka IPM yang relatif lebih rendah. Sebagai kecamatan yang terhitung baru, kondisi ini tentu saja dapat dimaklumi. Karena kecamatan-kecamatan tersebut masih dalam proses pembangunan. Namun ini tentu saja menjadi tantangan dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang merata di wilayahnya.

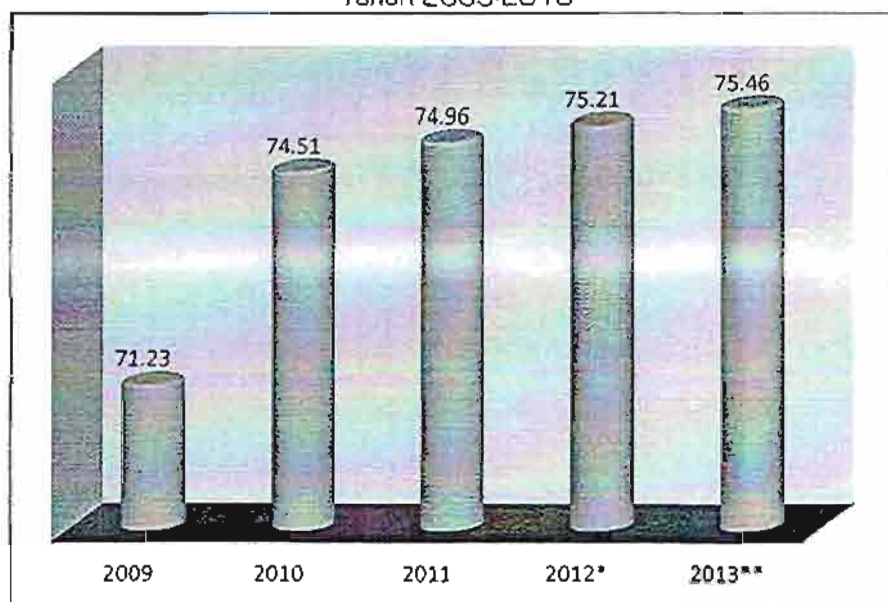


Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



Sumber: SIMREQA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 (diolah)

Gambar 2.10
Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013



Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur 2013

*) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

**) Angka proyeksi sementara



Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, nilai IPM Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan secara berturut-turut adalah 71,23, 74,51, 74,96 75,21 dan 75,46. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 menjadi sebesar 74,51 dari sebelumnya tahun 2009 sebesar 71,23 atau naik 3,28 poin. Sementara pada tahun 2013 diproyeksi sebesar 75,46 terjadi peningkatan angka IPM dibanding dengan tahun 2012 sebesar 75,21, atau naik 0,25 poin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Tabel 2.17
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka melek huruf (%)	97,76	97,99	98,23	98,28	
2	Rata-rata lama sekolah	8,03	8,05	8,10	8,49	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	114,47	120,36	125,52	119,68	
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	96,77	99,36	100,59	101,31	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%)	58,63	69,68	72,08	82,58	
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	97,30	99,51	99,58	99,66	
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	75,13	62,56	84,29	68,53	
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%)	47,18	51,50	52,08	60,78	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai oleh peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lainnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah. Angka Melek Huruf telah



digunakan sebagai indikator tercapainya *Education for All* (EFA) dan MDG's dan berperanan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Indikator Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: 1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Kutai Timur tercatat penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf lainnya, atau dapat membaca huruf latin dan lainnya berjumlah sekitar 204.846 orang atau 96,44 persen dari total penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berjumlah 212.408 orang yang berarti jumlah buta huruf masih terdapat sekitar 7.562 orang atau 3,56 persen. Sementara itu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 95,89 persen menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis adalah 96,44 persen. Kecamatan Sangatta Utara memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu 97,69 persen. Sedangkan Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan dengan angka melek huruf terendah, yaitu 91,40 persen.

Tabel 2.18
Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun ke atas
Tahun 2010-2014

Kemampuan membaca/menulis	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buta huruf	2,24	2,01	1,77	1,72	
Mampu	97,76	97,99	98,23	98,28	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami buta huruf telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni



pada tahun 2010 sebesar 2,24 persen menjadi 1,77 persen pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 dan 2012 telah berhasil menurunkan penduduk yang tidak mampu membaca/menulis huruf latin (angka buta huruf) di Kabupaten Kutai Timur yakni program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan (akses) pendidikan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Kutai Timur khususnya.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2010-2014

Usian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Yang Dapat Membaca dan Menulis/Melek Huruf	Orang	171.348	179.721	189.080		
	%	87,58	93,25	96,87		
Dapat Membaca Huruf Latin	Orang	41.476	62.170	187.588		
	%	23,62	33,96	98,79		
Dapat Membaca Huruf Latin&Arab	Orang	116.439	105,35	122.126		
	%	66,31	61,25	63,86		
Buta Aksara/Huruf	Orang	4.249	3.201	2.161		
	%	2,42	1,75	1,13		
Jumlah	Orang	175.598	182,92	191.241		
Persentase	%	100,00	100,00	100,00		

Sumber: Simreka Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Jika dilihat pertumbuhannya, maka dari tahun 2010-2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang memiliki kemampuan baca-tulis huruf latin yakni sebesar 44,74 persen. Peningkatan juga terjadi pada penduduk yang bisa baca-tulis huruf lainnya yakni sebesar 65,16 persen. Sedangkan rata-rata akumulasi penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya dibanding jumlah seluruh penduduk menurun sebesar 44,80 persen dan yang tidak dapat membaca dan menulis meningkat sebesar 6,5 persen. Sehingga secara akumulatif pertumbuhan dari tahun 2010 hingga 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang melek huruf, yakni sebesar 6,72 persen, sedangkan yang tidak mampu membaca dan menulis (buta huruf) menurun sebesar 24,65 persen.



2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2010	8.03	4.96
2011	8.05	0.25
2012	8.10	0.62
2013	8.49	4.59
2014		

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 adalah 8.10 tahun, kemudian pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah naik menjadi 8.49 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menduduki kelas 2 SMP dan hal ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD). Pada tahun 2011 Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 8.30 tahun, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sandaran dan Karangah, yaitu 6.30 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya





anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2010-2014

No	APK	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	114,47	120,36	125,52	119,88	
2	SLTP	96,77	99,36	100,59	101,31	
3	SLTA	58,63	69,88	72,05	82,58	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2010-2013 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 capaian APK SD sebesar 114,47 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2011 yakni menjadi sebesar 120,36 persen jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 98 persen. Kemudian pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 125,52 persen, juga jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 98 persen. Capaian pada tahun 2011, APK SD Kabupaten Kutai Timur berada jauh di atas, jika dibandingkan dengan APK SD Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 104,83 persen.

Capaian APK SD di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 telah mencapai 125,52 persen dan tahun 2013 mencapai 119,88 persen. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun), yaitu selisih 25,52 persen pada tahun 2012. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 25,52 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun. Pencapaian nilai APK di Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2012 telah melebihi target yaitu sebesar minimal 98 persen, bahkan telah juga melampaui target APK Nasional sebesar 95 persen. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat distribusinya, karena pada tahun 2011 terdapat empat kecamatan yang masih di bawah 100 persen diantaranya Kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, Sangkulirang dan Kaubun. Oleh karena itu empat kecamatan tersebut harus mendapatkan prioritas utama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya SKPD yang bersangkutan.



Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat pada tahun 2011 sebesar 99,36 persen sudah lebih tinggi dari target RPJMD (minimal 97 persen). Demikian juga pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 104,67 persen lebih tinggi target yang telah ditetapkan RPJMD sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat SLTP lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat SLTP (13-15 tahun), yaitu selisih 4,67 persen pada tahun 2012. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 4,67 persen anak yang bersekolah di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 13-15 tahun.

Sedangkan APK SLTA sebesar 69,88 persen (tahun 2011) sudah lebih besar dari target RPJMD (62,63 persen). Demikian juga pada tahun 2012 capaian APK SLTA Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,05 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan RPJMD yakni sebesar 66,63 persen

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	APM	2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	97,30	99,51	99,58	99,66	
2	SLTP	75,13	62,58	84,29	97,01	
3	SLTA	47,18	51,50	52,08	60,78	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



APM SD di Kabupaten Kutai Timur trendnya meningkat dari tahun 2010 hingga 2011 dan bahkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi (2,21 poin) sehingga sudah mencapai 99,51 persen kemudian pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi 99,58 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 2011, ada 98-100 dari 100 anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan setingkat SD/MI. Angka ini sudah jauh melebihi APM Nasional yang hanya mencapai 94,37 persen, yang berarti dari 100 anak Indonesia usia 7-12 tahun, hanya 94 anak saja yang mengenyam pendidikan di tingkat SD/MI. Semakin tinggi APM SD berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kutai Timur pada tingkat pendidikan SD/MI.

Pada tahun 2011 APM SLTP sebesar 62,58 persen masih jauh dibawah target RPJMD tahun 2011 (75,5 persen). Demikian juga jika dibandingkan dengan capaian APM SLTP di Kalimantan Timur, APM SLTP Kutai Timur masih jauh di bawah, dimana pada tahun 2011 APM SLTP Provinsi Kalimantan Timur sebesar 72,40 persen. Namun demikian tahun 2012 APM SLTP meningkat tajam sebesar 84,29 persen di atas target RPJMD sebesar 76 persen.

Sedangkan APM SLTA pada tahun 2011 sudah tercapai 51,5 persen sudah diatas target RPJMD tahun 2011 (50,0 persen), namun jika dibandingkan dengan APM SLTA Kalimantan Timur sebesar 54,58 persen, maka persentase APM SLTA Kabupaten Kutai Timur masih berada dibawahnya. Sedangkan pada tahun 2012 meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi APM SLTA Kabupaten Kutai Timur menjadi sebesar 52,08 persen, masih berada dibawah target RPJMD yang telah ditetapkan yakni sebesar 55 persen.

5) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat sebagai gambaran ketrampilan yang mereka peroleh dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.



Tabel 2.23
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2010-2014

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Sekolah/ Tidak tamat SD	25,10	20,77	19,21		
Sekolah Dasar	25,74	30,59	31,53		
S L T P Umum Dan Kejuruan	18,08	17,91	17,64		
S L T A	25,55	26,98	27,23		
Perguruan Tinggi	5,53	3,74	4,39		
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00		

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Pada kurun waktu lima tahun 2008-2012 tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 10 tahun keatas mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama perkembangan pada tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA, sedangkan tingkat pendidikan perguruan tinggi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap potensi-potensi yang dimiliki dengan melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur.

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum sekolah/tidak tamat SD pada tahun 2010 sebesar 25,10 persen kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 19,21 persen. Persentase Tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2010 sebesar 25,74 persen naik menjadi sebesar 31,53 persen pada tahun 2012. Kemudian tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2010 persentase yang ditamatkan sebesar 18,08 persen menjadi sebesar 17,64 persen pada tahun 2012. Selanjutnya tingkat pendidikan SLTA juga mengalami peningkatan persentase angka yang ditamatkan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 yakni dari sebesar 25,55 persen menjadi 27,23 persen. Namun demikian perkembangan peningkatan angka yang ditamatkan dari pendidikan SD, SLTP dan SLTA tidak diikuti peningkatan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi, yang justru mengalami naik turun. Pada tahun 2010 persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebesar 5,53 persen, kemudian turun pada tahun 2011 sebesar 3,74 persen, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012 yakni dengan estimasi persentase yang ditamatkan sebesar 4,39 persen.



B. Kesehatan

Tabel 2.24
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) (%)	88,17	88,13	81,93	85,44	
2	Angka Harapan Hidup (UHH)	68,61	68,72	68,79	68,86*	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

*) LKPJ

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1 - \text{angka kematian bayi})$. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Tabel 2.24 menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang cukup cepat dan sudah tergolong rendah dan sudah jauh dibawah AKB Nasional (34 per 1.000 kelahiran) maupun target MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran. Selain itu juga menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada penurunan dari 19,74 per 1.000 kelahiran di tahun 2007 menjadi 10,32 per 1.000 kelahiran di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu usia produktif usia subur mengalami peningkatan dalam hal kesehatannya, memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan makanan bergizi dan memeriksakan kesehatannya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Hasil analisis SDKI 2007 menunjukkan pendidikan ibu mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat kematian bayi, dimana anak dari ibu dengan pendidikan rendah umumnya mempunyai tingkat kematian yang lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan tinggi.

Cukup rendahnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Timur dan adanya trend menurun dari tahun ke tahun, disinyalir turut memberikan kontribusi



penting dalam peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut terlihat pada trend angka harapan hidup yang mengalami peningkatan dari 68,08 tahun di tahun 2007 menjadi 68,79 tahun di tahun 2012. Hal ini menggambarkan semakin sehatnya masyarakat, disinyalir karena peningkatan pelayanan kesehatan dan adanya peningkatan pendapatan hingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup dan memelihara tingkat kesehatan. Hasil analisis SDKI 2007 menunjukkan status kekayaan rumah tangga, dimana anak yang tinggal dalam rumah tangga yang lebih kaya mempunyai mortalitas yang lebih rendah daripada yang tinggal dalam rumah tangga miskin.

Tabel 2.25
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Tahun 2010-2014

Variabel	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Angka Kelahiran Total /TFR	Per Wanita	2,2	2,85	1,44	1,90	
Angka Kematian bayi/IMR	Per 1000 kelahiran hidup	11,83	11,39	18,07	14,27	
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,61	68,72	68,79	68,86	

Sumber:
- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Berdasarkan laporan BPS (2011), meskipun terjadi kenaikan Angka Harapan Hidup, namun AHH Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 adalah 68,82 tahun, dimana kondisi ini masih lebih belum mencapai (lebih rendah 0,59 tahun) target RPJMD [tahun 2011] sebesar 69,41. Kondisi tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan target AHH Provinsi Kaltim (2011) yaitu 71,20 tahun maupun target AHH Indonesia (tahun 2011) yaitu 70,76 tahun.



Pada tahun 2007 angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur sebesar 68,08 tahun, kemudian meningkat 68,25 tahun pada tahun 2008, dan selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 68,79 tahun, yang artinya bahwa setiap bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup selama 68 tahun. Kecamatan Muara Wahau adalah kecamatan dengan angka harapan hidup tertinggi di Kabupaten Kutai Timur yaitu 69,46 tahun. Sedangkan AHH terendah dimiliki oleh Kecamatan Busang sebesar 67,21.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur yang masih belum *on track* yaitu berada dibawah angka rata-rata nasional, maupun target RPJMD Kutai Timur, sehingga diperlukan perubahan strategi untuk percepatan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan

C. Pertanian

Pemanfaatan lahan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersedianya sumber daya alam yang melimpah berpotensi untuk investasi besar. Masuknya investasi akan memberikan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak. Penyerapan tenaga kerja sebagai dampak masuknya investasi akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat



akan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjangnya diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.26 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2009 tercatat sejumlah 174.211 jiwa meningkat 134,89 persen menjadi 409.204 jiwa pada tahun 2013. Jika dilihat dari jenis kelamin, tercatat peningkatan jumlah penduduk usia kerja laki-laki cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki meningkat sebesar 146,96 persen sedangkan yang perempuan 120,90 persen dari tahun 2009 ke tahun 2013. Data penduduk usia kerja tahun 2009-2013 dapat dilihat Tabel 2.26:



Tabel 2.26
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja)
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2010-2014

Kelompok Umur	2010			2011			2012			2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-24	24.146	20.873	45.019	22.724	48.617	22.724	51.018	44.690	96.708	55.619	45.969	102.488			
25-34	29.132	24.766	53.898	27.507	58.863	27.507	68.994	55.670	124.664	72.403	57.618	130.021			
35-44	22.693	17.155	39.848	18.244	41.435	18.244	52.123	39.023	91.146	52.904	39.410	92.314			
45-54	12.932	9.752	22.684	9.044	21.937	9.044	29.482	21.463	50.945	29.314	21.022	50.336			
55-59	3.547	2.185	5.732	3.422	6.477	3.422	8.685	5.501	14.186	8.397	5.371	13.768			
60+	5.914	4.063	9.977	1.912	5.593	1.912	12.854	7.959	20.813	12.466	7.811	20.277			
Jumlah	98.364	78.794	177.158	82.853	182.922	265.775	223.156	174.306	397.462	231.003	178.201	409.204			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlah penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis agribisnis. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2013

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	30.307	51,56	39.349	51,77	45.669	55,03
Pertambangan	15.352	26,12	17.783	23,41	18.079	21,78
Listrik, Gas dan Air Bersih	215	0,37	425	0,56	425	0,54
Bangunan	1.135	1,93	1.787	2,35	1.789	2,16
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.060	5,21	3.685	4,85	3.992	4,81
Pengangkutan dan Komunikasi	1.177	2,00	2.584	4,40	2.803	3,50
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	290	0,48	368	0,49	389	0,50
Jasa-jasa	7.244	12,32	8.897	13,14	8.733	11,73
Total	58.750	100,00	76.006	100,00	82.983	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja pada berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2013 adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 55,03 persen atau sejumlah 45.669 jiwa dan diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 21,78 persen atau sebesar 18.079 jiwa, kemudian disusul sektor jasa-jasa dengan persentase 11,73 persen. Sedangkan pada sektor-sektor lain yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih dibawah 5 persen.



2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kutai Timur sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan gerak jalan santai.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.



A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, *skill*, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Adapun gambaran umum urusan pendidikan secara terperinci dilihat dari capaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2010-2014

No	APS	2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	99,13	99,14	99,25	99,66	
2	SLTP	94,97	95,13	94,82	97,01	
3	SLTA	62,56	63,45	63,76	60,78	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

APS SD dari tahun 2010 hingga tahun 2013 yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2011 sebesar 0,01 poin, yakni sebesar 99,13 persen pada tahun 2010 menjadi 99,14 persen. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat 0,11 poin dari 99,14 persen tahun 2011 menjadi 99,25 persen pada tahun 2012. Namun demikian jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah melampaui target yaitu minimal 99,0 persen.

Pada tahun 2010 sebesar 94,97 persen, naik pada tahun 2011 menjadi sebesar 95,13 persen, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 94,82 persen. Trend APS SLTP Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga



tahun 2013 masih terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan, meskipun pada tahun 2011 hingga 2013 sudah *on tract* dengan RPJMD.

Trend capaian APS SLTA Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2012 masih sedikit dibawah target atau belum *on tract* dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) indikatornya ditunjukkan oleh seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.29
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	59,29	58,71	59,75	59,55	
SLTP	61,15	61,15	58,79	56,29	
SLTA	33,20	34,07	31,74	39,60	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada Tabel 2.29 di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD selama kurun waktu 2010-2013 cenderung tetap, dengan capaian yang jauh melebihi target RPJMD. Demikian juga capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap usia penduduk sekolah SLTP telah jauh melampaui target meskipun selama 3 tahun terakhir (tahun 2011-2013) mengalami penurunan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.29.

Berbeda dengan rasio SD dan SLTP yang melampaui target RPJMD, maka sebaliknya dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SLTA masih berada dibawah target meskipun capaiannya cenderung mengalami



kenaikan. Secara umum capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk baik tingkat SD dan SMP telah melampaui target.

3) Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.30
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Rasio Guru Terhadap Murid	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	14,44	14,66	15,11	14,98	
SLTP	12,33	12,45	12,62	13,09	
SLTA	11,92	11,62	12,62	11,64	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia (6) enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- a) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam



memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.

- b) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar [akademik] di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini:

- a) *Infant* (0-1 tahun)
- b) *Toddler* (2-3 tahun)
- c) *Preschool/ Kindergarten children* (3-6 tahun)
- d) *Early Primary School* (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)

Berdasarkan perkembangan capaian indikator PAUD selama kurun waktu 2010-2012 mengalami penurunan, dan bahkan masih jauh dari target, baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012, hal tersebut disinyalir karena pembinaan dan sosialisasi PAUD belum dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, selain itu kepedulian pemangku kepentingan dan komponen masyarakat masih terbatas dalam mengembangkan layanan PAUD.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA dan sederajat, jalur non formal berbentuk KB, TPA dan SPS serta jalur informal. Kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan PAUD. Dalam rangka memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia maka perlu dilaksanakan apresiasi lembaga PAUD berprestasi.

5) Angka Putus Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah



berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perbandingan angka putus sekolah tingkat SD antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 terdapat enam (6) kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Nunukan paling tinggi angka putus sekolahnya yaitu sebesar 5,2 persen. Sedangkan di Kabupaten Kutai Timur sendiri, angka putus sekolah pada tahun 2009 sebesar 1,4 persen yakni masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menekan angka putus sekolah masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan trend angka putus sekolah selama kurun waktu 2010-2013 terus mengalami penurunan meskipun masih fluktuatif tetapi tidak signifikan. Secara umum capaian angka putus sekolah baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.31
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

APtS	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
SD	0,15	0,25	0,28	0,10	
SLTP	0,27	0,43	0,67	0,19	
SLTA	0,27	0,64	0,67	0,20	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Angka Putus Sekolah SD terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,25 persen kemudian jumlahnya naik pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,28 persen, Sedangkan pada tahun 2013 turun kembali sebesar 0,1 persen. Capaian angka putus sekolah sudah mengalami penurunan namun demikian penurunan jumlah angka putus sekolah SD capaiannya masih belum memenuhi target target RPJMD. Meskipun capaian pada tahun 2013 selisih sedikit jika dibandingkan dengan targetnya.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*). Berbagai penelitian mengemukakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di tingkat sekolah dasar.



Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini (*early childhood education and development-ECED*) telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan baik.

Selanjutnya perkembangan capaian angka putus sekolah tingkat SLTP menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 justru mengalami peningkatan persentase, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan bahkan telah melampaui target RPJMD.

Capaian Angka Putus Sekolah SLTP, meskipun terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,43 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen, namun demikian capaiannya jika dibandingkan dengan target RPJMD juga masih belum tercapai, dimana target RPJMD tahun 2011 sebesar 0,25 persen dan tahun 2012 sebesar 0,23 persen. Namun pada tahun 2013 jumlah angka putus sekolah SLTP telah menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,19 persen atau melampaui target RPJMD sebesar 0,21 persen.

Sedangkan, Angka Putus Sekolah SLTA juga terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,64 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen, namun demikian capaiannya dibandingkan dengan target RPJMD juga masih belum tercapai. Sedangkan tahun 2013 menurun kembali jumlah angka putus sekolah SLTA sebesar 0,2 persen sedikit melampaui target RPJMD sebesar 0,21.

Beberapa penyebab adanya angka putus sekolah disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geografis tempat tinggal yang biasanya jauh dari lokasi sekolah sehingga menyebabkan siswa tersebut merasa berat untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua menjadi salah satu penyebabnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan tersebut serta mewujudkan capaian target angka putus sekolah, maka program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu dan yang telah menjadi program andalan Kabupaten Kutai Timur masih terus dilaksanakan diantaranya dengan melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur akan pentingnya pendidikan dan juga pemberian bantuan pendidikan berupa Biaya Operasional Sekolah, dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.



6) Angka Kelulusan (SD/SLTP/SLTA)

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan. Selain itu Angka Lulusan (AL) merupakan indikator output yang memberikan gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.32
Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

AL	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
SD	100,00	100,00	100,00	100,00	
SLTP	99,56	99,60	99,00	99,94	
SLTA	98,95	99,99	99,00	99,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 tercapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD di Kabupaten Kutai Timur cukup baik.

Demikian pula capaian indikator Angka Kelulusan tingkat SLTP juga menunjukkan prestasi yang cukup baik meskipun belum sampai 100 persen, namun telah mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian sebesar 99,6 persen dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 99 persen, hampir mencapai angka 100 persen. Demikian pula pada tahun 2012 telah mencapai sebesar 99 persen sebagaimana dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian indikator Angka Kelulusan SLTA juga menunjukkan capaian yang cukup bagus. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian indikator kelulusan yang hampir mencapai 100 persen yakni sebesar 99,9 persen. Sedangkan pada tahun 2012 turun sedikit menjadi 99 persen, namun masih *on track* dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.



7) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya sama dengan 100 persen, berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI, ula, dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Angka melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) ditambahkan ke dalam indikator untuk memantau kemajuan pencapaian target ketiga. Karena fokus MDGs pada pendidikan dasar, di Indonesia pendidikan dasar mencakup SD dan SMP, dan lulusan SD tidak otomatis menjadi siswa SMP, angka melanjutkan menjadi indikator yang penting berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menuntaskan pendidikan dasar.

Tabel 2.33
Angka Melanjutkan Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
SD/MI ke SMP/MTs	85,55	94,85	82,66	94,50	
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	95,36	93,57	92,19	95,38	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berikut data perkembangan capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2010 hingga 2012 yang masih fluktuatif. Pada tahun 2011 menunjukkan capaiannya sebesar 94,85 persen lebih besar dari target RPJMD sebesar 87,55 persen. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 82,66 dibawah target RPJMD sebesar 89,55 persen.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah



perbandingan antara jumlah lulusan SLTP dan sederajat (termasuk MTs, dan paket B setara SMP) terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada SLTA (termasuk SMA, SMK, MA, dan paket C setara SMA), dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditambahkan ke dalam indikator untuk memantau kemajuan pencapaian target 3. Meskipun fokus MDGs hanya pada pendidikan dasar, angka melanjutkan ini merupakan indikator *outcome* dari pendidikan dasar, khususnya berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar.

8) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menetapkan bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SOLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).

Berdasarkan capaian indikator tersebut, menunjukkan selama kurun waktu 2010-2013 mengalami capaian yang cukup positif. Pada tahun 2011 sekalipun capaiannya masih dibawah target RPJMD yakni sebesar 32,31 persen dari target sebesar 40,79 persen, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 59,17 persen dan 64,68 persen dibanding dengan target tahun 2012 sebesar 45,79 persen dan target 2013 sebesar 50,79. Sehingga diperkirakan pada tahun 2015 capaian Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV optimis akan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 60,79 persen.



Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan erat antara kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualitas belajar mengajar. Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi guru yang tidak merata di perkotaan maupun perdesaan terutama daerah terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang berlebih. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru serta meningkatkan pemerataan distribusinya.

B. Kesehatan

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perilaku sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif.

Pemmasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup: (1) dana kesehatan yang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis, (3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, dan (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kesehatan
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,45	0,45	0,45	-	
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	0,03	0,02	
Rasio dokter per satuan penduduk	0,39	0,28	0,28	0,39	
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,74	2,67	2,88	2,66	
Rasio Posyandu per satuan balita	9,87	7,49	7,09	5,73	
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	



Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cakupan puskesmas (%)	105,56	105,56	116,67	116,67	
Cakupan puskesmas pembantu (%)	68,15	73,33	73,33	84,44	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	75	27,02	39,31	12,12	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	58,21	41,79	62,42	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	55,50	72,90	85,15	69,09	
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	54,50	61,43	65,93	73,33	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	68	35,38	40,48	50,85	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	82,24	100	100	100	
Cakupan kunjungan bayi (%)	56,57	97,26	72,41	61,85	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan rasio sudah mencapai target RPJMD sebesar 0,45. Sementara pada tahun 2013 sebesar 0,46 sedikit melebihi target RPJMD sebesar 0,45. Capaian rasio puskesmas, poliklinik dan pustu dengan jumlah penduduk yang telah mencapai target ini seyogyanya tetap dipertahankan dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Tabel 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Puskesmas	19	19	21	21	
2	Jumlah Poliklinik	12	11	12	5	
3	Jumlah Pustu	96	95	95	114	
4	Jumlah 1-3	127	126	128	140	
5	Jumlah Penduduk	367.247	430.865	527.723	554.751	
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:19.329	1:22.677	1:25.129	1:26.163	
7	Rasio poliklinik per satuan penduduk	1:30.604	1:39.170	1:43.977	1:109.886	



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:3.826	1:4.352	1:5.555	1:4.820	
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1:2.892	1:3.340	1:4.123	1:3.924	
10	Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	
11	Jumlah Desa/Kelurahan	135	135	135	135	
12	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1:1	1:1	1:1,17	1:1,17	

Sumber:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan (misal: Rumah Sakit) di Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang relatif lambat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk sehingga rasio RS per jumlah penduduk semakin kecil, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1 RS : 52.464 jiwa, tahun 2011 sebanyak 1 RS : 61.552 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 1 RS : 75.389 jiwa. Sejak tahun 2010 hingga pada tahun 2012 jumlah rumah sakit tetap sebanyak 7 buah dan puskesmas juga tetap sebanyak 19 buah, namun penambahan jumlah Pustu telah meningkat cukup tinggi (14 pustu).

Tabel 2.36
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah Sakit	7	7	7	7	
2	Jumlah Penduduk	367.247	430.865	527.723	549.429	
3	Rasio	1:52.464	1:61.552	1:75.389	1:78.849	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat, 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupation Rate (BOR)* yang ideal 60-80 persen ; 2) Rata-rata lama rawat seorang pasien atau *Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal 6-9 hari; 3) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati/ *Turn of Interval (TOI)* yang ideal antara 1-3 hari; 4) angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam/ *Net Death Rate (NDR)* dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar; 5) angka kematian umum penderita yang dirawat rumah sakit/ *Gross Death Rate (GDR)* dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 45.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk pada tahun 2011 masih sesuai dengan target RPJMD sebesar minimal 0,02, namun pada tahun 2012 justru terjadi penurunan capaian rasio menjadi sebesar 0,01, hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012 sebesar 22,47 persen sedangkan jumlah RS tetap. Cakupan puskesmas telah memenuhi target RPJMD pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar masing-masing 105,56 dan 105,56, kemudian cakupan puskesmas pembantu telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar masing-masing 70,15 dan 72,15 dengan capaian indikator sebesar berturut-turut 73,33 dan 73,33.

Jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur akan berimplikasi pada rasio jumlah rumah sakit. Oleh karena itu, yang patut mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan program-program dan kegiatan dalam meningkatkan rasio rumah sakit yang perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang cepat terutama karena faktor migrasi sebagai bentuk pelayanan umum bagi masyarakat.

3) Rasio dokter per satuan penduduk

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Manusia yang sehat dan produktif akan meningkatkan daya saing suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kesehatannya. Hal tersebut merupakan amanah Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).



Menurut Indikator Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan RI, disebutkan bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk sebanyak 40 atau 1 dokter untuk 2500 jiwa, Dokter spesialis 6 per 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis untuk 1 untuk 16.000 jiwa. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 220 juta jiwa, itu artinya jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia adalah 88.000 dan dokter spesialis 13.200.

Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan 2012 masih jauh dari ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHO (1 dokter untuk 2500 jiwa), Demikian juga berdasarkan sebaran dokter masih terjadi ketimpangan, dimana tenaga dokter 50 persen lebih masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Jumlah dokter umum di Kabupaten Kutai Timur sebesar 91 dokter umum, dan 46 diantaranya berada di Kecamatan Sangatta Utara. Tenaga dokter paling banyak terdapat di RSUD Sangatta yaitu 32 orang, diikuti puskesmas sangatta selatan 8 orang, kemudian puskesmas teluk lingga 7 orang dan RS SDHC 6 orang.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015, maka capaian rasio dokter per satuan penduduk masih di bawah target, dimana pada tahun 2011 dan 2012 telah menetapkan target sebesar minimal 0,39. Sedangkan capaian rasio dokter tahun 2011 dan 2012 sebesar 0,20. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat di Kabupaten Kutai Timur namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah dokter.

Jika merujuk Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan RI, maka berdasarkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur, masih diperlukan cukup banyak tambahan jumlah dokter. Selain perlunya penambahan jumlah tenaga dokter, perlu diperhatikan distribusinya agar merata di semua kecamatan.

Tabel 2.37
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokter Umum	96	86	103	103	
2	Jumlah Dokter Gigi	27	25	25	29	
3	Jumlah Dokter Spesialis	19	19	19	16	
4	Bidan	174	232	267	266	



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Sarjana Keperawatan	11	8			
6	Perawat	421	430	512	462	
7	Tenaga Farmasi	20	39	55	32	
8	Sarjana Farmasi dan Apoteker	19	25			
9	Tenaga Sanitarian	13	12	22	11	
10	Kesehatan Masyarakat	32	38	34	69	
11	Tenaga Gizi	16	23	22	10	
12	Tenaga Terapi Fisik	7	5	6	3	
13	Tenaga Keteknisan Medis	38	33	41	36	
14	Jumlah Penduduk	367.247	430.865	527.723	554.751	
15	Rasio dokter terhadap penduduk	1:3825.49	1:5.010	1:5.123	1:5.386	
16	Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1:13601.74	1:22.677	1:27.774	1:34.672	
17	Rasio dokter gigi terhadap penduduk	1:19328.79	1:17.234	1:21.109	1:19.129	
18	Rasio tenaga farmasi dan apoteker terhadap penduduk	1:2110.61	1:1.765.84	-	-	
19	Rasio tenaga gizi terhadap penduduk	1:33386.09	1:18.733	1:23.987	1:55.475	
20	Rasio tenaga keperawatan terhadap penduduk	1:872.32	1:920.65	-	-	
21	Rasio tenaga bidan terhadap penduduk	1:18362.35	1:1.857	1:1.977	1:2.086	
22	Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk	1:19328.79	1:11.338	1:15.521	1:8.040	
23	Rasio tenaga sanitasi terhadap penduduk	1:28249.77	1:35.905	1:23.987	-	
24	Rasio tenaga teknis medis terhadap penduduk	1:11476.47	1:13.056	1:12.871	-	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 (Data diolah)



4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun menunjukkan capaian yang positif meskipun naik turun namun masih mencapai target RPJMD. Capaian selama 3 tahun terakhir 2011-2013 berturut-turut sebesar 2,67, 2,88 dan 2,68. Sementara target tahunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,74. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rasio tersebut adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pendistribusian tenaga medis yang lebih merata.

5) Rasio posyandu per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.38
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Posyandu	214	214	213	
2	Jumlah Balita	28.555	30.189	31.917	
3	Rasio	7,49	7,09	5,73	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014





Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2012 sebesar 12,21, sedangkan target pada tahun 2015 adalah 12,37. Sehingga dapat diperkirakan pada tahun 2015 dapat mencapai target yaitu 12,37. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaiannya adalah 100 persen yaitu semua kasus balita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu mendapat perawatan insentif.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

Data cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2011 dan 2012 belum tersedia, sehingga belum dapat dianalisis dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

7) Cakupan Puskesmas

Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pada kurun waktu 2011-2013 menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 116,67 persen, jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 105,56 persen, maka telah memenuhi target (*on track*).



8) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pembantu pada kurun waktu 2010-2013 menunjukkan adanya kenaikan yakni sebesar 68,15 persen pada tahun 2010 menjadi 73,33 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kemudian naik menjadi 84,44 persen pada tahun 2013. Sementara target akhir tahun 2015 sebesar 78,15 persen telah terlampaui.

9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen artinya setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2010, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencapai 100 persen, namun untuk tahun 2011 hingga tahun 2013 telah mengalami penurunan yakni berturut-turut sebesar 58,21 persen, 41,79 persen, dan 62,42 persen.

Penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang serius guna menemukan penyebabnya. Apakah karena faktor pengumpulan data atau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jika kondisi yang sebenarnya akan berpotensi kepada meningkatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011-2013 masih terjadi fluktuatif yakni berturut-turut sebesar 72,9 persen, 85,15 persen, 69,09 persen. artinya telah mencapai target sebesar 56 persen tiap tahunnya. Jadi, meskipun capaiannya masih fluktuatif tetap pada posisi sudah *on-track*. Sehingga pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan akan bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

11) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian Universal child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap.

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Jika dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk dan rasio posyandu per satuan balita yang sedikit di bawah target serta cakupan kunjungan bayi yang sudah melebihi target di tahun 2011 dan 2012, dimana target cakupan desa/Kelurahan UCI sebesar 55 persen. Melihat dari perpaduan data tersebut, disinyalir bahwa belum semua bayi yang berkunjung ke pelayanan kesehatan termasuk posyandu dan pustu mendapatkan pelayanan imunisasi atau saat kunjungan bayi, kader atau tenaga kesehatan kurang memberikan informasi tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Kuman "*mycobacterium tuberculosis*". Jumlah penderita TBC diseluruh dunia kurang lebih 18 juta orang dan kurang lebih 9 juta orang Tuberculosis (TBC) merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan yang utama di dunia.



Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Capaian CDR Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 sebesar 35,38 persen, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 40,49 persen. Sekalipun terjadi kenaikan cakupan namun capaian ini masih jauh dari target pada tahun 2015 yaitu 70 persen.

Pada tahun 2009, di Indonesia tercatat sejumlah 294.732 kasus TB telah ditemukan dan diobati (data awal Mei 2010) dan lebih dari 169.213 diantaranya terdeteksi BTA+. dengan demikian *Case Detection Rate* 73 persen. Meskipun secara nasional menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam penemuan kasus dan tingkat kesembuhan, pencapaian di tingkat provinsi masih menunjukkan disparitas antar wilayah. Pada tahun 2009 tersebut, sebanyak 28 provinsi di Indonesia belum dapat mencapai angka penemuan kasus (CDR) 70 persen dan hanya 5 provinsi menunjukkan pencapaian 70 persen CDR dan 85 persen kesembuhan (Kemenkes RI, 2011).

Hasil penelitian Pasaribu (2005) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya CDR pada program TBC adalah kemiskinan, penyuluhan kesehatan dan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Sebagai contoh, studi mengenai perjalanan pasien TB dalam mencari pelayanan di Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagai penyebab TB yang tidak infeksius, misalnya merokok, alkohol, stres, kelelahan, makanan gorengan, tidur di lantai, dan tidur larut malam (Kemenkes, RI, 2011).

Stigma TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, mengurangi mitos-mitos TB dapat dilakukan melalui kampanye pada kelompok tertentu dan membuat materi penyuluhan yang sesuai dengan budaya setempat agar pengetahuan masyarakat tentang TB meningkat. Sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di sekitarnya, untuk kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat.

Selain itu untuk dapat meningkatkan CDR ,perlunya pemantapan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) pada praktisi kesehatan,



terutama dokter praktek swasta dan tenaga kesehatan lainnya. Strategi ini terdiri atas lima komponen utama yakni adanya komitmen politik, tersedianya pelayanan pemeriksaan mikroskopik [*passive case finding using sputum-smear microscopy*], terjaminnya penyediaan obat yang merata dan tepat waktu, Adanya sistem monitoring yang baik, dan adanya program pengawasan keteraturan minum obat disertai jaminan agar setiap pasien pasti minum obat sampai tuntas [Mahendradhata, 2009].

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus *Flavivirus*, famili *Flaviviridae*. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2015 sebesar 85 persen, maka capaian tersebut telah melampauinya.

14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Timur masih jauh dari target RPJMD. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan capaian berturut-turut sebesar 27,02 persen, 39,31 persen, 12,14 persen. Sementara target RPJMD tahun 2011 hingga tahun 2013 berturut-turut sebesar 78 persen, 81 persen, 84 persen.



Terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna diantaranya meliputi : (1) terlaksananya registrasi masyarakat miskin yang tepat sasaran sebagai peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin, (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Program ini menjadi vital mengingat pengentasan kemiskinan di Kutai Timur merupakan prioritas pembangunan yang salah satunya dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi mereka. Mereka yang termasuk kelompok keluarga miskin (gakin) seringkali direpotkan masalah biaya saat berhadapan dengan problem kesehatan. Melalui program ini, gakin bisa terlepas dari beban biaya kesehatan, sebab pemerintah akan menanggung biaya pelayanan kesehatan untuk gakin. Dengan capaian yang masih rendah diharapkan ke depan ada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

15) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di kabupaten Kutai Timur telah mencapai target di tahun 2011 yaitu 97,26 persen (target sebesar 65 persen), sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 72,41. Namun demikian, capaian tersebut masih melampaui target RPJMD.



C. Pekerjaan Umum

Capaian urusan pekerjaan umum, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	48,73	56,91	58,53	n.a	
Rasio jaringan ingasi	40	50	65	75	
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,17	2,50	2,94	2,94	
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai standar	26,69	27,71	27,71	
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m (%)	0,079	0,079	0,10	0,10	
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	18,84	35	40,50	40,50	
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	0,16	0,16	0,16	0,16	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikategorikan tiga kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan.

Kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih timpang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal sebagai upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Adapun gambaran mengenai proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tampak pada Tabel 2.40 berikut.



Tabel 2.40
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kondisi baik	539,29	583,47	315,00	-	
2	Kondisi Sedang	-	227,20	383,00	-	
3	Kondisi rusak ringan	210,00	-	217,00	-	
4	Kondisi rusak berat	274,71	214,50	167,76	-	
5	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	1.024,00	1.025,17	1.082,76	-	
6	Proporsi kondisi baik (%)	52,67	56,91	29,09	-	
7	Proporsi kondisi sedang (%)	-	22,16	35,37	-	
8	Proporsi kondisi rusak ringan (%)	20,51	-	20,04	-	
9	Proporsi kondisi rusak berat (%)	26,83	20,92	15,49	-	

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada tahun 2011, untuk mendukung transportasi darat, pemerintah telah membangun jalan negara sepanjang 312,29 km, jalan provinsi sepanjang 285,00 km serta jalan kabupaten sepanjang 757,48 km. Dari total panjang jalan yang ada sekitar 54,49 persen masih tanah, sementara sisanya 25,86 persen sudah berupa aspal dan 19,65 persen berupa kerikil.

2) Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, namun pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap aspek sosial.

Infrastruktur yang berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan produksi pertanian, khususnya beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Pada tahun 2012, ketersediaan jaringan irigasi mengalami peningkatan pesat dalam jumlahnya. Peningkatan jumlah saluran irigasi pada tahun ini diindikasikan mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2012.



Adapun gambaran mengenai rasio jaringan irigasi sebagaimana tampak Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Luas Sawah (Ha)	Panjang Atau Luas Irigasi (Ha)		
		Teknis	Non teknis	Sederhana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	11,319	2,957	8,752	-
2011	17,112	2,495	13,622	995
2012	23,817,20	7,144	-	3,795
2013				
2014	-	-	-	-

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna untuk membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut.

Tabel 2.42
Sarana Peribadatan
Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2014

Sarana Peribadatan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Masjid/Musholla/Langgar	602	590*	713	-
Gereja Kristen Protestan	134	134	138	-
Gereja Kristen Katolik	51	51	53	-
Pura	16	16	16	-
Vihara	1	1	1	-
Jumlah	804	792	921	-

Sumber : - Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Bagian Sosial Sekretariat Kab. Kutai Timur Tahun 2013

Keterangan *) Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.42 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana peribadatan telah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah masjid dan gereja meningkat. Hal ini



menunjukkan bahwa seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur diikuti dengan adanya penambahan jumlah sarana peribadatan.

Berdasarkan perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan meskipun masih dibawah target tahunan RPJMD, namun optimis akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 dapat tercapai.

4) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini juga menuntut kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi penduduknya tersebut.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perlu juga didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2011-2013 masing-masing berturut-turut sebesar 28,69, 27,71, 27,71 telah sesuai dengan standar.

5) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2011 tercapai 0,079, kemudian tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 0,10. Meskipun tiap tahun terjadi peningkatan capaian namun masih belum mencapai atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencapai target tahunan dan target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 sebesar minimal 0,15 masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya.



6) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2012 capaian pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 40,50 persen telah melampaui target RPJMD dan bahkan telah melewati target akhir tahun 2015 sebesar 38,94 persen.

7) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Capaian sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar selama kurun waktu empat tahun terakhir 2010-2013 tidak mengalami perubahan sebesar 0,16 persen, sementara target yang ditetapkan tiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kerja keras untuk menurunkan persentasenya hingga tercapai pada akhir pelaksanaan tahun 2015.

D. Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan Rakyat salah satunya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Indikator Urusan Perumahan
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	62,50	-	67,50	-	
Pembangunan rumah layak huni (unit)	84	500	750	114	
Rasio pemukiman layak huni	52,80	60	70	85	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air bersih, sarana pembuangan kotoran kakus/jamban, sarana pembuangan limbah cair, limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah tangga berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2)



pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); 4) pembuangan sampah.

Capaian persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan capaian yang cukup baik yakni pada tahun 2012 sebesar 90 persen jauh di atas target sebesar 67,5 persen. Pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diprediksi akan tercapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75 persen.

2) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan upaya tersebut dan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan perumahan ditujukan pula untuk mewujudkan perumahan permukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011- 2013 terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 84 unit, kemudian naik menjadi 500 unit tahun 2011 dan 750 unit pada tahun 2012. Program pembangunan rumah layak huni tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta juga mendorong pihak swasta untuk mensukseskan program tersebut, dimana salah satu program tersebut diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

3) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukaan.

Tabel 2.44
Jumlah permukiman layak huni
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas permukiman layak huni (ha)	735,31	-	-	-	-
2	Luas wilayah permukiman (ha)	770,31	-	-	-	-
3	Rasio permukiman layak huni	95,45	60	70	85	-

Sumber: Dinas PU Kabupaten Kutai Timur



Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Kutai Timur selama tiga tahun terakhir (2011-2013) terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target RPJMD.

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan agar muncul kepedulian sosial untuk partisipasi dari warga mampu terhadap yang kurang mampu.

E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 2.45
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Luas wilayah (Ha)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



2) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tabel 2.46
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.565	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Jumlah Bangunan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timur yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kutai Timur.

F. Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perencanaan Pembangunan, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2009-2013.

Tabel 2.47
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen Rencana Strategis SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio ijin trayek	0,08	n.a	n.a	n.a	
Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	193	n.a	n.a	n.a	
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	n.a	n.a	25-46 menit	25-46 menit	
Pemasangan rambu-rambu	Sesuai standar	n.a	n.a	n.a	

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki ijin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Perkembangan capaian rasio ijin trayek di Kabupaten Kutai Timur sementara belum dapat dianalisis karena belum tersedianya data.

2) Jumlah uji kir angkutan umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutai Timur baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut adalah kondisi mengenai jumlah kendaraan wajib uji dan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2010-2014.



Tabel 2.49
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012-2014

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mobil penumpang umum	52	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mobil bus	156	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mobil barang	3.488	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.696	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2013

Mengingat belum adanya data yang tersedia persentase jumlah KIR dengan kendaraan yang wajib uji maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk mengontrol sarana mobilitas dalam rangka memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan bagi penumpang.

3) Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Tabel 2.50
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pelabuhan laut	2	2	2		
2	Jumlah pelabuhan udara	11	13	13		
3	Jumlah terminal	-	10	12		
	Jumlah	13	25	27		

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun.

4) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Berdasarkan perkembangan capaian lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target RPJMD. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD per tahunan bahwa lama pengujian kelayakan angkutan umum maksimal selama 1 (satu) hari, namun dalam realisasinya lebih cepat dari target tersebut yaitu rata-rata selama 25 sampai 46 menit. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan umum yang baik bagi masyarakat.



5) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Berikut adalah kondisi pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2009–2013.

Tabel 2.51
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	-	-	-	-	-
2	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang Seharusnya tersedia	-	-	-	-	-
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

H. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penanganan sampah (%)	55	n.a	45	n.a	
Persentase penduduk berakses air minum (%)	n.a	n.a	13,87	n.a	
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	70	n.a	40	67	
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a	

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Persentase penanganan sampah

Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap produksi sampah.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan



bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454-2000).

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya (Anonim, 1986). Sampah padat adalah semua barang sisa yang dicimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tak dikehendaki atau sia-sia (Tchobanoglous, Theisen dan Vigil 1993).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Bertambahnya jumlah penduduk, berimplikasi kepada meningkatnya permasalahan sampah di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang optimal serta antisipasi adanya peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi.

Berdasarkan perkembangan capaian persentase penanganan sampah dari tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan masih jauh dari target pencapaian yang ditetapkan, oleh karena itu perlu upaya kerja keras untuk mencapai target yang pada akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait diantaranya adalah perlunya penambahan personal mulai pengumpul, pengangkut sampah serta cukupnya rasio TPS, agar pelayanan bisa maksimal. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah pembangunan TPA beserta pengelolaannya yang diatur melalui Peraturan Daerah, penambahan alat kebersihan, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan seperti pembangunan TPS, penambahan truk pengangkut sampah dan penambahan alat berat TPA. Selain itu, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.



2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Berdasarkan capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2012 sebesar 13,87 persen menunjukkan masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2012, tentu hal ini akan semakin memperberat capaian pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 sebesar 80 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi membawa dampak meningkatnya perkembangan permukiman di Kabupaten Kutai Timur yang tentu berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan air bersih. Beberapa permasalahan pelayanan air bersih yang belum maksimal disinyalir diantaranya disebabkan oleh terbatasnya sumber air baku, tersebarnya kawasan permukiman, kawasan permukiman yang berada di tempat tinggi dan jauh dari jaringan, angka kehilangan air yang cukup tinggi mencapai kurang lebih 30 persen, sistem produksi yang kurang maksimal, biaya listrik tinggi, serta tariff yang masih rendah.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal selama tiga tahun terakhir (2011-2013) meskipun telah mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun belum mencapai target tahunan RPJMD. Oleh karena itu perlu ada upaya yang keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan guna lebih meningkatkan capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal yang diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 dapat tercapai.

4) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Capaian rasio TPS per satuan penduduk belum dapat dianalisis karena belum



tersedia data. Indikator tersebut sangat penting untuk diketahui agar sejauh mana selama ini kemampuan TPS dalam menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur Khususnya.

I. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase lahan bersertifikat. Kondisi administrasi pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 2.53
Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas wilayah daratan	-	-	-	-	-
2	Luas tanah bersertifikat HGB	-	-	-	-	-
3	Luas tanah bersertifikat HGU	-	-	-	-	-
4	Luas tanah bersertifikat HM	-	-	-	-	-
5	Luas tanah bersertifikat HPL	-	-	-	-	-
6	Total luas tanah bersertifikat	-	-	-	-	-
7	Prosentase HGB dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
8	Prosentase HGU dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
9	Prosentase HM dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
10	Prosentase HGPL dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
11	Prosentase total luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PLTR dan BPN

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	13	n.a	71,90	n.a	
Rasio bayi berakte kelahiran	n.a	n.a	46,13	n.a	
Kepemilikan KTP	13	93	61,30	n.a	
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	65	n.a	61,30	n.a	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



1) Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP adalah merupakan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun. Capaian rasio penduduk ber KTP pada tahun 2012 menunjukkan sebesar 71,90. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari 100 penduduk Kabupaten Kutai Timur terdapat 71,90 yang ber KTP sedangkan sisanya 28,10 belum ber KTP. Jika dibandingkan dengan target RPJMD ditetapkan tiap tahun minimal 90 maka capaian tahun 2012 masih berada dibawah target. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan rasio penduduk yang ber KTP perlu adanya program sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang arti pentingnya ber KTP.

2) Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah keseluruhan bayi yang lahir. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2012 masih tercapai 46,13 dari 100 yang ditargetkan. Melihat perbandingan capaian dengan target tahunan dan akhir RPJMD yang masih jauh, diperkirakan akan sulit tercapai pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015.

3) Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah) dikalikan 100 persen. Capaian indikator kepemilikan KTP masih fluktuatif, dimana pada tahun 2011 tercapai 93 persen yang melampaui target RPJMD sebesar 90 persen, namun tahun 2012 menurun menjadi 61,30 persen jauh di bawah target sebesar 90 persen. Oleh karena itu perlu kerja keras untuk melaksanakan program sosialisasi kepemilikan KTP guna mencapai target RPJMD tahun 2015 sebesar 90 persen.

4) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum menunjukkan capaian yang positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 61,30 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 75 persen. Sedangkan pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 ditargetkan sebesar 90 persen. Oleh karenanya diperlukan kerja keras bagi SKPD terkait untuk mencapai target tersebut dengan menerapkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.



K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	7,15	24,70	32,25	45,83	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	92,85	90	90	90	
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	35-50	35-50	35-50	35-50	
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif, dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir (2011-2013) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 tercapai 24,7 persen, kemudian tahun 2012 sebesar 32,25 persen, selanjutnya tahun 2013 sebesar 45,83 persen. Sementara target tahunan RPJMD hanya sebesar 10 persen. Sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 akan tercapai.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2011 dan 2013 telah memenuhi target RPJMD sebesar 90 persen, dan bahkan pada tahun 2012 mencapai 98 persen. Sehingga diperkirakan target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 akan tercapai.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah mencapai target RPJMD tahunan sebesar 35-50 persen. Sehingga diperkirakan akan tercapai target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015.



4) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercatat selama tahun 2011 hingga tahun 2013 tercapai 100 persen sesuai dengan target RPJMD.

L. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,3	2,8	2,8	2,8	
Resio akseptor KB	82,88	65	68	71	
Cakupan peserta KB aktif (%)	82,88	63,71	63,91	65,39	

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, perkembangan jumlah anak dan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2010-2012 dapat dijelaskan sebagaimana tampak pada Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah anak	22.501	-	-		
2	Jumlah keluarga	77.031	-	-		
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,0	3,4	2,8		

Sumber:
- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Data diolah





2) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 [satu] tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur sebesar 26.712. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3-4 anak. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 sebanyak 25.622 orang peserta dari total 42.365 PUS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Jumlah PUS	42.365	43.013	44.594		
2	Jumlah Akseptor KB	25.622	26.635	28.501		
3	Rasio Akseptor KB	0,60	0,62	0,64		

Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2013

Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi. Terlihat pada tabel 3.61 menunjukkan adanya trend meningkat penggunaan kontrasepsi (sebagai akseptor) dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya relatif lambat. (0,02 per tahun).

Berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya peningkatan akseptor KB, Sebagaimana tampak pada Tabel 3.61 pada tahun 2010 jumlah akseptor KB sebesar 25.622, selanjutnya naik pada tahun 2011 sebesar 26.635, kemudian pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.501.

3) Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.



Capaian cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2012 sebesar 63,91 persen masih jauh dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 84,55 persen. Oleh karena itu, diperlukan upaya kerja keras untuk mencapai target akhir pelaksanaan pada tahun 2015 sebesar 87,11 persen.

M. Sosial

Masalah sosial adalah perilaku atau keadaan kompleks yang akibatnya berpengaruh kesejahteraan orang banyak (umum) serta dapat mengganggu kestabilan masyarakat, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 2.59
Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	25,25	70,14	69,12	91,11	
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	56,83	89,94	91,43	89,12	

Sumber:
- Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

N. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.60
Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010-2014

No	Variabel	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah pengangguran (Jiwa)	6.348	7.045	5.096	7.736	
2.	Angka setengah menganggur (Jiwa)	27.354	27.354	32.500	37.646*	
3.	Angkatan Kerja (AK)	122.551	128.874	130.685	130.985	
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,79	70,45	80,20	65,23	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,18	4,95	3,90	5,91	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



1) Jumlah Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dimana 95 persen angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan capaian tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah angka pengangguran pada tahun 2011 sebesar 7.045 jiwa kemudian tahun 2012 menurun menjadi sebesar 5.096 jiwa, selanjutnya tahun 2013 naik menjadi 7.736 jiwa.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktivitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam



angkatan kerja.

Berdasarkan capaian TPAK selama kurun waktu 2010-2012 menunjukkan capaian yang sangat bagus (*on track*). Bahkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan capaian yang jauh melampaui target RPJMD. Meningkatnya persentase TPAK pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur semakin tinggi (meningkat).

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan serta capaian terhadap RPJMD *on track* pada tahun 2012 bahkan telah menembus capaian tahun 2014, sekalipun pada tahun 2011 sedikit di atas target. Sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan optimis akan memenuhi target.

4) Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Cara menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan



demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Tabel 2.61
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	122.551	128.874	130.685	130.985	
Laki-laki	83.752	93.111	-		
Perempuan	36.846	35.763	-		
Bukan Angkatan Kerja	55.057	54.048	-		
Laki-laki	13.777	6.958	-		
Perempuan	41.280	47.090	-		

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 (Sakernas)

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Simreda Tahun 2012) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sebesar 105.902 kemudian naik menjadi 116.742 pada tahun 2011. Berdasarkan kenaikan tersebut, maka rasio penduduk yang bekerja juga makin meningkat dimana pada tahun 2011 telah mencapai 90,58 melampaui target RPJMD sebesar 66,07.

O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin



banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurun jumlah kemiskinan dan menurun jumlah pengangguran. Untuk mengetahui jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.62 dibawah. Persentase koperasi aktif menunjukan kecenderungan relatif tetap dari tahun ke tahun berkisar rata-rata sekitar 64 persen, dengan demikian perlu dilakukan pembinaan manajemen perkoperasian sehingga mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT menunjukan keaktifan riil dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi.

Tabel 2.62
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah koperasi aktif	580	508	574	n.a	n.a
2	Jumlah koperasi	804	895	950	n.a	n.a
3	Persentase koperasi aktif (%)	72,14	56,76	60,42	n.a	n.a

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

2) Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Untuk mengetahui jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-20120 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah seluruh UKM	3057	3.450	5.080	n.a	
2	Jumlah BPR/LKM	9	46	46	n.a	
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	0	0	0	n.a	

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



3) Jumlah BPR/LKM

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, memudahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil dapat mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Untuk mengetahui jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.64
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jumlah BPR	1	1	1	n.a	
2	Jumlah LKM	8	45	45	n.a	
3	Jumlah BPR dan LKM	9	46	46	n.a	

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

P. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Namun hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Tabel 2.65
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Jumlah Investor				
		2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	PMDN	7	6	-	-	-
2.	PMA	13	6	-	-	-
3	Total	20	12	15	21	4

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dapat mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.66
Jumlah Investasi PMDN/PMA Yang Disetujui
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Tahun	PMDN	PMA
	Nilai Investasi [Triliun Rp]	Nilai Investasi (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)
2010	-	-
2011	1.3275	123
2012	1,8	69,3
2013	5,087	57
2014		

Sumber:

- Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat dari sejumlah indikator: *Pertama*, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni budaya. *Kedua*, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang



dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan menginventarisir warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.

Tabel 2.67
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	6	6	3	
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	4	4	4	
3	Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (100)	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Q. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperdayaannya. Sedangkan banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda dan organisasi olahraga menggambarkan tingkat partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui gambaran umum organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Jumlah Organisasi dan Kegiatan
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah organisasi pemuda	10	38	38	38	
2	Jumlah organisasi olahraga	10	43	43	43	
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Sesuai kondisi eksisting	4	4	5	
4	Jumlah kegiatan olahraga	Sesuai kondisi eksisting	10	9	16	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dari sisi tugas dan rasio jumlahnya dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 2.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah polisi pamong praja	116	-	-	-	-
2	Jumlah penduduk	367.247	430.865	527.723	554.751	-
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-

Sumber: Satuan Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

2) Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Gambaran umum keberadaan Satuan Linmas di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Linmas	1.877	-	-	-	-
2	Jumlah Penduduk	367.247	430.865	527.723	554.751	-
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	140	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013. Inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya perlu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengimplementasikan *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.71
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012

2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penerima pelayanan. Indeks Kepuasan



Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2). kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, (10) kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini mengingat masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan dapat sebagai tolok ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakannya, dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan.

T. Ketahanan Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013.



Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	44.129	38.357	36.072	43.170	
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	367.247	430.865	527.723	554.751	
3	Jumlah Konsumsi Pangan Utama (ton)	31.614,52	34.975,28	-	-	
4	Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama Terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	28,36	8,82	-	-	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.73
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√
2	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

U. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.



Tabel 2.74
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)	n.a	12	13	13	
2	PKK Aktif (buah)	n.a	135	135	135	
3	Posyandu Aktif (buah)	105	108	185	195	

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

V. Statistik

Ketersediaan dokumen statistik merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.75
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√		√		√		√		√	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	√		√		√		√		√	
3	Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)										
4	KBDA										
5	Indeks Gini Rasio		√		√		√		√		√
6	Input Output	√		√		√		√		√	
7	Indeks Kemiskinan										

RKPD Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur





No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat (IKM)										
8	Indeks Harga Konsumen (IHK)										

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

W. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis penyelenggaraan pemerintahan.

Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang professional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangan penting.

X. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur berperan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jaringan komunikasi yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jaringan telepon genggam	6	6	6	-	-
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	-	-
3	Total jaringan Komunikasi {1+2}	7	7	7	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur



2) Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional

Tabel 2.77
Jumlah Surat Kabar, Radio dan Televisi Nasional/Lokal
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	71	1	1	-	-
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	3	3	3	-	-
3	Total jenis surat kabar (1+2)	4	4	4	-	-
4	Jumlah penyiaran radio lokal	N/A	N/A	8	-	-
5	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	-	-
6	Jumlah penyiaran Televisi lokal	N/A	N/A	1	-	-
7	Jumlah penyiaran Televisi nasional	11	11	11	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Media informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam penyebaran berbagai informasi termasuk informasi pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagai media informasi yang ada.

Y. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2 78
Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	-	-	-	-	-
3	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
4	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Total Perpustakaan (1+3)	-	-	-	-	-
6	Total pengunjung Perpustakaan (2+4)					

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur (konfirmasi data)

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunaanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca masyarakat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah terdiri dari:

A. Pertanian

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur.

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi dua (2) bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan



buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tabel 2.79
Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No.	Luas Lahan	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi Sawah	Ha	3.963	4.819	5.056	5.424	
2	Padi Ladang	Ha	5.352	5.650	5.887	5.047	
3	Jagung	Ha	768	538	338	307	
4	Ubi Kayu	Ha	310	299	360	141	
5	Ubi Jalar	Ha	186	191	236	76	
6	Kacang Tanah	Ha	258	200	194	159	
7	Kedele	Ha	374	257	79	73	
8	Kacang Hijau	Ha	108	67	39	13	
9	Sayuran	Ha	2.090	1.763	1.537	1.352	
10	Buah-buahan	Ha	4.757	3.409	2.916	5.841	

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2011-2013 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan, terutama komoditas padi sebagai pangan utama. Seiring dengan perluasan lahan baik padi sawah maupun padi ladang dari tahun 2010 hingga 2012, maka diikuti dengan peningkatan produksi padi. Pada tahun 2010 luasan padi sawah sebesar 3.963 ha dan padi ladang sebesar 5.352 ha kemudian menjadi bertambah luas pada tahun 2012 yakni padi sawah seluas 5.056 ha dan padi ladang 5.887 ha.

Peningkatan dan penurunan luasan lahan tanaman tersebut berimplikasi terhadap hasil produksi tanaman pangan. Pada periode tahun 2010 hingga 2013 telah mengalami peningkatan produksi padi sawah sebesar 4.759 ton dan produksi padi ladang meningkat sebesar 1.762 ha. Sedangkan tanaman palawija yang mengalami penurunan perluasan juga mengalami penurunan produksi sebesar 1.773 ton selama kurun waktu 2010-2013 dengan rincian tanaman jagung menurun sebanyak 1.035 ton, ubi kayu menurun sebanyak 315 ton, kacang tanah menurun sebanyak 36 ton, kedelai menurun sebanyak 353 ton, serta kacang hijau menurun sebanyak 70 ton.



Tabel 2.80
Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi sawah	Ton	16.323	19.854	21.082	24.476	
2	Padi ladang	Ton	13.026	13.768	14.788	12.719	
3	Jagung	Ton	1.599	1.117	564	649	
4	Ubi kayu	Ton	4.323	4.174	4.008	1.988	
5	Ubi jalar	Ton	1.685	1.731	1.721	692	
6	Kacang tanah	Ton	263	202	227	159	
7	Kedele	Ton	434	299	81	86	
8	Kacang hijau	Ton	111	68	41	14	
9	Sayuran	Ton	1.606	5.064	3.188	3.386	
10	Buah-buahan	Ton	8.171	25.148	7.818	25.353	

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun 2010-2012, hanya padi yang terdapat kenaikan cukup menggembirakan baik luas tanam maupun produksinya, namun demikian produktivitasnya masih jauh dari target RPJMD yang ditetapkan. Sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2015 target produktivitas padi sebesar 60 kw/ha akan sulit tercapai.

Sedangkan untuk tanaman pangan lainnya, dimana umbi-umbian relative tetap; buah dan sayuran masih fluktuatif dan bahkan palawija justru terdapat kecenderungan penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, perlu komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan produktivitas tanaman padi dari capaian yang stabil selama ini, sembari memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penurunan luasan dan produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang dialihfungsikan serta melakukan upaya-upaya terobosan dan inovatif untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija dalam mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan pada akhir tahun 2015.

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-lain. Upaya peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya dengan intensifikasi pertanian. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.



2) Produksi padi (ton)

Berdasarkan hasil capaian produksi padi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 33.621 ton kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 35.870 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan peningkatan luas lahan sawah.

Namun demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD maka, naik pada tahun 2011 maupun tahun 2012 masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga jika tidak dilakukan terobosan program yang baik untuk meningkatkan produksi padi, maka pada akhir tahun 2015 akan sulit terealisasi.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produktivitas padi diantaranya adalah:

- a) Luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan tingkat teknologi yang sama, semakin luas lahan yang dapat ditanami padi, maka diduga akan semakin besar total produksinya.
- b) Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena semakin tinggi jumlah tenaga kerja hingga pada jumlah tertentu, produktivitas tenaga kerja mencapai optimal.
- c) Benih unggul berpengaruh positif terhadap produksi padi, dikarenakan benih yang bermutu mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi jika dibanding dengan benih yang bermutu rendah.
- d) Pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena sampai batas tertentu, dengan pemupukan akan meningkatkan produktivitas per satuan luas lahan.
- e) Irigasi berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan pengairan yang baik produktivitas padi per satuan luas lahan semakin meningkat.

3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur. Namun kontribusinya cenderung terus menurun seiring dengan meningkatnya peran sektor pertambangan dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu dari 4,37 persen pada



tahun 2008 menjadi 3,25 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 berdasarkan angka sementara BPS Kabupaten Kutai Timur peranannya terus menurun yaitu hanya sebesar 3,10 persen. Namun demikian sektor pertanian diyakini dapat menyumbang terhadap pertumbuhan dan dapat membentuk struktur ekonomi seimbang dimasa mendatang (Rusastra, dkk 2004) apabila prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tetap berorientasi kepada pembangunan pertanian dalam arti luas. Potensi tersebut terlihat berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2008-2012, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi antara 29,17 persen - 29,38 persen, dimana subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian dengan *share* antara 8,41 persen - 10,58 persen pada tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 2.81
Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Dengan MIGAS Tahun 2008 - 2012

Sub Sektor	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN	4,37	4,37	3,77	3,25	3,10
a. Tanaman Bahan Makanan	0,89	0,84	0,73	0,61	0,54
b. Perkebunan	1,25	1,38	1,23	1,16	1,22
c. Peternakan	0,38	0,38	0,32	0,26	0,24
d. Kehutanan	1,27	1,15	0,92	0,71	0,60
e. Perikanan	0,58	0,62	0,57	0,51	0,49

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Publikasi PDRB)

Keterangan: *) Angka sangat sementara

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan dalam RPJMD 2011-2015 selalu meningkat tiap tahunnya. Namun realisasinya justru sebaliknya, terjadi penurunan terlihat pada Tabel 3.86 dan Tabel 3.87. Persentase sektor pertanian terhadap PDRB dengan Migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012 berturut-turut sebesar 4,37 persen, 4,37 persen, 3,77 persen, 3,25 persen dan 3,10 persen. Demikian pula, persentase sektor pertanian terhadap PDRB tanpa Migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012 berturut-turut sebesar 29,38 persen, 29,17 persen, 27,50 persen, 25,63 persen dan berdasarkan penghitungan sementara BPS Kabupaten Kutai Timur terjadi peningkatan pada tahun 2012 yakni sebesar 26,86 persen.



Tabel 2.82
Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Tanpa MIGAS Tahun 2008 - 2012

LAPANGAN USAHA	Tahun (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN	29,38	29,17	27,50	25,63	26,86
a. Tanaman Bahan Makanan	5,99	5,62	5,33	4,77	4,72
b. Tanaman Perkebunan	8,41	9,22	8,94	9,20	10,58
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,56	2,50	2,33	2,08	2,05
d. Kehutanan	8,51	7,65	6,73	5,58	5,23
e. Perikanan	3,90	4,17	4,18	4,00	4,27

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Publikasi PDRB)

Keterangan: *) Angka sangat sementara

Pada Tabel 3.82 kontribusi PDRB sektor pertanian berdasarkan lapangan usaha terjadi naik turun dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah Tanaman Bahan Makanan dari 5,99 persen menjadi 4,72 persen, Peternakan dan hasil-hasilnya dari 2,56 persen menjadi 2,05 persen serta kehutanan dari 8,51 persen menjadi 5,23 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah Tanaman Perkebunan dari 8,41 persen menjadi 10,58 persen dan Perikanan dari 3,90 persen menjadi 4,27 persen.

Penurunan persentase kontribusi PDRB dengan migas tersebut bukan dikarenakan turunnya produktivitas dari sektor pertanian akan tetapi karena adanya kenaikan atau pertumbuhan pada sektor lainnya, khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian persentase kontribusi PDRB tanpa migas sektor pertanian juga mengalami penurunan persentasenya tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan di sektor perdagangan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan di sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), sedangkan di semua sektor lainnya telah mengalami penurunan persentase kontribusi terhadap PDRB.

4) Kontribusi sektor pertanian [palawija] terhadap PDRB

Tabel 3.82 merinci kontribusi sektor pertanian ke dalam sub-sektor yang lebih kecil yakni kontribusi pertanian palawija. Namun demikian, tidak diketahui berapa rincian kontribusi dari sub-sektor palawija dari tahun 2008-2012. Dari informasi tersebut tidak diketahui berapa persentase kontribusi palawija terhadap ekonomi pada tahun 2011. Namun demikian, dari informasi yang lain



didapatkan bahwa pada tahun 2012, kontribusi sub-sektor palawija adalah sebesar 0,54 persen; yang mana terjadi penurunan dari tahun 2010 yang kontribusinya mencapai 0,73 persen. Adapun RPJMD menargetkan kontribusi sub-sektor palawija adalah sebesar 1,43 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

5) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Pada tahun 2012, sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2011-2012. Namun jika dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan pada beberapa komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan minat petani dan peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang menjadi favorit dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2011-2013 bertambah seluas 26.659,89 Ha atau meningkat 9,15 persen dengan peningkatan produksi 608.183,68 ton atau meningkat 32,07 persen. Peningkatan produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet dan kelapa sawit yang masing-masing meningkat 263,66 ton atau 94,17 persen dan 608.930,29 ton atau 32,23 persen. Kedua komoditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan pada Tahun 2012, yaitu: 7,98 persen untuk karet dan 85,12 persen untuk kelapa sawit.



Tabel 2.83
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	
Luas Lahan perkebunan (Ha):							
1	Karet	5.511,71	6.928,00	8.468,30	8.779,85		
2	Kelapa	2.150,18	1.659,07	1.275,85	1.190,62		
3	Kopi Robusta	288,85	236,45	218,97	218,54		
4	Lada	233,55	264,50	352,88	347,88		
5	Vanili	44,60	40,78	35,43	35,43		
6	Kakao	6.965,83	6.404,40	5.253,10	4.818,40		
7	Kelapa Sawit	224.368,51	275.454,06	302.307,53	360.210,19		
8	Aren	247,85	249,95	257,30	270,80		
9	Kemiri	111,78	76,93	61,67	62,67		
Jumlah		239.922,86	291.314,14	317.974,03	375.934,38		
Produksi perkebunan (Ton):							
1	Karet	267,67	279,98	543,64	347,86		
2	Kelapa	847,40	1.000,91	583,90	344,03		
3	Kopi Robusta	194,09	81,16	42,56	37,81		
4	Lada	56,03	107,00	77,27	52,34		
5	Vanili	0,88	10,40	5,21	5,82		
6	Kakao	3.766,07	3.156,87	2.510,91	2.419,89		
7	Kelapa Sawit	1.096.648,48	1.889.599,19	2.519.717,36	3.314.956,01		
8	Aren	2.092,16	2.262,93	2.391,45	1.478,28		
9	Kemiri	8,39	6,75	4,45	3,99		
Jumlah		1.103.880,95	1.896.505,19	2.525.876,75	3.319.646,02		
Produktivitas (Kg/Ha)							
Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:							
1	Karet	1.063,49	712,76	1.174,98	715,50		
2	Kelapa	500,00	910,56	577,31	369,14		
3	Kopi Robusta	935,82	478,29	274,48	247,44		
4	Lada	304,90	597,07	491,16	333,24		
5	Vanili	100,57	388,69	208,32	232,60		
6	Kakao	854,10	774,31	759,16	831,92		
7	Kelapa Sawit	19.409,36	20.179,04	20.293,56	20.171,98		
8	Aren	14.000,03	13.323,10	13.956,52	8.660,09		
9	Kemiri	194,12	181,98	130,75	117,42		
Jumlah		37.362,39	37.545,80	37.866,24	31.679,33		

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, telah pula diikuti dengan berkembangnya industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2012, telah terbangun 19 unit pabrik CPO di Kabupaten Kutai Timur dengan total kapasitas produksi terpasang 910 ton/jam dan kapasitas terpakai 880 ton/jam.

B. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan lindung luasnya 13,31 persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 9,98 persen, Hutan Produksi Terbatas 39,52 persen dan hutan produksi tetap sekitar 38,19 persen.

Kawasan hutan yang dimiliki, maka hasil hutan utama berupa kayu bulat di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari kurang lebih 12 jenis kayu dari 16 jenis kayu yang umumnya ada pada hutan Kalimantan Timur seperti: meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu indah, rengas, resak dan lainnya. Di daerah ini jenis kayu yang paling banyak dieksploitasi adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai.

Tabel 2.84
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Lindung	317,200	317,200	317,200	270,489	
2	Hutan Suaka Alam dan Wisata	184,764	184,764	184,764	215,742	
3	Hutan Produksi Terbatas	839,200	839,200	839,200	787,652	
4	Hutan Produksi Tetap	956,500	956,500	956,500	920,599	
5	Hutan Tetap	1.980,464	1.980,464	1.980,464	2.205,534	
6	Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi	1.043,716	1.043,716	1.043,716	1.043,716	



No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Luas Hutan	2.188.344	2.188.344	2.188.344	2.188.344	2.188.344
8	Luas Wilayah	3.574.760	3.574.760	3.574.760	3.574.760	3.574.760

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Perkembangan luasan hutan di Kabupaten Kutai Timur cenderung tetap, kecuali pada tahun 2010 terjadi peningkatan dan penurunan komposisi luasan hutan. Luasan hutan yang mengalami peningkatan adalah hutan lindung bertambah sebesar 17,17 persen, hutan produksi tetap sebesar 13,94 persen dan hutan tetap sebesar 19,20 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah hutan suaka alam dan wisata sebesar 15,78 persen serta hutan produksi terbatas turun sebesar 3,40 persen.

C. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral salah satunya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang punya peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak bumi dan batubara. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 525,43 barrel, menurun tajam dibanding tahun sebelumnya. Hal yang berbeda terjadi pada perkembangan produksi batubara, yang mencapai produksi 74,22 juta ton pada tahun 2013 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebesar 64,36 juta ton. Hasil produksi tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan penyangga terbesar ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu juga hasil tambang batubara Kutai Timur digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Tabel 2.85
Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Produksi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Minyak Bumi (barrel)	738.498	517,90	682,88	525,43	
2	Batubara (Mton)	38.801.221	67.082.231	64.357.763,17	74.218.224,29	

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014





Perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai 88,96 persen pada tahun 2012. Bila dirinci kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B (pertambangan non minyak dan gas bumi) berkontribusi paling tinggi yakni berkisar sebesar 86,73 persen, kemudian diikuti subsektor Galian A (pertambangan minyak dan gas bumi) sebesar 1,71 persen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53 persen. Namun besarnya kontribusi terhadap PDRB tersebut harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan cadangan sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.

D. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.93 dapat dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2012 terus-menerus mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2013. Kunjungan pada tahun 2013, sebagian besar tertuju pada wisata ke pantai sebanyak 24.903 orang atau sekitar 74,72 persen. Sedangkan kunjungan menuju pegunungan sebanyak 2.309 orang atau sekitar 6,93 persen. Adapun kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi yakni sebanyak 6.116 orang atau berkisar 18,35 persen dari total kunjungan wisata yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.



Tabel 2.86
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No.	Janis Obyek Wisata	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pantai	9.185	10.150	19.062	45.594	24.903
2	Pegunungan	4.518	4.732	4.780	4.880	2.309
3	Hutan	2.061	2.369	2.555	14.525	6.116
	Jumlah Pengunjung	15.754	17.251	26.137	64.999	33.172

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

E. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu (*backward linkage*) maupun hilir (*foreward linkage*), dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun pada perkembangannya selama kurun waktu 4 tahun yaitu 2010 hingga 2013 justru mengalami penurunan baik dari jumlah rumah tangga perikanan maupun dari sisi jumlah produksi perikanan dan nilai produksi perikanan.

Tabel 2.87
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
Rumah Tangga Perikanan:						
1	Perikanan Laut	RT	8.606	4.315	4.186	4.207
2	Perikanan Perairan Umum	RT	2.726	1.268	116	1.172
3	Tambak	RT	479	437	440	414
4	Kolam	RT	234	181	255	246
5	Keramba	RT	328	336	339	300
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	154	163	168	170
	Jumlah	RT	12.537	6.700	6.548	6.509
Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ton	9.974,70	5.658,9	5.584,3	5.211,0
2	Perikanan Perairan Umum	Ton	2.639,10	1.155,1	1.146,3	1.028,1
3	Tambak	Ton	690,60	748,6	834,8	684,1



No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
4	Kolam	Ton	502,10	574,5	588,6	573,1
5	Keramba	Ton	272,50	358,6	403,1	348,5
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	1.570,90	1612,7	1.748,5	1.604,4
	Jumlah	Ton	15.649,90	10.116,40	10.305,60	9.449,20
Nilai Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	182.763.460	133.365.100	131.579.350	132.895.144
2	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	60.329.200	31.434.200	31.226.300	31.382.432
3	Tambak	Ribu Rp	26.173.985	20.753.100	32.037.950	25.915.650
4	Kolam	Ribu Rp	12.553.030	14.568.559	17.428.140	17.058.240
5	Keramba	Ribu Rp	7.319.700	2.686.000	16.333.750	13.919.600
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	11.786.700	-	20.214.000	16.775.250
	Jumlah	Ribu Rp	300.926.075	202.806.959	248.819.490	237.946.316

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Jumlah produksi dan konsumsi ikan dari tahun 2010 hingga 2013 masih mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah produksi telah mencapai dari 15.649 ton pada tahun 2010 turun menjadi 9.449 ton pada tahun 2013. Hal tersebut terjadi diantaranya adanya pergeseran usaha perikanan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan jumlah rumah tangga perikanan disinyalir karena beralih mata pencaharian. Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya rumah tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil produksi yang menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun dalam pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah yang akan dihadapi. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktifitas pada umumnya masih rendah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh



sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan siri, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.88
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	675,99	600,29	600,24	n.a	n.a

Sumber:

Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja:

A. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Arus lalu lintas pengguna jalan



semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu signifikan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 179,03 persen. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.89
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan (km)	1.620,23				
2	Jumlah Kendaraan (unit)	60.976				
3	Pertumbuhan (%)	37,63				

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalui darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaan jalannya aspal yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

a) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang. Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Mobilitas orang maupun barang dengan angkutan barang di Kabupaten Kutai Timur tampak dalam Tabel 2.90. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah barang yang terangkut melalui



bandara selalu meningkat dari tahun 2008 hingga 2009. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada angkutan umum lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu, juga risiko dalam perjalanan dapat diminimalkan.

Tabel 2.90
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

B. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Luas Wilayah Produktif, Luas Wilayah Industri, Luas Wilayah Rawan Banjir, Luas Wilayah Kekeringan dan Luas Wilayah Perkotaan.

Tabel 2.91
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif,
Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi RTRW	-	-	-	-	-
2	Rencana Peruntukan RTRW	-	-	-	-	-
3	Rasio (1/2)	-	-	-	-	-
4	Luas Wilayah Produktif	-	-	-	-	-
5	Rasio (4/14)	-	-	-	-	-
6	Luas Wilayah Industri	-	-	-	-	-
7	Rasio (6/14)	-	-	-	-	-
8	Luas Wilayah Rawan Banjir	-	-	-	-	-
9	Rasio (8/14)	-	-	-	-	-
10	Luas Wilayah Kekeringan	-	-	-	-	-
11	Rasio (10/14)	-	-	-	-	-
12	Luas Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
13	Rasio (13/14)	-	-	-	-	-
14	Luas Seluruh Wil. Budidaya	-	-	-	-	-

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur



C. Fasilitas Bank dan Non Bank

Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait dengan fasilitas bank dan non bank. Hal ini mengingat bahwa aktivitas perekonomian yang semakin tinggi akan selalu membutuhkan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana pembayaran, perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.92
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bank Umum					
	Konvensional	-	6	7		
	Syariah	-	-	1		
2.	BPR					
	Konvensional	-	-	1		
	Syariah	-	-	-		

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

D. Ketersediaan Air Bersih

Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80 persen kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dari tahun 2000 hingga 2008 mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa transisi dimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru 5,95 persen rumah tangga yang mendapat saluran air bersih, dan terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 12,36 persen. Namun pada tahun 2007-2008 turun menjadi sekitar 12,07 persen dan 11,81 persen pelanggan yang mendapat layanan air bersih.

a) Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih untuk minum tidak hanya bersumber dari PDAM. Dari tabel yang ada sumber air minum rumah tangga banyak yang menggunakan air sungai. Pada tahun 2007 berturut-turut dari persentase terbanyak sumber air yang digunakan adalah 25,40 persen rumah tangga menggunakan air sumur tidak terlindung, 24,33 persen rumah tangga menggunakan air sungai, dan 16,01 persen menggunakan air ledeng (PDAM) untuk air minum



Tabel 2.93
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Leding (Perpipaan)	5,19	-	-	-	-
2	Sumur Lindung	13,15	-	-	-	-
3	Sumur Tidak Terlindung	15,65	-	-	-	-
4	Mata Air Terlindung	0,22	-	-	-	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	0,22	-	-	-	-
6	Sungai	12,85	-	-	-	-
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8	Air Hujan	6,85	-	-	-	-
9	Air Kemasan	39,54	-	-	-	-
10	Lainnya	-	-	-	-	-
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	-	-	-	-
12	Jumlah Rumah Tangga	77.031	-	-	-	-
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	-	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Bila dilihat jumlah pelanggan air bersih dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan itu adalah peningkatan volume air bersih yang digunakan. Tahun 2000 jumlah pelanggan mencapai 2.246 pelanggan dengan debit air baku utama 940.068 m³ dan meningkat pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 6.329 dengan debit air baku mencapai 3.650.000 m³. Persentase air yang digunakan terhadap air baku yang tersedia pada tahun 2000 sebesar 53,27 persen dan ditahun 2008 turun menjadi 37,03 persen. Dengan kata lain peningkatan pelanggan belum maksimal bila melihat masih rendahnya pemanfaatan air bersih yang tersedia.

E. Fasilitas Listrik dan Telepon

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Fasilitas Listrik dan Telepon salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73 persen rumah tangga yang mendapat aliran listrik PLN, dan turun ditahun 2002 menjadi 26,71 persen. Persentase pemenuhan listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 32,43 persen, namun turun kembali hingga sekitar 29,94 persen rumah tangga pelanggan listrik.



Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggan, penggunaan listrik masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tahun 2000 sekitar 93,59 persen pelanggan listrik adalah rumah tangga dari 10.460 jumlah pelanggan, dan ditahun 2008 turun menjadi 91,48 persen adalah rumah tangga dari 15.507 pelanggan dan selebihnya digunakan untuk usaha dan penerangan fasilitas umum.

Produksi listrik di Kutai Timur setiap tahun mengalami lonjakan pemakaian yang cukup tajam. Pada tahun 2000 produksinya mencapai 24.952 MWH dan meningkat tajam menjadi 72.808,06 MWH ditahun 2008 atau naik sekitar 65 persen. Dari produksi listrik yang ada terjual sebesar 24.717 MWH ditahun 2000 dan 66.625 MWH ditahun 2008. Atau jika diprosentasekan dari hasil yang diproduksi pada tahun 2000 terjual 99,06 persen dan turun ditahun 2008 menjadi 91,51 persen.

Masih rendahnya persentase kemampuan PLN dalam memenuhi fasilitas penerangan rumah tangga, maka untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga diperoleh dari berbagai sumber penerangan. Selama tahun 2000 hingga 2008 sekitar 22,52 persen menggunakan listrik non PLN dan selebihnya terutama untuk daerah pedesaan menggunakan non listrik seperti petromak, pelita dan sentir. Dari data yang ada ternyata pelanggan listrik PLN yang ada hanyalah pada kecamatan-kecamatan tertentu saja. Dari 18 kecamatan yang ada yang teraliri listrik PLN 61,11 persen (11 kecamatan).

Tabel 2.94
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kebutuhan						
	- Rumah tangga	MWH	55 658,38	-	-	-	-
	- Komersial	MWH	14 322,00	-	-	-	-
	- Publik	MWH	7 855,68	-	-	-	-
	- Industri	MWH	-	-	-	-	-
2.	Susut & Losses (T&D)	MWH	6 811,75	-	-	-	-
3.	Susut Pemakaian Sendiri	MWH	189,08	-	-	-	-
4.	Total Susut & Losses	MWH	-	-	-	-	-
5.	Faktor Beban	MWH	-	-	-	-	-
6.	Produksi	MWH	86 794,91	-	-	-	-
7.	Beban Puncak	MWH	-	-	-	-	-
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MWH	32 480,00	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



b) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Tabel 2.95
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RT dengan daya 450 watt	-	-	-	-	-
2.	RT dengan daya 900 watt	-	-	-	-	-
3.	RT dengan daya 1.300 watt	-	-	-	-	-
4.	RT dengan daya 2.200 watt	-	-	-	-	-
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	-	-	-	-	-
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	16.255	-	-	-	-
7.	Jumlah Rumah Tangga	77.031	-	-	-	-
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	21,10	-	-	-	-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Kalimantan Timur Dalam Angka 2012
- Data diolah

F. Ketersediaan Penginapan

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari luar untuk mengadu nasib. Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka memerlukan tempat tinggal sementara. Tempat singgah sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dari lokal maupun asing.

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari Tabel 2.96 berikut. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup cepat terutama dari tahun 2008 (79 buah) meningkat hingga tahun 2010 jumlah penginapan maupun hotel telah berubah menjadi 85 buah.



Tabel 2.96
Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Sarana/Prasarana	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penginapan/Hotel	85	-	-	-	-
2	Jumlah Kamar	1.290	-	-	-	-
3	Jumlah Tempat Tidur	1.950	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Ketersediaan kamar juga mengalami peningkatan cukup berarti terutama pada tahun 2006 sebanyak 814 kamar menjadi 1.177 kamar, bahkan melonjak menjadi 1.290 kamar pada tahun 2010. Perkembangan jumlah tempat tidur untuk memenuhi permintaan para pendatang juga mengalami lonjakan dari tahun 2006 [1.256 buah] melonjak menjadi 1.710 buah tempat tidur. Hingga tahun 2010 jumlah tempat tidur telah berjumlah 1.950 buah. Bila melihat perkembangan pendatang/imigran yang terus-menerus meningkat, maka sangat dimungkinkan kebutuhan akan jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur masih terus meningkat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Iklim Investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Angka Kriminalitas

Berdasarkan tampilan data pada Tabel 2.97 berikut dapat dilihat uraian tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Dari tahun ke tahun angka kriminal yang terjadi mengalami penurunan yang signifikan. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 angka tindak pencurian terjadi kenaikan kejadian perkara menjadi 93 kasus dari sebelumnya di tahun 2008 sebanyak 85 kasus.



Tabel 2.97
Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah kasus Narkoba	18	22	-	-	-
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	2	-	-	-
3	Jumlah Kejahatan Seksual	8	5	-	-	-
4	Jumlah kasus Penganiayaan	34	27	-	-	-
5	Jumlah kasus Pencurian	75	93	-	-	-
6	Jumlah kasus Penipuan	7	7	-	-	-
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	1	-	-	-
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 thn	225	220	-	-	-
9	Jumlah Penduduk	245.815	262.972	-	-	-
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,001	0,001	-	-	-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2014

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.



Tabel 2.98
Lama Proses Perijinan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

No	Uraian	Lama mengurus (hari)
(1)	(2)	(3)
1	SIUP	3 sd 7 hari kerja
2	TDP	3 sd 7 hari kerja
3	SIUJK	5 hari kerja
4	IMB	14 hari kerja
5	HO	10 hari kerja

Sumber: Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur

3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penentu pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajak maupun retribusi sebagai sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan (SKPD/lembaga) dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Berdasarkan Tabel 2.99 berikut tampak bahwa selama periode 2008-2012 jumlah obyek pajak tidak mengalami peningkatan. Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut terus mengalami peningkatan yakni dari tahun 2008 sebanyak 18 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2010. Dari angka 18 tersebut terdapat 4 jenis retribusi yang dikategorikan mendukung iklim investasi. Adanya retribusi yang mendukung investasi ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Kebijakan yang terkait dengan retribusi yang mendukung iklim investasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.99
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	6	6			
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	N/A	N/A			
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	18	18			
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	4	4			

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur



2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas Tenaga Kerja [Rasio Lulusan S1/S2/S3]

Proses pembangunan dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas seseorang. Produktivitas inilah yang berperan dalam penggerak pembangunan. Dari sumber daya manusia yang berketrampilan dan berproduktivitas pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.100 berikut tampak bahwa jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kalimantan Timur masih memerlukan upaya serta kerja keras. Dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 191 orang dan lulusan S3 hanya 3 orang, maka rasio lulusan sarjana S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk hanya berkisar 0,0074. Tentu saja rasio ini masih memerlukan upaya usaha keras untuk meningkatkan jumlah sekaligus rasio mencapai jenjang lebih baik dan ideal.

Tabel 2.100
Rasio Lulusan S1/S2/S3
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah lulusan S1	-	-	-	-	-
2	Jumlah lulusan S2	-	-	-	-	-
3	Jumlah lulusan S3	-	-	-	-	-
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	-	-	-	-	-
5	Jumlah penduduk	-	-	-	-	-
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh penduduk dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur



yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 2.101 berikut menjelaskan kondisi rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2013. Rasio ketergantungan penduduk dalam periode tersebut mencapai angka 51 pada tahun 2009. Angka 51 tersebut mengisyaratkan bahwa dari 100 penduduk bekerja akan menanggung 51 penduduk yang tidak bekerja. Berdasarkan tabel ini juga bahwa salah satu penyebab tingginya rasio ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan masih tingginya angka fertilitas terutama pada penduduk muda yakni kelompok 15 tahun ke bawah. Namun demikian pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi penurunan rasio ketergantungan dimana tahun 2013 sebesar 38.

Tabel 2.101
Rasio Ketergantungan Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	74.823	106.884	144.542	140.225	
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	14.244	9.422	8.327	11.149	
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif [1] & [2]	89.067	116.306	152.869	151.374	
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	173.905	314.559	360.983	398.055	
5	Rasio ketergantungan [3]/[4]	51	37	42	38	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 (diolah)



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 untuk implementasinya tahun ke-4 sesuai dengan prioritas pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2014 maupun evaluasi dengan indikator-indikator RPJMD dapat dijabarkan berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.102 di bawah ini:



Tabel 2.102
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 Dan Realisasi RPJMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka melek huruf	97,80%		Disdik
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka rata-rata lama sekolah	8,62		Disdik
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	minimal 98%		Disdik
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	minimal 97%		Disdik
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	70,63%		Disdik
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	minimal 97,30%		Disdik
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Minimal 76%		Disdik
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	60%		Disdik
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	Minimal 99%		Disdik
1.01.34	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	Minimal 96%		Disdik
1.01.41	Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 74,56%		Disdik
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	43,95%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMP)	43,22%		
		Rasio guru/ murid (SD)	Minimal 99%		
		Rasio guru/ murid (SMP)	Minimal 98%		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA/SMK)	44,48%		
		Rasio guru terhadap murid	28,01%		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Diatas 90%		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Diatas 90%		
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Minimal 95%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,21%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,21%		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	minimal 99%		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	minimal 99%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91,55%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Minimal 97,5%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.	Kesehatan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50.79%		
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka kelangsungan hidup bayi	92.67		Dinkes, RSUD
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka usia harapan hidup	70.91		Dinkes, RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rasio posyandu per satuan balita	11.37		Dinkes, RSUD
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per penduduk	Minimal 0,45		Dinkes, RSUD
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Minimal 0,02		Dinkes
1.02.15	Program Obat dan Pertumbuhan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39		Dinkes
1.02.16	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74		Dinkes
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan kompetensi kebidanan yang ditangani	100 %		Dinkes, RSUD
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %		Dinkes, RSUD
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Minimal 55 %		Dinkes
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %		Dinkes



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Minimal 70%		RSUD
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %		Dirkes
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	84%		RSUD
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %		RSUD
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan puskesmas	Minimal 105,56 %		RSUD
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas pembantu	74,15%		Dinkes
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Dinkes
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan				Dinkes, RSUD
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				Dinkes
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat				Dinkes
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
1.03.	Pekerjaan Umum				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%		DPU
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Jaringan Irigasi	70%		DPU
1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio tempat ibadah per satuan (seibu) penduduk	3.00		DPU
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70.0%		DPU
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	Sesuai Standart		DPU
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80%		DPU
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %		DPU
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Rasio permukiman layak huni	58.80%		DPU
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rasio panjang jalan dilalui Roda 4	0.0056		DPU
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15		DPU
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0.07%		DPU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	68%		DPU
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30.94%		DPU
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	58.56%		DPU
1.03.37	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				DPU
1.03.38	Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur				DPU
1.03.39	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan				DPU
1.03.40	DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota				DPU
1.03.41	DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota				DPU
1.03.42	Swakelola Bidang Cipta Karya				DPU
1.04.	Perumahan				
1.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rumah tangga pengguna air bersih	75.44		DPU
		Rumah tangga pengguna listrik	Minimal 30 %		
		Rumah tangga ber-Sanitasi	70.0%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.	Penataan Ruang	Rumah layak huni	Minimal 85 %		
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	minimal 40%		BPLTR
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	naik minimal 10%		BPLTR
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%		
1.06.	Perencanaan Pembangunan	Ketaatan terhadap RTRW	100%		
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada		Bappeda
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada		Bappeda
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada		Bappeda
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada		Bappeda
1.06.15	Program Pengembangan data/informasi				Bappeda
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah				Bappeda
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				Bappeda



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya				Bappeda
1.06.26	Program Perencanaan Tata Ruang				Bappeda
1.07.	Perhubungan				
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angkutan Umum Darat	79.860		Dishub
1.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Angkutan Umum Laut/ Udara	567		Dishub
1.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio ijin trayek	0.11		Dishub
1.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah uji kir angkutan umum	317		Dishub
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terminal	11		Dishub
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	Pelabuhan Laut	2		Dishub
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pelabuhan Udara	11		Dishub
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan darat	0.65		Dishub
1.07.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kepemilikan KIR angkutan umum	1.00		Dishub
1.07.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Maksimal 1 hari		Dishub



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.07.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Sesuai Standart		Dishub
1.07.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemasangan Rambu-rambu	Sesuai Standart		Dishub
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1.16%		
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Meningkat		
1.08.	Lingkungan Hidup				
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penanganan sampah	70%		BLH
1.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penduduk berakses air minum	minimal 60 %		BLH
1.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Luas pemukiman yang tertata	naik minimal 10%		BLH
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	32%		BLH
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	44%		BLH
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	100%		BLH
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan penetapan status mutu air	29%		BLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Minimal 80 %		BLH
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tempat pembuangan sampah (IPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %		BLH
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan	Penegakan hukum lingkungan	40%		BLH
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	52%		BLH
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				BLH
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam				BLH
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial				BLH
1.09.	Pertanahan				
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	Naik Minimal 10%		BPLTR
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%		BPLTR
1.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelesaian izin lokasi	100%		BPLTR
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BPLTR
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				BPLTR
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				BPLTR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.09.19	Program Pertanahan				BPLTR
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Minimal 90 %		Discapil
1.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio bayi berakte kelahiran	100%		Discapil
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio pasangan berakte nikah	Minimal 75 %		Discapil
1.10.16	Program Keluarga Berencana	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %		Discapil
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %		
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Lengkap		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	80%		
1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%		BPPKB
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%		BPPKB
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio KDRT	Menurun		BPPKB
1.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%		BPPKB
1.11.07	Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35% - 50%		BPPKB



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.11.08	Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		BPPKB
1.11.09	Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/d 3 anak		BPPKB
1.11.10	Program PIK - KRR	Rasio akseptor KB	85.39		BPPKB
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan peserta KB aktif	85.39		BPPKB
1.11.20	Program Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21.93%		BPPKB
1.11.26	Program Penguatan KKB				BPPKB
1.11.27	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMPI) /Penyediaan dukungan operasional IMP				BPPKB
1.11.28	Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS				BPPKB
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				BPPKB
1.13.	Sosial				
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40.25%		Dinsos
1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.83%		Dinsos
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Dinsos



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Dinsos
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				Dinsos
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar				Dinsos
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				Dinsos
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo				Dinsos
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				Dinsos
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelemagaan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.22	Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.23	Program Kesiaprasaingan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana				Dinsos
1.14.	Ketenagakerjaan				
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat		Disnakertrans
1.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pengangguran terbuka	4,25 %		Disnakertrans



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio penduduk yang bekerja	76.07		Disnakertrans
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Pengangguran	4.28		Disnakertrans
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	2.456.31		Disnakertrans
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio ketergantungan	33.45		Disnakertrans
1.14.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				Disnakertrans
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja				Disnakertrans
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)				Disnakertrans
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)				Disnakertrans
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase koperasi aktif	Meningkat		Diskop
1.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Meningkat		Diskop
1.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah BPR/LKM	Meningkat		Diskop



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Diskop
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				Diskop
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelernbagaan Koperasi				Diskop
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)				Diskop
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian				Diskop
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah				Diskop
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri				Diskop
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi				Diskop
1.16.	Penanaman Modal Daerah				
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat		BPMD
1.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat		BPMD
1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur				BPMD
1.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				BPMD
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan				BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				BPMU
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				BPMU
1.16.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				BPMU
1.17.	Kebudayaan				
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	13 kali		Disporpar
1.17.20	Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	13 kali		Disporpar
1.17.21	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%		Disporpar
1.17.22	Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya	Jumlah gedung Kesenian	3		Disporpar
1.17.23	Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah				Disporpar
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya				Disporpar
1.17.26	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat				Disporpar
1.17.27	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah				Disporpar
1.18.	Pemuda dan Olah Raga				
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah organisasi pemuda	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah organisasi olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.10.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasayaran Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Disporpar
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	3		Disporpar
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga				Disporpar
1.18.25	Program Pembibitan Olahraga Berbakat				Disporpar
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Bakesbang
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Bakesbang
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Bakesbang
1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Bakesbang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Bakesbang
1.19.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				Bakesbang
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				Bakesbang
1.19.18	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				Bakesbang
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah				Bakesbang
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat		
1.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat		
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Naik Minimal 10% dari sebelumnya		
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pertumbuhan ekonomi	Minimal 7%		
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kemiskinan	7.13		
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada		
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penegakan PERDA	100%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%		
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%		
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%		
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Sistem Informasi Manajemen Pemda	ada		
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	minimal 90%		
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	7.632.007		
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jenis dan jumlah bank dan cabang	16		
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Angka kriminalitas	maximal 6,50		
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Lama proses perijinan	3 hari		
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	27 macam		
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri				
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri				
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan				
1.20.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Desa				
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia				
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah				
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian				
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.48	Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan				
1.20.49	Program Pengembangan Kediklatan				
1.20.50	Program Penelitian dan Pengembangan				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.20.51	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan				
1.21.	Ketahanan Pangan				
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Regulasi ketahanan pangan	Ada		BKPP
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pangan utama	45,793		BKPP
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				BKPP
1.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BKPP
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				BKPP
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan				BKPP
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				BKPP
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Bapemas
1.22.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Bapemas
1.22.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Posyandu aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting		Bapemas
1.22.15	Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan				Bapemas
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				Bapemas



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.22.21	Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan				Bapemas
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa				Bapemas
1.24.	Kearsipan				
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada		Kantor arsip
1.26.	Perpustakaan	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan		Kantor arsip
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat		Kantor arsip
1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat		Kantor arsip
1.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Kantor arsip
1.26.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				Kantor arsip
2..	Urusan Pilihan				
2.01.	Pertanian				
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	52 kw/ha/tahun		Distan, Disbun
2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	produksi padi (ton)	45.793		Distan, Disbun
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	5,73%		Distan, Disbun



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1.11%		Distan, Disbun
2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.86%		Distan, Disbun
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	100%		Distan, Disbun
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	9 - 19 Juta		Distan, Disbun
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				Distan, Disbun
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				Distan, Disbun
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				Distan, Disbun
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				Distan, Disbun
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				Distan, Disbun
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				Distan, Disbun
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				Distan, Disbun
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				Distan, Disbun
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman				Distan, Disbun
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan				Distan, Disbun
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				Distan, Disbun



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan				Distan, Disbun
2.02.	Kehutanan				
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	44%		Dishut
2.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kerusakan Kawasan Hutan	22%		Dishut
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1.40%		Dishut
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan				Dishut
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				Dishut
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan				Dishut
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan				Dishut
2.03.	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertambangan tanpa ijin	0%		Distamben
2.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	80.01%		Distamben
2.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Distamben
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Distamben
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Distamben



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				Distamben
2.03.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas				Distamben
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT				Distamben
2.03.21	Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan				Distamben
2.03.22	Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar				Distamben
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur				Distamben
2.03.24	Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur				Distamben
2.04.	Pariwisata				
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	23.251		Disparpor
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.25%		Disparpor
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan				Disparpor
2.05.	Kelautan dan Perikanan				
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produksi perikanan	100%		Diskanlaut
2.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Konsumsi ikan	65.64%		Diskanlaut
2.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan bina kelompok nelayan	77%		Diskanlaut
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Produksi perikanan kelompok nelayan	80.26%		Diskanlaut



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.05.07	Program Peningkatan Kerjasama				Diskanlaut
2.05.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Diskanlaut
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				Diskanlaut
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				Diskanlaut
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.				Diskanlaut
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat				Diskanlaut
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan				Diskanlaut
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				Diskanlaut
2.05.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan				Diskanlaut
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				Diskanlaut
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				Diskanlaut
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan				Diskanlaut
2.05.27	Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan				Diskanlaut
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah				Diskanlaut



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.06.	perisir dan pulau-pulau kecil				
2.06.09	Perdagangan				
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5.96%		Disperindag
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu USD)	4.940.967		Disperindag
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.	Industri				
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0.35%		Disperindag
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertumbuhan Industri.	Minimal 1		Disperindag
2.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Disperindag
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Disperindag
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				Disperindag
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Disperindag
2.07.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Disperindag
2.08.	Ketransmigrasian				
2.08.18	Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi				Disnakertrans



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang baik sehingga kebijakan publik memiliki timbangan yang memadai sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

A. Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil analisis capaian pembangunan tahun sebelumnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah, maka identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan
 - 1) Alih Fungsi lahan pertanian
 - 2) Rendahnya produktivitas pertanian
 - 3) Kurangnya luasan lahan pertanian
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana (irigasi) pertanian
 - 5) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian
 - 6) Belum berkembangnya pemasaran hasil pertanian
 - 7) Ketersediaan benih dan pupuk yang kurang
 - 8) Belum berkembangnya hilirisasi produk pertanian
- b. Pengentasan kemiskinan
 - 1) Pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin belum optimal
 - 2) Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal
 - 3) Kemitraan BUMN/BUMD/investasi swasta dalam pemberdayaan UMKM belum optimal
 - 4) Belum terintegrasinya program kegiatan sektoral untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan
 - 5) Belum terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat miskin
 - 6) Masih terdapat penyaluran raskin yang kurang tepat sasaran
- c. Perluasan kesempatan kerja
 - 1) Kompetensi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
 - 2) Masih terdapat 187.362 orang miskin yang tidak bekerja



- 3) Laju peningkatan pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja
- 4) Tingginya angka PHK
- 5) Peempuan masih belum memiliki peluang besar bekerja di sektor non pertanian (industri, pertambangan, dan lain-lain)
- 6) Sektor ekonomi yang berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan sektor riil
 - 1) Rendahnya kualitas produk UMKM
 - 2) Minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM
 - 3) Rendahnya akses permodalan
 - 4) Keterbatasan fasilitas pendukung usaha
 - 5) Belum berkembangnya wirausahawan mandiri
- e. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
 - 1) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
 - 2) Rendahnya kualitas SDM aparatur
 - 3) Belum optimalnya penataan sumberdaya aparatur sesuai standar kompetensi
- f. Pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim
 - 1) Menurunnya mutu lingkungan, akibat alih fungsi lahan
 - 2) Meningkatnya kerusakan/pencemaran lingkungan perairan
 - 3) Kerusakan hutan mangrove
 - 4) Penegakan hukum lingkungan tidak efektif
 - 5) Perencanaan belum berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 6) Belum diarusutamakannya isu *green growth* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- g. Daya saing ekonomi daerah
 - 1) Rendahnya persentase rencana investasi dibandingkan dengan realisasi investasi
 - 2) Belum diterapkannya RTRW Provinsi dan beberapa RTRW Kab/Kota
 - 3) Kompetensi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
 - 4) Rendahnya infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan
 - 5) Belum memadainya kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, promosi paket wisata dan jasa pendukung pariwisata
 - 6) Lamanya proses perijinan



- h. Perluasan akses dan pelayanan pendidikan
 - 1) Belum meratanya prasarana dan sarana pendidikan bagi masyarakat
 - 2) Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan pendidikan
 - 3) Relevansi pendidikan belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja
 - 4) Tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi kualifikasi S1
- i. Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - 1) Upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal
 - 2) Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis
 - 3) Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular.
- j. Pembangunan infrastruktur
 - 1) Belum tercapainya kondisi jalan mantap provinsi yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
 - 2) Fasilitas sarana dan prasarana transportasi (darat, laut dan udara) belum representatif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat
 - 3) Fasilitas sarana dan prasarana pengendali banjir belum berfungsi secara optimal
 - 4) Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak
 - 5) Terhambatnya aktivitas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan jembatan
- k. Pemenuhan daya listrik dan energi
 - 1) Daya mampu PLN yang belum memenuhi kebutuhan
 - 2) Jaringan transmisi listrik yang belum mencukupi
 - 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan belum berjalan secara optimal
 - 4) Diversifikasi bahan bakar
 - 5) Keterbatasan akses terhadap sumber energi
 - 6) Ekspor batubara tidak bisa dikontrol
- l. Pembangunan perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal
 - 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan
 - 2) Terbatasnya tenaga kesehatan di kawasan perbatasan
 - 3) Belum tersedianya transportasi jalan dan jembatan yang memadai di kawasan perbatasan



- 4) Belum tersedianya Bandara di kawasan perbatasan yang representatif dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi udara
- 5) Belum tersedianya dermaga yang representatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan transportasi sungai dan danau
- 6) Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh kawasan perbatasan.

B. Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan analisis hasil capaian penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 hingga tahun 2013, maka permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 yang merupakan masa transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMD Tahun 2016-2020 dapat dijabarkan dalam aspek sebagai berikut:

- 1) **Isu-isu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang belum terselesaikan**
 - a) **Kontribusi PDRB pertambangan dan penggalian khususnya batubara makin dominan,**

Pertumbuhan PDRB dengan mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan sektor agrobisnis (pertanian dalam arti luas), dengan strategi:

 - Perlunya mengurangi kempungan dan ketergantungan pertumbuhan kontribusi sektoral yang cukup besar antara subsektor pertambangan dengan sektor pertanian/agribisnis sebagai tumpuan dari visi Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian dengan melakukan percepatan pembangunan sektor pertanian, melalui strategi penerapan teknologi tepat guna, komoditi unggulan serta mendorong mini industrialisasi di sentra-sentra pertanian yang memberikan daya ungkit tinggi dan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
 - Adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (baca: larangan ekspor) bagi bahan mineral tambang yakni ditempuh melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Kabupaten Kutai Timur harus berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari UU dan Peraturan tersebut, terutama terkait dengan penurunan PAD,



bagi hasil, dan ketenagakerjaan. Peningkatan mata rantai produksi yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dalam bentuk penciptaan output, nilai tambah dan kesempatan kerja lokal, ketersediaan bahan baku pembangkit listrik serta penguasaan teknologi.

- Perlunya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan dampak memperkecil ketimpangan antar kecamatan, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, serta penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya (pertumbuhan inklusif).

Berdasarkan isu dominasi sektor pertambangan dan dikeluarkannya UU dan Peraturan Menteri ESDM di atas, maka agenda pembangunan tahun 2015 difokuskan pada: 1) Mitigasi dominasi sektor pertambangan dan penguatan produk unggulan agribisnis; 2) Percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan.

b) Peningkatan IPM

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk memutuskan lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), maka salah satu kebijakan untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperkuat sektor kesehatan, khususnya menurunkan angka kematian bayi. Adapun upaya untuk menurunkan angka kematian ibu difokuskan pada: (i) Akses pelayanan kesehatan; (ii) Penguatan sumber daya baik jumlah maupun distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter; (iii) Distribusi prasarana fisik – rumah sakit (iv) Ketersediaan energi bagi prasarana kesehatan.

Disamping perbaikan di bidang kesehatan, tidak kalah pentingnya perbaikan di bidang pendidikan bisa diharapkan akan berdampak pada capaian pembangunan manusia. Hal ini mengingat indikator dalam indeks pembangunan manusia (IPM) oleh UNDP (2004) menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai indikator utama disamping indikator ekonomi. Pada akhirnya pembangunan manusia diharapkan dapat



memberikan sumbangan bagi pencapaian keberlangsungan pembangunan [Anand and Sen, 2000: 2038].

c) Peningkatan Usia Harapan Hidup Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka kematian bayi (AKB)

Mengingat AKB/AKI sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, maka upaya peningkatan kesehatan anak harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu. Rendahnya status kesehatan ibu bukan hanya berdampak pada dirinya, namun juga secara langsung terhadap kesehatan janin/bayi. Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan fokus: 1) penyehatan ibu hamil; 2) pemenuhan gizi bayi; 3) penyehatan lingkungan; 4) pelayanan kesehatan bagi perempuan

d) Perluasan pendidikan menengah (SLTA) dan tinggi yang berkualitas

Peningkatan APM SLTA dengan: 1) memberikan perhatian pada kelompok marjinal untuk lebih mudah mengakses pendidikan lanjut (SLTA) melalui pemberian bantuan dan reformasi sistem penerimaan siswa baru; 2) Perluasan pendidikan menengah atas (termasuk SMK pertanian) dan pendidikan tinggi berkualitas untuk meningkatkan *supply* tenaga kerja (*skill formation*) yang lebih terdidik dan relevan dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur, terutama dibidang agrobisnis. Peranan pendidikan dalam perekonomian menambah stok modal manusia berupa kapasitas kemampuan penduduk untuk memproduksi barang dan jasa serta produktivitas individu dan penghasilannya.

e) Peningkatan fasilitas kesenian dan olahraga

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal serta pembinaan dan peningkatan prestasi dan mengolomragakan masyarakat diperlukan adanya peningkatan penyediaan fasilitas kesenian dan olahraga.

2) Isu-isu Aspek Pelayanan Umum

a) Perluasan akses pendidikan usia dini (PAUD)

Upaya perluasan akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan kesiapan anak memasuki sekolah, serta upaya penanggulangan buta huruf dengan mengintegrasikan kegiatan Posyandu dan PAUD yang ada selama ini



serta memberdayakan lembaga pendidikan tradisional yang telah mengakar di masyarakat.

- b) **Penyediaan tenaga kesehatan (Jumlah, distribusi dan kualitas), terutama dokter**

Tenaga kesehatan berperan penting dalam percepatan pembangunan kesehatan, sehingga diperlukan sistem yang handal yang mengatur manajemen pengumpulan data kinerja SDM, mekanisme pendistribusian maupun peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan (misal dokter) dan kapasitas jika diperlukan agar memenuhi rasio ideal tenaga kesehatan terhadap penduduk.

- c) **Penanggulangan penyakit menular (TB)**

Fokus pada faktor yang mempengaruhi rendahnya *Case Detection Rate* (CDR) pada program TB: 1) Pengentasan kemiskinan, 2) penyuluhan kesehatan dan 3) perumya peningkatan infrastruktur dan sumber daya serta pementapan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) pada praktisi kesehatan.

- d) **Pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional)**

Pelayanan dan jaminan kesehatan dalam skema BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, yang perlu diperhatikan: 1) Sistem pelayanan, 2) manfaat jaminan kesehatan, 3) Pembiayaan dan manajemen keuangan dan 4) Transformasi kepesertaan dari Jamkesmas ke JKN dalam skema BPJS.

- e) **Kesenjangan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil**

Masih terdapat keterbatasan transportasi dan komunikasi antar wilayah yang menyebabkan hambatan akses dan keterlambatan pelayanan kesehatan.

- f) **Peningkatan akses air minum dan penanganan sampah**

Meningkat akses terhadap air bersih dan air minum yang aman dan akses terhadap sanitasi serta penanganan sampah merupakan elemen lingkungan penting yang menentukan baik buruknya derajat kesehatan masyarakat, maka perlu akselerasi penyediaan air bersih yang digunakan dan akses minum yang berkualitas serta pengelolaan sampah dipermukimatan. Akses air rumah tangga yang baik, minimal menggunakan 20 liter per orang per hari, sedangkan pengelolaan sampah yang baik apabila sampah di rumah tangga diambil petugas sampah, dibuat kompos atau dikubur di dalam tanah.



- g) Inventarisasi data capaian fasilitas dan infrastruktur serta kependudukan catatan sipil

Perlunya penyempurnaan sistem manajemen informasi dengan fokus faktor yang mempengaruhi yaitu 1) Teknis, meliputi penetapan indikator baku terstandar, SDM terlatih, instrumen pengumpulan data; 2) Organisasi meliputi sumberdaya, struktur sistem, SOP dan budaya organisasi; serta 3) Perilaku yang meliputi motivasi dan tanggung jawab.

- h) Peningkatan Pelayanan dan partisipasi KB

Pelayanan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dalam skema BPJS (JKN), dengan sasaran utama PUS paritas rendah (jumlah anak dua) Penguatan Advokasi dan KIE diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat dalam ber-KB serta Penguatan kapasitas tenaga lapangan dan kelembagaan KB.

- i) Peningkatan jumlah investor dan bina UKM

Sesuai *grand design* para pakar ekonomi, dari total jumlah penduduk Kutai Timur (549.429 jiwa) idealnya memiliki 10.980 pelaku UMKM, sedangkan kondisi per 2013 masih 5.080. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya (misalnya: penyaluran KUR, pemasaran, dan lain-lain) untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan guna penambahan 5.900 UMKM, terutama UMKM yang berbasis agribisnis.

- j) Kepuasan layanan masyarakat

Meskipun secara umum layanan Kabupaten Kutai Timur telah memuaskan masyarakat, namun secara periodik perlu dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

- k) Konservasi dan rehabilitasi hutan

Gejala "stagnasi" kontribusi pembangunan sektor pertanian (termasuk kehutanan) terkait erat dengan berkurangnya perhatian terhadap kerusakan dan kesalahan pengelolaan sumberdaya pertanian, termasuk hutan. Pengelolaan sumberdaya (hutan) secara berkelanjutan, haruslah memperhatikan aspek: 1) kejelasan sistem penguasaan atau sistem pemilikan untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan dan menghindarkan kemunduran kualitas; 2) pentingnya penggunaan teknologi yang "bersahabat" dengan lingkungan; 3) Pengawasan pemanfaatan dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan 4)



Ambang batas eksploitasi yang tidak boleh dilanggar dan perhatian terhadap aspek eksternalitas (lingkungan alam dan sistem sosial)

l) Kontribusi PORB pertanian (arti luas)

Reposisi sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan) sebagai sektor andalan atau "titik berat" pembangunan Kabupaten Kutai Timur dengan pendekatan agribisnis, yaitu:

- Restrukturisasi agribisnis sebagai andalan pembangunan pertanian dan pedesaan dimana: a) kegiatan agribisnis harus dipandang sebagai satu jaringan ekonomi utuh sehingga responsif terhadap dinamika pasar, teknologi dan permodalan; b) pengembangan disesuaikan keunikan lokasi (keunggulan komparatif); c) pengelolaan jaringan agribisnis secara konsolidatif (vertikal maupun horizontal) serta d) pengembangan kemitraan;
- Pengembangan sistem insentif berproduksi yang kondusif dan komprehensif: (anggaran, perdagangan, peraturan konversi lahan, dan lain-lain);
- Pengembangan pasar finansial yang lebih cocok bagi pembangunan pertanian dan pedesaan;
- Pengembangan infrastruktur fisik (transportasi, pasca panen, dan lain-lain) dan kelembagaan pertanian (perbankan, saprodi, dan lain-lain) diarahkan sebagai awal dari serangkaian pentahapan pengembangan wilayah yang bertumpu pada kegiatan pertanian dan menghidupkan sistem agribisnis setempat;
- Pengembangan mini industri pengolahan hasil pertanian di sentra pertanian.

m) Produktivitas padi dan pangan utama lokal

Peningkatan produksi padi dan pendapatan petani meskipun relatif cukup sulit seiring dengan menurunnya kualitas lahan pertanian produktif dan lambatnya penambahan kuantitas lahan baru (terutama lahan beringas), namun peluang peningkatan produksi masih dapat dicapai dengan: 1) efisiensi usaha tani dengan mengarahkan penekanan biaya produksi atau peningkatan produktivitas melalui a) penerapan teknologi tepat guna, b) pengawalan ketat PPL; c) pengaturan dan pengelolaan Sarana Produksi Padi (Saprodi) yang efisien serta d) pengaturan dan pengembangan kelembagaan petani dan



kemitraan usaha (kepastian harga dan pasar); dan 2) pengurangan kerugian petani khususnya pengurangan gangguan hama dan penyakit serta penanganan panen dan pasca panen lebih efisien. Sedangkan peluang peningkatan produktivitas jagung dan ubi-ubian masih sangat dimungkinkan dengan introduksi varietas baru, perbaikan varietas dan teknik budidaya [teknologi spesifik lokasi].

n) Ketersediaan pangan utama lokal dan diversifikasi pangan

Ketersediaan pangan utama lokal yang belum mencukupi serta diversifikasi pangan yang masih kurang, perlu diupayakan akselerasi peningkatan untuk memenuhi kebutuhan.

o) Peningkatan pendapatan petani sejalan dengan kemajuan pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian hingga saat ini masih belum meningkatkan pendapatan petani. Hal ini diperlukan pembinaan dan dukungan kebijakan terhadap petani dan kelompok wanita tani.

p) Penggalan potensi dan peningkatan kunjungan wisata daerah

Peningkatan kontribusi wisata daerah yang belum tergarap secara optimal dengan memadukan kekayaan alam dan budaya [ekowisata], diantaranya pengembangan desa wisata yang didukung dengan memperkuat usaha homestay, kuliner dan usaha kerajinan tangan.

3) Daya Saing Daerah

Terdapat 3 hal penting untuk mendukung peningkatan daya saing daerah (listrik, air bersih, iklim usaha, SDM) yaitu: 1) dalam mencapai pertumbuhan maksimal harus tersedia sarana prasana yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan (*connecting growth pole*); 2) konektivitas antar daerah berupa sarana transportasi dan jaringan sistem logistik yang efisien serta 3) konektivitas antar daerah terpencil (*remote area*).

Berikut Sikronisasi prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016:



Tabel 2. 103
Sinkronisasi Prioritas Nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan
RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI DAERAH TAHUN 2016	PRIORITAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekonomi	1. Pengarusutamaan Gender	
		2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang	
		3. Peningkatan investasi sektor UMKM	a. Pengembangan sektor pariwisata
		4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga	
		5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global	a. Pembangunan sektor ekonomi berbasis lingkungan
		6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	a. Pengembangan industri dan Perdagangan
		7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)	a. Pengembangan Koperasi dan UMKM
		8. Peningkatan ekspor produk olahan	
		9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan	a. Perlindungan status lahan dari alih fungsi dan pemanfaatan lahan
		10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian	a. Peningkatan swasembada padi, jagung dan kedelai
		11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi	
		12. Peningkatan infrastruktur pertanian	a. Pembangunan Irigasi Kecamatan Rantau Pulung. b. Penyelesaian Pembangunan Fisik Bendungan di Kecamatan Kaliurang c. Peningkatan konektivitas dan produksi pertanian dalam arti luas
		13. Peningkatan produktivitas pertanian	a. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara optimal untuk mendukung kemaritiman
		14. Perbaikan tata niaga produk pangan	
		15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan	a. Pembangunan PLTS Komunal dengan Kapasitas 40 KWP Untuk 300 KK desa Tj. Mangkalahat Kec. Sandaran Kutai Timur b. Perencanaan Pembangunan PLTMH Juwata Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang c. Ketersediaan energi baru yang terbarukan
		16. Peningkatan rasio elektrifikasi	a. Survey geolistrik Kecamatan Busang, Kecamatan Bengalon, Kecamatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI DAERAH TAHUN 2016	PRIORITAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
(1)	(2)	(3)	(4)
		17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Muara Wahau, (diprioritaskan untuk kecamatan yang sumber air susah)
			a. Perencanaan Pembangunan Jalan Muara Bengkal – Samarinda
			b. Penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan Sisi darat
			c. Peningkatan Jalan Simpang Batu Ampar-Batu Ampar
			d. Pembangunan Bandar Udara Uyang Lahai Kecamatan Kongbeng (Amdal)
			e. Perencanaan pembangunan terminal bersama Kutim Bontang
			f. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas untuk (5 kecamatan)
			g. Pengadaan Rambu-rambu Sungai (6 Kecamatan)
			h. Pembuatan Alur pelayaran Sungai
		18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan	a. Peningkatan jalan Sangatta-Kec. Bengalon-Kec. Kaliorang-Kawasan Maloy
			b. Pembangunan IPA dan jaringan air bersih di desa Sekerat Kecamatan Bengalon
		19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan	a. Peningkatan konektivitas dan produksi pertanian dalam arti luas
		1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan	
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.	a. Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau
		3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (<i>green economy</i>) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	
		4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi	a. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis
		5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan	a. Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup b. Pembuatan menara pantau api
2	Lingkungan	6. Penegakan hukum lingkungan	
		7. Penurunan emisi gas rumah kaca	
		8. Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI DAERAH TAHUN 2016	PRIORITAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Politik	-	
4	Hukum	-	
5	Pertahanan dan Keamanan	-	
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	a. Peningkatan Kualitas Manajemen Organisasi b. Peningkatan Koordinasi Data Dan Pengendalian c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawas d. Peningkatan Administrasi Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil e. Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pemilukada
7	Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 6. Peningkatan kualitas tenaga kerja	a. Peningkatan Kualitas Pendidikan a. Peningkatan Kualitas Kesehatan a. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial a. Pembangunan IPA 10 lt/dtk dan jaringan di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan b. Pembangunan IPA 10 lt/dtk dan jaringan di Desa Rantau Sentosa - Long Bentuk Kecamatan Busang. c. Pemasangan jaringan distribusi Desa Dabag dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau d. Pemasangan pipa distribusi Desa Segoy Makmur dan Desa Sika Makmur Kecamatan Long Mesangat e. Pemasangan pipa distribusi Desa Muara Pantun Kecamatan Telen f. Pembangunan IPA 5 lt/dtk dan jaringan di Desa Marah Haloq dan Desa Marah Kenyah (Long Meleh) Kecamatan Telen g. Pemasangan jaringan distribusi Kecamatan Rantau Pulung h. Lanjutan Pembangunan IPLT di TPA Batota Kecamatan Sangatta Utara i. Pembangunan Sumur dalam di Kecamatan Kaubun a. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI DAERAH TAHUN 2016	PRIORITAS KABUPATEN KUTAI TIMUR
(1)	(2)	(3)	(4)
			Ketenagakerjaan Serta Transmigrasi
8	Kewilayahan	-	a. Pemasangan patok dan gerbang perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau b. Pengukuran batas enclave pada kawasan wilayah TNK
9	Kelautan	-	



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah

Tabel 2.104
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Melampaui	Masih adanya ketimpangan kontribusi sektor pertambangan dan pertanian	
1.2.	PDRB per kapita	Melampaui		
1.3.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Melampaui		
1.4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Melampaui		
1.5.	IPM	Belum tercapai	Masih rendahnya UHH	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	Melampaui	Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Belum tercapai		
1.3.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Melampaui		
1.3.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Melampaui		
1.3.3	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui		
1.4.	Angka pendidikan yang ditanamkan	Melampaui		
1.5.	Angka Partisipasi Murni			
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Melampaui		
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Melampaui		
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Melampaui		
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	Melampaui	Distribusi tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) belum merata hingga desa-desa	
2.2.	Angka usia harapan hidup	Belum Tercapai		
3.	Pertanahan			
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan			



4.	Ketenagakerjaan			
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	-	Masih relatif rendahnya daya saing penduduk lokal ditunjukkan dengan angka penduduk angkatan kerja yang paling banyak berpendidikan SMA Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan yang ada terutama jenjang SMA Masih tingginya angka penduduk setengah pengangguran	
Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
1.	Kebudayaan			
1.1.	Jumlah grup kesenian	-	Tergesernya budaya lokal dengan budaya modern akibat globalisasi	
1.2.	Jumlah gedung	Sesuai		
2.	Pemuda dan Olahraga			
2.1.	Jumlah klub olahraga	Sesuai	Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki organisasi olahraga	
2.2.	Jumlah gedung olahraga	Sesuai		
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Fokus Layanan Urusan Wajib				
1.	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan dasar:			
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui		
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Melampaui		
1.1.3.	Rasio guru/murid			
1.1.4.	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	Melampaui		
1.2.	Pendidikan menengah:			
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	Melampaui		
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Melampaui		
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	Melampaui		
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Melampaui		
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Melampaui		
1.3.	Fasilitas Pendidikan:			
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	-	Terkendalanya pembangunan sekolah karena belum selesainya proses penyelesaian lahan	
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	-	Lemahnya koordinasi antara Diknas dan sektor terkait (PU, PLTR)	
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Belum tercapai		
1.5.	Angka Putus Sekolah:			
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS)	Sesuai	Rentang keridali tinggi karena	



	SD/MI		kondisi geografis wilayah	
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Melampaui		
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Melampaui		
1.6.	Angka Kelulusan:			
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Melampaui	Masih kurangnya jumlah sekolah yang memenuhi standar (akreditasi) Belum adanya SOP aspek pelayanan pendidikan	
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Melampaui		
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Melampaui		
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Melampaui		
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Belum tercapai		
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Melampaui	Masih belum memadainya jumlah guru berdasarkan kualifikasi bidang studi	
2.	Kesehatan			
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	Belum tercapai	Masih belum memdainya ketersediaan tenaga medis, para medis, dan fasilitas kesehatan	
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk			
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Sesuai		
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Sesuai		
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Melampaui	Belum meratanya sebaran tenaga para medis terutama di wilayah pedesaan	
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Belum tercapai		
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Melampaui		
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Melampaui		
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Sesuai	Masih belum memadai dan optimalnya peran puskesmas serta belum adanya biaya operasional ke UPT	
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Belum Tercapai		
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Sesuai		
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Belum tercapai	Masih kurangnya sosialisasi dan promosi bagi kesehatan masyarakat Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	Belum tercapai		
2.14.	Cakupan puskesmas	Melampaui		
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	Melampaui		
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		Masih rendahnya kualitas jaringan jalan dan jembatan terutama pada jalur utama	
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	Melampaui	Masih belum memadainya jaringan dan bangunan	



			pelengkapanya	
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Belum tercapai	Masih adanya kesenjangan antara beban kerja dengan kapasitas organisasi	
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	Masih adanya kesenjangan antara ketersediaan SDM aparatur dengan volme/ beban kerja/ kegiatan	
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung beserta fasilitasnya untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan	
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-		
3.7.	Rasio rumah layak huni	Melampaui		
3.8.	Rasio permukiman layak huni	Melampaui		
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	-		
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	-	Masih belum terhubungnya seluruh akses antar desa dan antar kecamatan	
3.11.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Sesuai	Belum optimalnya pembangunan sistem jaringan irigasi drainase secara kuantitas dan kualitas	
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Belum tercapai	Masih adanya kesenjangan beban kerja dengan kapasitas organisasi	
3.14.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	-		
3.15.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	-		
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	-	Masih terbatas fasilitas dan belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih	
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	-	Masih terbatasnya kelistrikan	
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	-	Masih kurangnya jaringan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan Belum adanya pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu	
4.4.	Rumah layak huni	Melampaui		
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	Masih terjadinya konflik pemanfaatan lahan, konversi lahan serta kepastian peruntukan	
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Melampaui	Kurangnya sosialisasi tentang syarat pendirian bangunan dan peruntukan kawasan	
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	Masih belum optimalnya pengendalian lahan dan tata ruang serta penerapanan RTBL	
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Belum memadainya SDM aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan	
6.2.	Tersedianya Dokumen	Ada	Masih terbatasnya dokumen	



	Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA		perencanaan	
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada		
6.4.	Penyebaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Masih kurang optimalnya peran SKPD terkait perencanaan pembangunan Masih belum dioptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai pedoman	
7.	Perhubungan			
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Melampaui	Masih terbatasnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara	
7.2.	Rasio jin trayek	-		
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	-	Masih terbatasnya akses perijinan untuk pengelolaan trayek	
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Sesuai		
7.5.	Angkutan darat	-	Masih rendahnya kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor	
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	-		
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Melampaui	Masih kurangnya SDM penguji kendaraan bermotor	
7.8.	Pemasangan Rambu-rambu	-	Masih terbatasnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	
8.	Lingkungan Hidup			
8.1.	Persentase penanganan sampah	-	Masih belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah Kurang sosialisasi pada masyarakat dalam pengelolaan sampah	
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	-	Masih rendahnya kualitas air baku	
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	-	Belum optimalnya upaya penyehatan lingkungan dan pemukiman	
8.4.	Pencemaran status mutu air	-		
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	-		
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Belum tercapai	Masih rendahnya ketaatan terhadap implementasi AMDAL	
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah	
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	Sesuai	Belum adanya regulasi penetapan kawasan konservasi	
9.	Pertanahan			
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	Masih adanya konflik kepemilikan dan lahan yang tak bersertifikat	
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	-		
9.3.	Penyelesaian Izin Lokasi	-		
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	-	Tingginya angka migrasi di ibukota kabupaten dan daerah produktif	



10.2.	Rasio bayi berakta kelahiran	.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan	
10.3.	Rasio pasangan berakta menikah	Belum tercapai		
10.4.	Kepemilikan KTP	Belum tercapai		
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Belum tercapai	Belum optimalnya registrasi kependudukan di tingkat desa	
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Sesuai	Adanya keterbatasan SDM dalam bidang IT kependudukan	
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum tercapai		
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Melampaui	.	
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Melampaui	Masih belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder	
11.3.	Rasio KDRT	.	Masih belum optimalnya penanganan KDRT dan perlindungan anak	
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak	
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Belum tercapai	Masih terbatasnya pendataan tentang perempuan dan perlindungan anak	
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	.	Belum adanya regulasi tentang tenaga kerja usia dibawah umur	
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Sesuai	Masih rendahnya kesadaran masyarakat ber KB dan terbatasnya tenaga pelayanan PLKB	
12.2.	Rasio akseptor KB	Belum tercapai		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	Sesuai		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Melampaui		
13.	Sosial			
13.1.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Melampaui	Masih belum adanya data base PMKS	
13.2.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Melampaui	Belum adanya regulasi dan SPM bidang kesejahteraan sosial	
14.	Ketenagakerjaan			
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Melampaui	Masih belum adanya Grand Design tentang Man Power Planning	
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Melampaui		
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	Melampaui	Masih rendahnya kompetensi pencari kerja terhadap kualifikasi lapangan kerja yang dibutuhkan	
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	Melampaui	Belum optimalnya operasional BLK Masih belum adanya sinkronisasi antara bidang ketenagakerjaan dan bidang pendidikan	
14.6.	Keselamatan dan perlindungan		Belum adanya penerapan pengawasan terhadap tenaga kerja	
15.	Koperasi Usaha Kecil dan			



	Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	Melampaui	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian koperasi	
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Sesuai	Masih terbatasnya SDM dan sarana rendahnya mobilisasi petugas/penyuluh koperasi	
15.3.	Jumlah BPR/LKM	Sesuai		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	Belum Tercapai	Masih belum optimalnya dukungan permodalan dari BPR/LKM	
16.	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Sesuai	Masih lemahnya koordinasi dalam peningkatan investasi antar sektor	
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Melampaui	Masih belum tersusunnya data base PMDN dan PMA	
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja			
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Melampaui		
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Belum tercapai	Berkurangnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional	
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Belum tercapai		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarkan	Sesuai	Masih belum adanya kawasan cagar budaya	
18.	Keperemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Sesuai	Masih kurang optimalnya pengorganisasian pemuda di pedesaan	
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	Sesuai		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Sesuai	Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga oleh organisasi olahraga	
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Sesuai		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Sesuai		
18.6.	Lapangan olahraga	Sesuai		
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Sesuai	Masih belum optimalnya monitoring kegiatan LSM	
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Sesuai	Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat	
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Belum tercapai	Masih terbatasnya jumlah satpol PP dan Linmas dalam penegakan PERDA	
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk			
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Masih kurangnya partisipasi masyarakat	
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	Melampaui	Masih rendahnya kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB	



20.5.	Kemiskinan	Melampaui	Masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan riil masyarakat	
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Penjaminan dan administrasi pemerintah		Masih belum optimalnya penerapan SIMDA	
20.7	Penegakan PERDA		Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya jumlah petugas	
20.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kedisiplinan, keindahan) di Kabupaten			
20.9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		Belum memadai jumlah layanan dalam penanganan bencana	
20.10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Belum dapatnya digunakan dana daerah serta belum tuntasnya masalah TPTGR (Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti rugi)	
20.11	Sistem Informasi Manajemen Pemda		Masih adanya kerancuan dalam struktur organisasi Masih belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan sistem audit	
20.12	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Belum Tercapai	Belum optimalnya penerapan SPM Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan standar kompetensi	
21	Ketahanan Pangan			
21.1	Regulasi ketahanan pangan	Sesuai	Masih belum jelasnya peruntukan kawasan untuk lahan pertanian Belum optimalnya fungsi kelembagaan pangan dan belum adanya regulasi mutu dan keamanan pangan	
21.2	Ketersediaan pangan utama	Belum tercapai	Masih adanya konversi lahan pertanian, persilangan peruntukan dengan sector non pertanian, Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan pengairan Masih terbatasnya prasarana dan belum optimalnya sistem distribusi hasil pertanian	
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Melampaui	Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ADD	
22.2	Jumlah LSM		Masih belum teradministrasikan dengan baik data-data desa dan belum optimalnya peran LSM dalam pembangunan desa	
22.3	PKK aktif	Melampaui	Berkurangnya partisipasi	



22.6	Posyandu aktif	Melampaui	masyarakat	
23.	Statistik			
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Sesuai	Masih terbatasnya jumlah SDM	
23.2	Buku "PDRB kabupaten"	Sesuai	operator statistik dan kurangnya kemampuan dalam pengolahan data Belum adanya data statistik sektoral yang akurat	
24.	Kearsipan			
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	Sesuai	Belum optimalnya unit kerja dan penataan arsip daerah	
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Sesuai	Masih terbatasnya tenaga arsiparis	
25.	Komunikasi dan Informatika			
25.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Sesuai	Masih rendahnya kualitas pemberitaan dan visualisasi melalui media cetak dan elektronik	
25.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Sesuai		
25.3	Web site milik pemerintah daerah	Sesuai	Masih rendahnya pemanfaatan data elektronik pada instansi pemerintah	
25.4	Pameran/expo			
26.	Perpustakaan			
26.1	Jumlah perpustakaan	.	Masih minimnya infrastruktur bangunan perpustakaan dan tenaga pustakawan	
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	.	Masih minimnya minat baca masyarakat dan minimnya sosialisasi	
26.3	Koleksi buku yang terdapat di perpustakaan daerah	.	Masih terbatasnya koleksi buku dan kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait Belum terpasangnya jaringan web dan perpustakaan digital	
Fokus Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pertanian			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Belum tercapai	Ketersediaan dan penyebaran teknologi spesifik lokasi belum mampu menjangkau seluruh tipe lahan Belum adanya sarana pendukung pertanian (UPT, laboratorium)	
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Belum tercapai	Adanya konversi lahan untuk pembangunan sector lain Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Belum tercapai		
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	.	Masih kurangnya regulasi peruntukan lahan pertanian berkelanjutan	
1.5.	Cakupan bina kelompok petani	Belum tercapai	Masih belum optimalnya kelembagaan penyuluh pada pembinaan kelompok tani	
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Belum tercapai	Jumlah lahan kritis yang masih sangat luas	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Belum tercapai	Maraknya perambahan hutan	



			dan lahan serta terbatasnya personil dan sarana operasional JAGAWANA	
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	Menurunnya produktivitas hasil hutan karena perambahan hutan dan penurunan jumlah HPH	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa izin	-	Masih belum optimalnya monitoring dan pengendalian bidang energi dan mineral	
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Melampaui	Masih belum baiknya data base pertambangan	
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan wisata	Melampaui	Masih kurangnya upaya promosi	
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	Bidang pariwisata masih belum dikelola dan dikembangkan secara profesional	
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan	-	Manajemen pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang masih kurang	
5.2.	Konsumsi ikan	-		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	-	Masih terbatasnya petugas dan sarana operasional penyuluh	
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	Masih terbatas sarana prasarana tangkap dan budidaya kelompok nelayan	
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	Masih kurang memadainya infrastruktur sektor perdagangan dan pasar (desa dan kecamatan)	
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	-	Menurunnya nilai ekspor bersih perdagangan	
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		Produksi IKM masih berorientasi pada pesanan dan belum perluasan pasar	
7.2.	Pertumbuhan Industri		Belum optimalnya promosi dan pembinaan IKM	



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kutai Timur tahun 2014 beserta karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2015-2016. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro hingga semester satu tahun 2015, dan estimasi tahun 2016, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-sasaran yang dimaksud tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah terdapat dua hal yaitu *pertama* kualitas perencanaan pembangunan daerah dan *kedua* adanya daya dukung keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi keuangan daerah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik, tanpa didukung oleh kekuatan anggaran atau keuangan daerah yang memadai akan menemui banyak kesulitan, demikian sebaliknya. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah tahun 2016.

Secara umum sumbangsih sektor ekonomi khususnya pembangunan ekonomi daerah menjadi salah satu pemicu sekaligus pemacu bagi sektor-sektor lainnya. Keberhasilan pembangunan bidang lainnya di suatu wilayah sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui



keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi situasi dan kondisi ekonomi nasional maupun global. Sementara perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia. Situasi perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa dan Amerika Serikat mulai membaik. Namun demikian masih terdapat resiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Resiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kondisi ekonomi Nasional maupun provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan ekonomi tahun 2015 yang tercermin dari RKP Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang merupakan masa transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu meningkat ke jenjang negara maju, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah: (1) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang dimulai pada akhir tahun 2015; (2) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015 (*Post 2015*); dan (3) perubahan iklim global. Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035. Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (*Comprehensive Reform*) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sebagai rencana kerja transisi dari RPJMN kedua ke RPJMN ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan capaian RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Oleh karena itu, RKP tahun 2015 ditetapkan dengan tema "Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan".



Sebagai penjabaran tema RKP Tahun 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yakni:

- a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama melalui: 1) Pengendalian jumlah penduduk; 2) Reformasi pembangunan kesehatan; 3) Reformasi pembangunan pendidikan; 4) Sinergi Percepatan.
- b. Bidang Ekonomi melalui: 1) Transformasi sektor industri dalam arti luas; 2) Peningkatan daya saing tenaga kerja; 3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi; 4) Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi; 5) Reformasi keuangan negara.
- c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui peningkatan kapasitas iptek
- d. Bidang Sarana dan Prasarana melalui: 1) Peningkatan ketahanan air; 2) Peningkatan konektivitas nasional; 3) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- e. Bidang Politik melalui konsolidasi demokrasi.
- f. Bidang Pertahanan dan Keamanan melalui: 1) Percepatan pembangunan MEF dan Almatrus POLRI dengan pemberdayaan industri pertahanan; 2) Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.
- g. Bidang Hukum dan Aparatur melalui: Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik; 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang melalui: 1) Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; 2) Pengelolaan resiko bencana; 3) Sinergi pembangunan perdesaan.
- i. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan melalui: 1) Perkuatan ketahanan pangan; 2) Peningkatan ketahanan energi; 3) Percepatan pembangunan kelautan; 4) Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.

Sementara kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tercermin pada RKPD Tahun 2016 ditetapkan kebijakan pembangunan ditekankan pada penajaman dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada rencana pembangunan 2016 dan melanjutkan program kegiatan yang belum berjalan atau yang sedang berjalan pada tahun 2015. Sehingga diharapkan dengan tetap melanjutkan program pada tahun 2015 akan memberikan fondasi yang kuat agar pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 dapat berjalan dengan optimal.



Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/ sektor dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah. Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah yang meliputi 8 (delapan) aspek merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2015.

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*. Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tema: "Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah Dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah".

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 telah menetapkan dua belas (12) prioritas pembangunan dengan memuat sasaran yang tercermin dalam RKPD tahun 2015 diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan melalui sasaran:
1) peningkatan kesadaran tentang melek huruf; 2) perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui sasaran: 1) peningkatan akses di bidang kesehatan; 2) peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan.
- c. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui sasaran: 1) peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
- d. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja melalui sasaran: 1) perluasan lapangan kerja; 2) penyediaan/perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
- e. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sasaran: 1) pengembangan



ekonomi lokal; 2) menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang.

- f. Percepatan transformasi ekonomi melalui sasaran: 1) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- g. Pemanfaatan kebutuhan energi ramah lingkungan melalui sasaran: 1) gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha; 2) gerakan hemat energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- h. Pengembangan agroindustri melalui sasaran: 1) percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan; 2) konektivitas infrastruktur dasar menuju sentra agroindustri.
- i. Penguatan cadangan pangan melalui sasaran: 1) peningkatan areal pertanian; 2) peningkatan produktivitas pertanian.
- j. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar melalui sasaran: 1) perbaikan infrastruktur menuju pusat-pusat pertumbuhan dan konektivitas wilayah; 2) perbaikan infrastruktur menuju pusat-pusat agroindustri.
- k. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui sasaran: 1) standarisasi rencana dan prosedur tga prioritas fokus; dan 2) peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur.
- l. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui sasaran: 1) meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan kawasan hutan; 2) penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2016 sebagai tahun transisi RPJMD 2011-2015 dan RPJMD 2016-2020 menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan pertumbuhan inklusif dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan menetapkan 12 prioritas pembangunan yaitu: 1) penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; 2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3) peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan; 4) peningkatan infrastruktur



dasar kawasan pemukiman; 5) peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan; 6) peningkatan pembangunan pedesaan; 7) peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat; 8) peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*); 9) peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; 10) pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup; 11) peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi; 12) pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*).

Upaya untuk menentukan arah dan orientasi ke depan proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, maka sangat diperlukan ukuran capaian pembangunan (indikator). Berdasarkan capaian indikator tersebut dapat diketahui sisi-sisi pembangunan yang telah tercapai dan belum tercapai beserta tantangan dan peluangnya.

Tabel 3. 1
Perkembangan Capaian dan Target Beberapa Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014*	2015*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	11,43	12,68	11,43	minimal 7	minimal 7
2	Persentase Angka Kemiskinan (%)	6,37	6,12	5,87	6,63	6,13
3	Indeks Pembangunan Manusia	74,96	75,21	75,46	76,76	77,26
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,75	3,90	5,91	4	3,75
5	PDRB Perkapita (juta rupiah)	172,410	179,41	201,69	174,62	177,24

Sumber: - LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 dan 2013

Keterangan : * Target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Berdasarkan perkembangan beberapa capaian kinerja utama sebagaimana Tabel 3.1 di atas menunjukkan perkembangan capaian yang positif secara keseluruhan kecuali capaian persentase tingkat pengangguran terbuka yang justru mengalami peningkatan persentase tingkat pengangguran terbuka. Namun berangkat dari capaian indikator tahun 2013, maka target capaian pada tahun 2014 dan 2015 optimis bisa tercapai kecuali indikator indeks pembangunan manusia yang akan sulit tercapai mengingat selisih capaian tahun 2013 dengan target tahun 2015 yang cukup besar. Sementara itu, indikator pertumbuhan ekonomi, persentase angka kemiskinan dan PDRB perkapita pada tahun 2013 capaiannya jauh melampaui dari target tahun 2015, sedangkan tingkat pengangguran terbuka meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan, namun masih sangat



memungkinkan untuk tercapai pada tahun 2015 dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2009-2013 berdasarkan PDRB ADHB konsisten terus mengalami peningkatan baik nilai maupun kontribusinya, dimana pada tahun 2009 sebesar 85,80 persen menjadi sebesar 88,21 persen pada tahun 2013.

Sementara sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar setelah pertambangan dan penggalian, perkembangan kontribusinya cenderung menurun namun jika dilihat dari sisi nilai terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2013). Hal ini bisa dimaklumi karena sektor pertambangan yang masih sangat dominan kontribusinya.

Demikian pula sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, bangunan dan konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa, industri pengolahan dan listrik, gas dan air bersih kontribusinya masih fluktuatif namun secara keseluruhan telah mengalami pertumbuhan meskipun jika dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian masih sangat jauh perbandingannya.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2009-2013 cenderung meningkat dari Rp 27.380.004,69 juta di tahun 2009 menjadi Rp 60.931.993,14 juta pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut mulai tahun 2009 hingga tahun 2013 yaitu sebesar Rp 27.380.004,69 juta, Rp 34.179.895,99 juta, Rp 41.206.892,31 juta, Rp 50.173.447,91 dan Rp 60.931.993,14. PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2009-2013 berturut-turut sebesar Rp 4.101.439,75 juta, Rp 4.701.103,10 juta, Rp 5.452.869,43 juta, Rp 6.379.800,64 juta dan Rp 7.522.322,06.

Berdasarkan data perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2, memberikan gambaran bahwa komposisi pembentukan PDRB



masih didominasi oleh batubara. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.2
Nilai Sektor dalam PDRB ADHB
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 s.d 2013 (dalam juta rupiah)

Sektor Ekonomi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.185.838,44	1.404.220,77	1.480.828,57	1.752.388,65	2.088.877,28
Pertambangan dan Penggalian	23.492.820,38	28.230.037,71	38.013.593,18	44.089.801,15	53.748.332,55
Industri Pengolahan	88.433,78	80.721,20	104.037,21	112.805,88	122.922,38
Listrik, Gas, Dan Air Bersih	30.088,20	32.882,40	36.317,80	40.490,51	44.360,23
Konstruksi	854.800,38	783.363,87	778.214,54	883.481,02	1.031.982,79
Perdagangan	995.340,38	1.128.459,48	1.442.338,08	1.727.152,56	2.062.218,37
Angkutan dan Komunikasi	542.403,48	651.557,48	712.058,20	848.551,11	1.007.855,54
Keuangan dan Jasa Perusahaan	248.713,83	274.303,48	288.514,58	321.176,36	356.737,15
Jasa-jasa	173.852,70	188.588,83	342.891,13	410.523,78	493.298,83
Total PDRB Dengan Migas	27.380.004,68	34.178.895,99	41.206.892,30	50.173.447,91	60.931.993,14
Total PDRB Tanpa Migas	26.430.182,48	33.427.758,31	40.358.574,85	48.212.005,10	59.833.657,52
Total PDRB Tanpa Migas Dan Batu Bara	4.101.438,75	4.701.103,10	5.452.869,43	6.379.800,64	7.522.322,06

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

*) Angka sementara

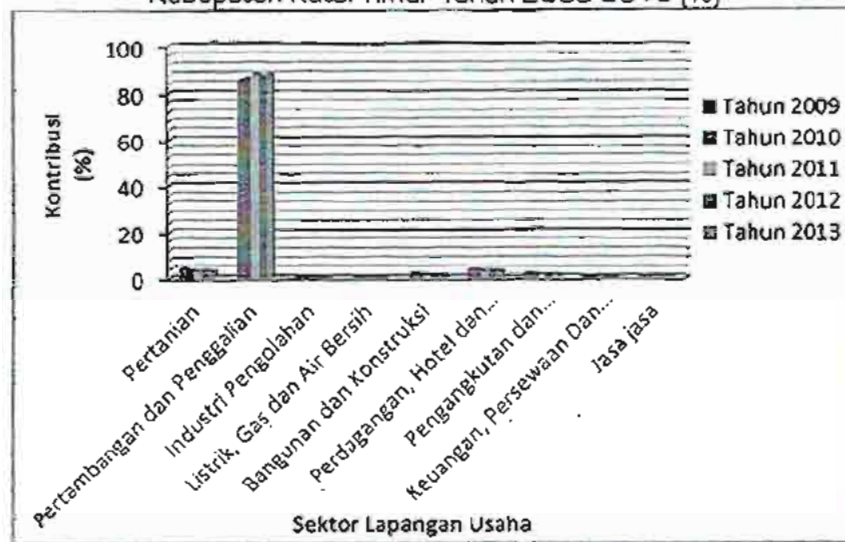
**) Angka sangat sementara

Pada tahun 2009 sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor unggulan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur, begitu pula hingga sampai tahun 2013. Sektor pertambangan dan penggalian masih berperan sebagai tonggak utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan sektor pendukungnya masih pada sektor pertanian; karena dua sektor tersebut mempunyai gap yang cukup jauh dengan sektor-sektor yang lain. Tahun 2013 hingga beberapa tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih berada pada jalur peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan sektor unggulan masih pada dua sektor tersebut. Sehingga pada beberapa tahun ke depan dua sektor tersebut masih akan mendominasi. Karena pada saat ini dua sektor tersebut merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Kutai Timur saat ini. Selain itu, pertumbuhan yang cukup bagus dan



signifikan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bahkan pada tahun 2013 berdasarkan perhitungan angka sangat sementara BPS, pertumbuhannya telah mendekati sektor pertanian. Hal ini bisa dicermati dengan semakin tumbuhnya hotel-hotel yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat hunian yang semakin tinggi serta dari sisi perdagangan dan restoran yang semakin meningkat.

Gambar 3.1
Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Dengan Migas
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 [%]



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kaltim 2013 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dengan migas di Kabupaten Kutai Timur masih terlalu dominan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, dengan adanya komposisi tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus *concern* untuk menumbuhkan sektor-sektor lainnya secara cepat khususnya sektor pertanian yang merupakan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yakni "Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri".

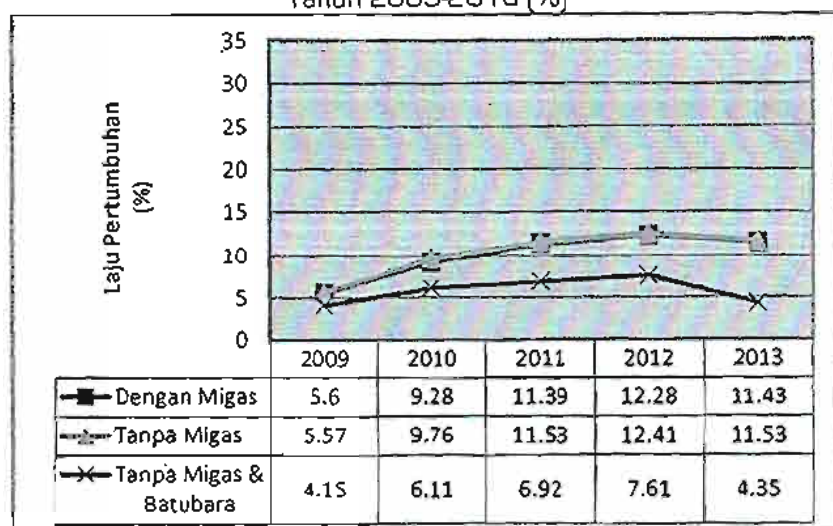
Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur mencapai 5,6 persen, kemudian mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan tiap tahunnya hingga mencapai 12,28 persen pada tahun 2012, kemudian sedikit menurun pada tahun 2013 sebesar 11,43 persen.

Secara keseluruhan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan tersebut terangkum dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di



Kabupaten Kutai Timur selama periode tahun 2009 hingga tahun 2013 tampak sebagaimana Gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kaltim 2013 (diolah)

Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan sektor migas dan batubara tampak lebih stabil. Artinya perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak jauh berbeda dengan pola pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di sekitar angka 5 hingga 7 persen. Namun bila memperhitungkan sektor migas dan batubara maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tumbuh melampaui di atas rata-rata nasional yakni hingga 9 hingga 11 persen. Bahkan pada tahun 2012 menembus angka 12,28 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur lebih dibanyak ditopang oleh sektor migas dan pertambangan (batubara). Pertumbuhan ini sangat wajar karena produksi hasil tambang tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tercatat pada tahun 2012 produksi batubara sebesar 64.357.783,17 ton menjadi sebesar 74.216.224,29 ton pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 9.858.441,12 ton. Dan diperkirakan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan produksi.

Oleh karena itu, pada tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar minimal 7 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi baik dengan migas maupun tanpa migas dan batu bara diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring dengan proyeksi peningkatan produktivitas batubara serta pertumbuhan di sektor-sektor lain seperti pertanian dengan program MP3EI melalui



food estate yang ada di Kabupaten Kutai Timur serta sektor perdagangan dan transportasi yang terus mengalami peningkatan.

1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016

1.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah tahun 2015 dan tahun 2016

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 dan tahun 2016, diantaranya adalah:

- **Daya Saing Daerah Berbasis Agribisnis.** Penekanan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 yaitu meningkatkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur harus mulai bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan keunggulan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam lokal yang didukung dengan infrastruktur yang memadai dan perluasan inovasi teknologi. Adapun sasaran utama yang lebih penting adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (tinggi dan trend positif), Pertumbuhan yang berkualitas mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor pertanian (agribisnis) dan pedesaan. Daerah pedesaan dan sektor pertanian merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi, dengan demikian fokus pada pedesaan dan sektor pertanian dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
- **Kualitas Pelayanan Kesehatan.** Capaian tingkat kesehatan khususnya dalam rangka pencapaian MDGs tahun 2015 sekaligus akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Sektor kesehatan menjadi sangat penting karena sektor ini menentukan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia pada akhirnya dapat dikaitkan dengan pembangunan manusia (sekalius mendorong IPM) yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.



- **Tersedianya Infrastruktur yang memadai.** Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas terutama bagi akses wilayah yang sulit terjangkau diantaranya adalah akses jalan, akses air bersih dan listrik. Keberadaan infrastruktur merupakan prasyarat agar suatu wilayah dapat mempertahankan dan meratakan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mudak diperlukan bagi wilayah yang sedang melakukan pembangunan fisik khususnya. Hal ini dikarenakan infrastruktur fisik akan memudahkan kelancaran maupun mobilitas bagi proses masuknya penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur.
- **Terwujudnya peningkatan partisipasi swasta atau dunia usaha melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai satu kesatuan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.** Tantangan ini menjadi sangat penting karena pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan fisik khususnya merupakan wujud kepedulian sekaligus partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan.
- **Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah.** Kualitas aparatur pemerintah tampak dalam potensi dan permasalahan aparatur pemerintah itu sendiri. Potensi dan permasalahan aparatur pemerintah merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi SDM aparatur menyangkut jumlah pegawai yang dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan, bidang keahlian, dan termasuk pula persebarannya. Hal ini penting untuk memetakan potensi SDM aparatur dengan potensi wilayah untuk menilai derajat kesesuaian persebaran antara potensi SDM dengan potensi wilayah yang ada. Diantara yang diperlukan dalam peningkatan kualitas SDM adalah diperlukan pengembangan/pengkaderan sumberdaya manusia dalam organisasi (SKPD) khususnya tenaga perencana, sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan, kapasitas, dan perkembangan SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan



indikator kinerja baik di tingkat Rencana Strategis maupun Rencana Kerja SKPD.

Adapun permasalahan aparatur pemerintah sangat bervariasi. Salah satu diantaranya adalah persoalan budaya kerja. Budaya kerja merupakan aspek penting yang menentukan sikap kerja aparatur pemerintah baik itu kinerja, kepuasan kerja, maupun tingkat kemangkirannya (Luthans 1989). Salah satu aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Selaku aparatur pemerintah, disiplin kerja juga telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat semua kewajiban, larangan, dan sanksi jika melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban. Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut. Laitener & Levine (dalam Riwukaho 1987) mengindikasikan gejala disiplin itu dengan gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat apabila para pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati sesuai prosedur yang ditetapkan, apabila mereka menghasilkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang ditentukan.

Indikator disiplin kerja aparat pemerintah dapat meliputi : *pertama*, frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan pulang kerja; *kedua*, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan bahan-bahan dan alat-alat kantor; *ketiga*, kualitas dan kuantitas hasil kerja; *keempat*, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang ditentukan; *kelima*, Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

1.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2015 dan Tahun 2016

Secara umum kondisi perekonomian bergantung pada kondisi internal dan kondisi eksternal dari daerah atau wilayah tersebut. Kondisi internal adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah tersebut yang penyebabnya berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sehingga kondisi internal terbentuk karena kejadian di dalam wilayah itu sendiri. Dengan kata lain kondisi ini terbentuk dari dalam wilayah itu sendiri.



Kondisi internal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Pertama hasil pertambangan dan penggalian Kabupaten Kutai Timur yang cukup baik. Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian Kabupaten Kutai Timur dan bahkan dari tahun ke tahun meningkat persentase kontribusi terhadap PDRB. Sektor pertanian menduduki urutan kedua namun persentasenya masih kecil terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian (agribisnis) dapat diupayakan secara berkesinambungan agar menjadi tumpuan setelah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan) tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga untuk kebutuhan nasional dan internasional. Hasil pertanian pada tahun 2012-2013 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan khususnya padi sebagai pangan utama. Pada tahun 2013 meningkat sebanyak 1.325 ton dibanding tahun 2012 meskipun perluasan lahan tanam padi menurun. Sementara hasil komoditi perkebunan berupa kelapa sawit, karet dan coklat menjadi komoditi unggulan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi dan perluasan lahan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012. Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2012-2013 bertambah seluas 52.381,06 Ha atau meningkat 16,19 persen dengan peningkatan produksi 793.769,27 ton atau meningkat 31,43 persen. Peningkatan produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi kelapa sawit yang meningkat sebesar 795.238,65 ton atau 31,56 persen dengan proporsi penyerapan tenaga kerja sebesar 68.693 orang atau 86,41 persen dari jumlah tenaga kerja di sub sektor perkebunan. Sehingga pada tahun 2014 dan 2015 diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan program-program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menuju visi pembangunannya. Hal ini mengindikasikan bahwa agribisnis menjadi harapan di masa mendatang mengingat sumber daya alam bersifat tidak terbarukan.

Kedua SDA yang melimpah dan luasnya wilayah baik daratan maupun perairan, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan (pro ekologi) maka hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur adalah perkembangan perekonomian regional Provinsi Kalimantan Timur dan perekonomian nasional, mengingat bahwa 70 persen



kekuatan fiskal Kabupaten Kutai Timur bertumpu kepada alokasi transfer pusat ke daerah melalui penerimaan dana perimbangan, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 seperti asumsi dasar ekonomi makro yang mempengaruhinya yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, harga minyak, produksi minyak nasional, inflasi dan kebijakan energi nasional seperti pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Potret ekonomi Kabupaten Kutai Timur 2014 dan tahun 2015 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Pada tahun 2014, krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan terutamanya dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan telah membaiknya kondisi ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta pulihnya perekonomian China dan India, yang antara lain ditunjukkan dengan terjadinya: i) perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa, ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja ekonomi China yang didukung kinerja manufaktur, iii) peningkatan kinerja ekonomi China yang didukung kinerja manufaktur yang ekspansif, dan iv) perbaikan perekonomian India yang ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri, sehingga ekonomi dunia pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari kondisi perekonomian tahun 2013 (RKP Tahun 2015).

Kondisi perekonomian daerah masih sangat rentan terhadap pertumbuhan dan kondisi makro ekonomi nasional. Bila perekonomian nasional menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif, maka akan memberi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya. Dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut maka turut berpengaruh terhadap perekonomian daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2015 yang tertuang dalam RKP, pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,8 persen, inflasi ditargetkan pada kisaran antara 3,0 persen hingga 5,8 persen, jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 5,0 persen, serta tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen.

Kondisi internal Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pertambangan batu bara. Sedangkan kondisi eksternal dipengaruhi oleh: *pertama* kondisi perekonomian nasional, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, melambatnya laju perekonomian



negara-negara maju dan berkembang, naik-turunnya harga minyak, serta hal-hal lain yang berdampak pada perekonomian global. Sebab seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia sangat terkait dengan negara-negara luar. *Kedua* melihat perkembangan integrasi dunia atau yang lebih dikenal dengan globalisasi, maka hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi persaingan pasar di dalam negeri maupun persaingan pangsa pasar di luar negeri atas produk Indonesia. *Ketiga*, pemberlakuan AC-FTA (*Asean-China Free Trade Area*) merupakan awal pasar bebas dalam lingkup yang lebih luas. *Keempat*, menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang dikenal dengan *Asean Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. Oleh karena itu AC-FTA dan AEC ini harus direspon dengan mempersiapkan produk yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi. Hal ini dikarenakan bukan hanya pasar barang saja yang bersaing, tetapi juga persaingan akan perekrutan tenaga kerja atau tenaga ahli.

Salah satu aspek yang turut mempengaruhi prospek perekonomian lokal diantaranya adalah dunia usaha swasta yang turut memberikan kontribusi yang tidak kecil adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Pada tahun 2013 produksi batubara mencapai 74 juta ton per tahun. Kondisi produksi KPC tahun lalu telah mencapai 64 juta ton. Pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan masih akan mengalami peningkatan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan royalti 13,5 persen yang diperoleh pemerintah provinsi dan wilayah produksi batu bara yakni Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan MP3EI koridor Kalimantan Timur, hingga tahun 2013, upaya percepatan implementasi kegiatan ekonomi MP3EI di KE Kalimantan difokuskan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian barang hasil tambang termasuk pemenuhan kebutuhan infrastrukturnya. Selain itu, upaya percepatan juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di KPI Kutai Timur, dimana terdapat usulan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dengan Pelabuhan Maloy yang menjadi infrastruktur utama di KE Kalimantan.

Perkembangan KPI-KPI prioritas KE Kalimantan, untuk KPI Kutai Timur bahwa PT. KPC - Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara sampai dengan 70 juta ton/tahun pada Desember 2011 Bengalon BLF (Barge Loading Facility) and Crusher Upgrade mulai beroperasi; PT. MEC - eksplorasi penambangan batubara Muara Wahau sedang dalam pembebasan lahan untuk jalur pengangkutan dengan kereta api.



Sementara untuk infrastruktur utama, Pelabuhan Maloy berada di Kabupaten Kutai Timur dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. Pengembangan kapasitas pelabuhan Maloy bernilai investasi sebesar Rp. 4.800 Miliar yang berasal dari APBN. Pengembangan kapasitas pelabuhan Maloy sangat mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy yang berbasis industri *oleochemical*.

KPI Kutai Timur memiliki pengembangan ekonomi berbasis kawasan industri dan sedang tahap penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK). Investasi ini di KPI Kutai Timur terdiri atas sektor batubara, kelapa sawit dan perikanan dengan nilai investasi sebesar Rp.54.344 Miliar. Rencana pembangunan infrastruktur berbasis kawasan memberikan peluang besar bagi peningkatan investasi di KPI Kutai Timur. Pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KPI) Maloy menjadi bukti dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan percepatan pembangunan ekonomi. Keberadaan KPI Maloy akan menjadi gerbang pembangunan ekonomi Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan pada umumnya, yang akan terhubung langsung dengan perdagangan internasional. Pembangunan infrastruktur di KPI Kutai Timur akan berdampak pada akses dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah.

Sejumlah pembangunan fisik yang terkait dengan infrastruktur perhubungan diharapkan akan dapat membuka prospek pembangunan dan mengurangi keterbelakangan akses. Sejumlah proyek yang masuk MP3EI di Kabupaten Kutai Timur dan sekitarnya antara lain pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, PLTU Mulu Tambang 2 X 100 MW di Songatta, termasuk pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan rel kereta api dari Muara Wahau hingga Lubuk Tutung (130 km), kemudian dilanjutkan dari Lubuk Tutung - Maloy sepanjang 8 km.

Tabel 3. 3
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) di Kabupaten Kutai Timur

NAMA PROYEK/LOKUS		NILAI INVESTASI (Milyar Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
TRANSPORTASI				
A PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN				
Free Way Bontang - Songatta 40 Km			APBN/APBDProv	
Free Way Songatta - Maloy 130 Km			APBN/APBD Prov	
Pembangunan Jalan Ery Superjan - Kenyamukan		144,2	APBD Prov (Bankita)	Jalan akses menuju



NAMA PROYEK/LOKUS		NILAI INVESTASI (Milyar Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
				Pelabuhan Sangatta
	Pembangunan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung	163,5	APBD Prov (Bankeu)	
	Peningkatan Jalan Yos Sudarso I-III-IV	180,0	APBN	Ruas Jalan Nasional yang melintasi dalam Kota Sangatta
B	PRASARANA PERHUBUNGAN			
	PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT			
	Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan)			
	Pembangunan <i>Causeway</i>	15	APBN	TA. 2011
	Pembangunan <i>Trestle</i>	21,3	APBN	TA. 2011
	Pekerjaan Reklamasi dan <i>Causeway</i>	271,3	APBN	TA. 2012
	Pekerjaan Dermaga	282,2	APBD Kab. dan Prov.	TA. 2012-2014
	Pekerjaan Bangunan Penunjang Wilayah Darat	420,4	APBN	TA. 2012-2014
	PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA			
	Pembangunan/ perluasan Bandara Sangkima di Kabupaten Kutim	350	APBN	Untuk mendukung akselerasi ekonomi daerah dan keg.TNI
	Pembangunan Bandara Wahau Di Kabupaten Kutim	350	APBN	
C	PENGENDALIAN BANJIR			
	Peningkatan Drainase dan pembangunan Folder sepanjang 42,5 Km di kota Sangatta	541	APBN/APBD Prov.	TA. 2012-2014
D	IRIGASI			
	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier di 3 Bendung sepanjang 58,2 Km	36	APBN/APBD Prov.	Untuk mendukung program <i>Food Estate</i>
	KEGIATAN EKONOMI LAINNYA			
A	FOOD ESTATE			
	Pencetakan lahan sawah seluas 4000 Ha	69,3	APBN/APBD Prov	
JUMLAH USULAN		2.844	[tidak termasuk Free Way]	

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhitung sejak 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut UU Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Kontribusi BPHTB terhitung 1 Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2014, diharapkan mampu meningkatkan sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Dengan pelimpahan ini, diharapkan pembangunan di daerah akan terbantu dan masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Namun, konsekuensinya, pemerintah kabupaten harus menyediakan (1) sarana dan prasarana, (2) sumberdaya manusia, dan (3) payung hukum berupa Perda yang menjadi landasan hukum bagi pemungutan pajak.

Di lain pihak dengan adanya pelimpahan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah tentunya akan menimbulkan dampak, diantaranya:

1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena pemerintah daerah tentunya lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat;
2. Pemda diharapkan lebih memiliki keberanian dalam melakukan penyesuaian NJOP karena penentuan NJOP yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dinilai masih banyak yang *under value*;
3. Pemberdayaan *local taxing power* melalui kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian perlu juga dicermati bahwa dengan PBBP2 yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maka otomatis pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya baik biaya untuk investasi awal maupun biaya operasional per tahun sehingga perlu dilakukan kajian *cost and benefit* yang optimal.

1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih jelas. Pembangunan nasional yang bersifat inklusif, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mengutamakan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Adanya kejelasan dimensi kewilayahan, sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien, efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah



pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD.

Implikasi langsung otonomi daerah telah mengubah pola pengelolaan administrasi pemerintahan dan fiskal di Indonesia yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi menciptakan keluasaan alokasi APBD untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut, kebutuhan terhadap dana untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah menjadi kewenangan daerah juga meningkat. Pemerintah pusat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan asas *money follows function* sebagai upaya untuk mendukung pembiayaan berbagai urusan dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah. Tujuan utama dari perimbangan keuangan tersebut adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah serta diikuti dengan pemberian kewenangan dalam hal perpajakan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh: a) pemerintah yang mampu melakukan pengawasan dan *law enforcement*; b) adanya sumber daya manusia yang kuat pada jajaran aparatur pemerintah daerah; c) serta adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi semakin besar terutama untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pembenan layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik, sinergitas pembangunan kebijakan antara pusat dan daerah maupun antar daerah.



1.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Namun dana alokasi pusat juga tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan obyek baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut dan bahkan banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai kendala di atas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur beberapa ketentuan baru diantaranya:

1. Perluasan basis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh daerah

Perluasan basis pajak dan retribusi dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Berdasarkan hal tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, pengalihan dari pajak pusat ke daerah serta menambah jenis pajak baru. Misalkan pajak hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan hotel, pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Beberapa pajak baru bagi Kabupaten, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan pajak sarang burung walet sebagai pajak kabupaten.

2. Penambahan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Daerah diberikan peluang untuk menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penambahan jenis retribusi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang



dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

4. Perubahan mekanisme pengawasan terhadap pungutan daerah dari sistem represif menjadi sistem preventif.

Setiap Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi, sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Sebaliknya, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur dan rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

- a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi:
 1. Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
 2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.
 3. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun 2016.
 4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan pendekatan sistem.



5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
- b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang lain, melalui:
 1. Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan.
 2. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.
 3. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.
 4. Peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
 5. Pengembangan sistem yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu perlu menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan meminimalkan terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan melalui:

- a. Penyusunan naskah akademik yang memadai sebelum dilakukan penyempurnaan terhadap perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- b. Evaluasi berkala atas dampak ekonomi dan sosial pungutan yang ada.
- c. Reformulasi sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif yang tertuang dalam penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.

1.2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sejak tahun 2008 dana desentralisasi yang dialokasikan dalam APBN dengan nomenklatur anggaran yang dialokasikan ke daerah telah mengalami perubahan dari yang semula "Anggaran Belanja Daerah" menjadi "Anggaran Transfer ke Daerah". Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan filosofi dasar dari otonomi daerah yaitu



bahwa dana desentralisasi yang dialokasikan ke daerah dilakukan berdasarkan prinsip *money follows function*. Pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki kewenangan membelanjakan dan mempertanggungjawabkan anggaran. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk memperluas cakupan dana yang dialokasikan ke daerah, sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah. Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Penyesuaian.

Kebijakan alokasi dana perimbangan diarahkan: a) untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah; b) untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah; serta c) mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance* pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan.

DAU merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah. Proporsi celah fiskal dalam formula DAU harus diperbesar perannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

Reformulasi DAU antara lain dilakukan melalui: a) penetapan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dengan memperhitungkan beban subsidi BBM dan subsidi pupuk sebagai bentuk *sharing the pain* antara Pemerintah dengan



pemerintah daerah; b) penerapan formula DAU secara murni tanpa pengecualian, sehingga tidak perlu penyediaan dana penyeimbang DAU; dan c) peninjauan kembali terhadap bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan pengaturan kembali perhitungan kapasitas fiskal dalam formula DAU.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: a) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; b) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: a) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b) PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a) kehutanan; b) pertambangan umum; c) perikanan; d) pertambangan minyak bumi; e) pertambangan gas bumi; f) pertambangan panas bumi.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 dapat di lihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:



Tabel 3. 4
Realisasi Dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi *				Target/Proyeksi	
		Tahun 2012 (4)	Tahun 2013 (5)	Tahun 2014 (6)	Tahun 2015 ** (7)	Tahun 2016 *** (8)	
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	53.188.370,526.32	65.878.104,032.03		69.071.900.000,00	77.854.208.625,00	
1.1.1	Pajak Daerah	22.904.548.111,25	26.395.511,314.60		24.920.000.000,00	41.780.630.000,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	6.454.706,227.74	8.640.000,843.00		3.131.000.000,00	7.517.578.625,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.151.317,483.96	2.919.390,893.65		3.300.000.000,00	7.260.000.000,00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	205.777.798,703.37	27.924.020,980.78		37.720.900.000,00	21.296.000.000,00	
1.2	Dana Perimbangan	1.907.784,136,345.00	2.164.334,691,439.00		2.444.922.913,000.00	1.918.418.052,625,00	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.582.346,072,345.00	1.698.041,779,439.00		1.893.743,724,000.00	1.452.125,140,625,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	311,465,164,000.00	452,003,282,000.00		585,746,998,000.00	452,003,282,000.00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	13.971,900,000.00	14,289,630,000.00		15,432,190,000.00	14,289,630,000.00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	272,555,914,600.00	424,132,923,720.00		415,296,461,000.00	442,869,033,000.00	
1.3.1	Hibah					20,748,057,000.00	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	226,475,017,000.00	278,371,483,000.00		288,573,000,000.00	356,170,276,000.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian	46,080,897,600.00	33,284,458,000.00		53,952,461,000.00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	58,383,500,000.00			72,771,000,000.00	65,950,700,000.00	
1.3.6	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		1'2'476,982,720.00				
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,233,528,421,471.32	2,654,346,719,191.03		2,929,291,274,000.00	2,489,141,294,250.00	

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

* LRA Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2014

** Target APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

*** Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2016 (Masa Transisi RPJMD 2011-2015)



5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Konsekuensi dari desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada sisi pengeluaran adalah fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah untuk disesuaikan dengan prioritas dan tujuan daerah masing-masing. Wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran adalah dengan pelaksanaan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran niil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian, prioritas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Prioritas Belanja Daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

a) Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja berupa Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD. Gaji



bupati dan wakil bupati dan sebagainya. Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas serta memperhitungkan across gaji. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengalokasikan anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah

b) Belanja Subsidi

Belanja subsidi tahun 2016 digunakan untuk penganggaran subsidi yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dan hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD tahun 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan pada belanja subsidi ditujukan untuk mengurangi harga jual barang/jasa yang dihasilkan perusahaan/lembaga tertentu agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Perusahaan yang menerima belanja subsidi adalah PDAM Kutai Timur sebagai kompensasi pengurangan harga jual yang diwujudkan dalam belanja bahan baku pengolahan air. Selain itu, juga diarahkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA).

c) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.



d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan, dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif. Pemberian bantuan langsung harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Format tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial.

e) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa

Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.



Pemerintah kabupaten mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

f) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kabupaten kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap



program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat. Kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dimaksud untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.

c. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memprioritaskan alokasi belanja modal tahun 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 menetapkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung ideal, yakni dengan memprioritaskan belanja untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sehingga capaian dua belas (12) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, sehingga proporsi belanja langsung dapat terus ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan dapat semakin besar.

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3.5
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi*			Target/Proyeksi		
		Tahun 2012 (4)	Tahun 2013 (5)	Tahun 2014 (6)	Tahun 2015** (7)	Tahun 2016*** (8)	
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Tidak Langsung	738.578.126.326,00	680.248.037.191,00		949.847.375.293,00	1.089.206.773.885,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	424.253.464.107,00	460.655.568.802,00		688.477.375.293,00	928.722.451.247,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	3.059.362.000,00	6.437.564.000,00		8.750.000.000,00	4.300.000.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	92.612.236.200,00	62.931.600.000,00		81.875.000.000,00	31.946.782.500,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	121.085.050.000,00	3.708.900.000,00		11.845.000.000,00	32.276.480.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	96.024.046.239,00	144.020.723.889,00		155.900.000.000,00	98.969.560.138,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.543.967.780,00	2.493.680.500,00		3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
2.2	Belanja Langsung	1.418.753.827.898,10	1.912.803.949.815,00		2.339.116.889.000,00	1.817.085.961.116,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	151.950.769.634,00	181.640.602.247,00		222.830.728.403,00	-	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	510.821.541.790,00	571.861.921.049,00		685.598.494.677,00	-	
2.2.3	Belanja Modal	755.981.516.474,10	1.159.301.426.519,00		1.430.687.665.920,00	-	
2.2.4	Belanja Program Untuk SKPD	-	-		-	1.817.085.961.116,00	
2.2.5	Belanja Multi Years	-	-		-	-	
Jumlah	BELANJA DAERAH	2.157.331.954.224,10	2.593.051.987.006,00		3.288.964.264.293,00	2.916.291.735.000,00	

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015
*) LRA Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2014
**) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
***) Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2016 (Masa Transisi RPJMD Tahun 2011-2015)



5.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk Penyertaan Kembali Pemberian Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

APBD Kabupaten Kutai Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos pembiayaan (penerimaan pembiayaan). Berikut realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini :



Tabel 3.6
Realisasi Dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi *			Target/Proyeksi	
		Tahun 2012 (4)	Tahun 2013 (5)	Tahun 2014 (6)	Tahun 2015 ** (7)	Tahun 2016 *** (8)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	267.987.442.425,35	370.077.454.672,57		389.172.990.293,00	432.150.440.750,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPA)	267.987.442.425,35	370.077.454.672,57		389.172.990.293,00	432.150.440.750,00
3.1.2	SLPA Pelampauan Pendapatan	-	-		-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	32.500.000.000,00	56.409.429.046,00		29.500.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	32.500.000.000,00	39.500.000.000,00		29.500.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	-
3.2.4	Pembayaran Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Perimbangan	-	16.909.429.046,00		-	-
3.2.5	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-		-	-
PEMBIAYAAN NETTO		235.487.442.425,35	313.668.025.626,57		359.672.990.293,00	427.150.440.750,00

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2016

- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015

*) LRA Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2014

**) Target APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

***) Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2016 (Masa Transisi RPJMD Tahun 2011-2015)



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang hendak dicapai pada Tahun 2011-2015 adalah "PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI TIMUR MANDIRI"

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai berikut :

Pembangunan daerah bertumpu pada agribisnis	1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis. 2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya saing, baik ditingkat regional, nasional maupun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
Mandiri	3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 telah ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah.



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya

Guna mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu 2011-2015, telah ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan pada masing-masing Misi, sebagaimana berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa	• Terwujudnya kerukunan hidup beragama; • Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual; • Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni budaya lokal • Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya • Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timur • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya • Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata • Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana dan prasarana olah raga • Tercapainya peningkatan pemuda yang berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja, Pergaulan Bebas dan Miras

MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pemanfaatan tata	• Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan



ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	• Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis • Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi • Terbitnya Perda RTRW • Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW • Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan (<i>Zoning Regulation</i>) • Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan hidup • Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa • Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA • Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintah • Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikasi lahan masyarakat • Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian • Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan • Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan • terciptanya penegakan hukum lingkungan • Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup • Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan • Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan • Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan penelitian

MISI 3 : Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah

Tujuan	Sasaran
Meningkatan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk	• Terselenggaranya tata kerja dan kelembagaan penyuluhan yang berorientasi kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kebutuhan Petani setempat



struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.	• Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (dalam arti luas) • Terciptanya stabilisasi luasan lahan pertanian produktif • Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani • Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama • Tersedianya beberapa desa mandiri pangan • Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang • Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan • Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energi tingkat berat) • Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi • Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung ketahanan pangan • Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan • Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap kecamatan • Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti luas • Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu • Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis • Tersedianya sarana distribusi hasil produksi pertanian • Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran • Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani (temak) • Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan • Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat • Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis



	hasil perkebunan • Tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) perkebunan • Terciptanya iklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif • Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem tangkap dan ikan olahan • Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan • Terpenuhinya kebutuhan produksi ikan untuk konsumsi • Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan • Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah lingkungan • Tewujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/ pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan • Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara optimal • Terlaksananya identifikasi dan monitoring potensi terumbu karang Kabupaten Kutai Timur • Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur • Terciptanya keamanan dan ketertiban perairan • Termanfaatkannya potensi sumber daya lahan dan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan • Tercapainya peningkatan jumlah, kompetensi dan penyebaran penyuluh sesuai standar • Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu dan kemasan terjamin serta berorientasi pasar • Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif



MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya, serta berupaya lebih memeratakan pemenuhan energi bagi masyarakat	• Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan • Terwujudnya pemerataan perkembangan aksesibilitas darat untuk mendukung mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonomi daerah • Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika perkotaan • Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum • Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan angkutan barang • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara • Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektor pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah • Tercapainya peningkatan pengendalian banjir diperkotaan (Menurunnya persentase luasan genangan banjir) • Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan jaringan drainase • Tercapainya peningkatan ketersediaan air baku baik secara kualitas maupun kuantitas • Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat



	• Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi daerah • Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan fasilitas kegiatan sosial masyarakat • Tersedianya listrik pedesaan dan daerah terpencil • Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengoperasian kelistrikan • Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup • Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pemerintahan kecamatan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD

MISI 5 :Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada peningkatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan,	• Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin dalam pembangunan pertanian dalam arti luas • Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin • Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis • Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan • Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan • Tercapainya peningkatan kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan usaha • Tercapainya peningkatan kualitas perumahan bagi



penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana	rumah tangga sasaran • Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sasaran (RTS) • Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan • Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan • Tercapainya peningkatan kontribusi program KB dalam kesejahteraan keluarga • Terbinanya perempuan dan berkembangnya partisipasi dalam pembangunanTerlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan atau Sarana Usaha • Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar panti sosial • Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Panti Sosial • Pelayanan Sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) • Bantuan sosial Korban Bencana pada masa tanggap darurat • Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap darurat • Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi • Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

MISI 6: Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparaturn pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien

Tujuan	Sasaran
Meningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap	• Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif



hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; meningkatkan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog; serta meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat	• Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugas SKPD • Terwujudnya tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait • Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor • Terlaksananya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang Menjamin Peningkatan Profesionalisme Aparatur • Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat • Terwujudnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas, LSM, Paguyuban • Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana • Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta dalam pembangunan politik • Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan yang Efektif • Terwujudnya kemandirian penataan sarana dan Prasarana Kerja Aparatur pada instansi Pemerintah • Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah • Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan investor • Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar • Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan permintaan masyarakat • Terwujudnya kemandirian dan pembinaan mental/spiritual • Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa



	kegiatan khusus dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur • Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> • Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan • Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif • Terpenuhiya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD • Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan • Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan • Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dinamis dan responsive • Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah yang sudah berkekuatan Hukum • Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD • Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pemda • Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih • Terwujudnya kerjasama dan komunikasi dengan daerah lain • Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan para pengusaha • Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam pemberian ijin dan operasi pasar



	• Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi perijinan • Tercapainya peningkatan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah • Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah • Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional • Tersedianya Data Objek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang Akurat • Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

MISI 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta mewujudkan adanya pelayanan prima pada pelaksana teknis penyelenggara kesehatan secara berjenjang	• Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan dasar • Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/ anak, remaja dan lansia • Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan • Tercapainya peningkatan ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan • Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan • Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin • Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan • Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan



	kesehatan lainnya dengan pembangunan RSU yang refresentatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi • Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

MISI 8: Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang

Tujuan	Sasaran
Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah	• Tercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf • Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni • Tercapainya peningkatan sebaran sarana pendidikan • Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS) • Tercapainya peningkatan sistem manajemen pengelolaan sekolah • Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan dan Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif • Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekolah • Tercapainya peningkatan Angka Pendidikan Tamatan/ Angka kelulusan • Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun • Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang pendidikan

MISI 9: Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya

Tujuan	Sasaran
Meningkatan peran lintas sektor terutama	• Tercapainya peningkatan koperasi aktif • Tercapainya peningkatan koperasi sehat • Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR



swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Serta upaya-upaya langsung dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan bentuk intervensi keuangan pada lembaga pemodal	• Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM • Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem pendukung bagi koperasi dan UMKM • Terlaksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan investasi sektor perbankan • Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal yang ditandai berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di kecamatan • Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutai Timur • Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja • Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan • Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja

4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Prioritas program pembangunan tahun 2016 sebagai penjabaran lebih lanjut pencapaian sasaran pembangunan indikatif 1 tahun kedepan tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2011-2015 (masa transisi) melalui perencanaan program dan kegiatan masa transisi yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode 2016-2021 mendatang. Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016, telah memperhatikan hasil evaluasi kinerja dan rancangan ekonomi daerah serta kebijakan keuangan daerah. Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2016 diantaranya memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Penerjemahan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 (Bab X tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan) dalam mencapai visi dan misi kepala daerah melalui tahapan sesuai dengan perundang-undangan.
2. RKPD masa transisi (tahun 2016) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021
3. Mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan prioritas pembangunan Nawacita.



4. Keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Timur.
5. Merespon relevansi isu strategis dan masalah yang faktual bersifat local maupun nasional dan global yang akan dihadapi pada tahun 2016 dengan melalui berbagai analisis capaian pembangunan.

Koneksitas program prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 (tahun transisi 2016) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMD 2011-2015	RKPD 2016
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan kapasitas pemerintahan	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pembangunan pedesaan
4	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
5	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
6	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
7	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman
8	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
9	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Pengelolaan kawasan perbatasan (<i>hinterland</i>)
10	Peningkatan pembangunan perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)
11	Pengelolaan kawasan perbatasan	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
12	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Penentuan prioritas (*top priority*) pembangunan dilakukan dengan cara pembobotan untuk menentukan skor terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan, meliputi: 1) Besaran pengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) Besaran dampak yang ditimbulkan terhadap publik; 4) Besaran daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5)



Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dan 6) Prioritas janji politik Kepala Daerah yang perlu diwujudkan.

Hasil penentuan *top priority*, diperoleh 3 prioritas program pembangunan dengan perolehan skor tertinggi secara berurutan yaitu 1) Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan; 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan; 3) Peningkatan pembangunan pedesaan

Berdasarkan hasil *top priority* tersebut dapat dipilih tema program pembangunan pada RKPD tahun 2016 Kabupaten Kutai Timur yaitu "Peningkatan Daya Saing Keunggulan Daerah Berbasis Agribisnis".

Oleh karena itu penekanan program pembangunan di Kutai Timur pada tahun 2016 yaitu meningkatkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan titik penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berbasis agribisnis berdasarkan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan pembangunan yang mantap guna menuju pencapaian perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur harus mulai bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan keunggulan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam lokal yang didukung dengan infrastruktur yang memadai dan perluasan inovasi teknologi. Adapun sasaran utama yang lebih penting adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (tinggi dan trend positif). Pertumbuhan yang berkualitas mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor pertanian (agribisnis) dan pedesaan. Daerah pedesaan dan sektor pertanian merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi, dengan demikian fokus pada pedesaan dan sektor pertanian dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan berbagai program pembangunan dengan 3 (tiga) prioritas utama yaitu: 1) Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan; 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan; 3) Peningkatan pembangunan pedesaan guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, diantaranya ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, terjadinya peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, tetap terjaganya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter.



Meskipun dengan berbagai keterbatasan, Pembangunan Kutai Timur tetap berkomitmen terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan tetap mewujudkan keberlanjutan kesepakatan *Sustainable Millenium Development Goal's (SMDG's)* untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tahun 2016 sebagai masa transisi pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan momentum yang sangat startegis bagi Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan keberlanjutan komitmen terhadap kesepakatan global SMDGs dengan bekerja lebih keras dan dukungan alokasi anggaran untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat sehingga dengan sendirinya sasaran MDGs dapat dicapai pada waktunya., mengingat pada tahun 2015 merupakan tahun akhir pencapaian RPJMD tahap kedua (2010-2015) Kabupaten Kutai Timur, sedangkan tahun 2016 merupakan tahun awal RPJMD tahap ketiga (2016-2020).

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target keberlanjutan MDGs dengan terus melakukan upaya perbaikan mulai dari perencanaan. Alokasi anggaran yang semakin besar untuk program pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta terus meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan adalah mencerminkan konsistensi komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian SMDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk kawasan perbatasan (*hinterland*).

Selain itu, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, maka perlu meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan nilai tambah. Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, termasuk MEA yang diberlakukan pada akhir 2015. Sekurang-kurangnya terdapat 3 faktor kunci berkaitan dengan pilar daya saing daerah, diantaranya faktor kunci untuk ekonomi faktor-driven dengan pilar antara lain: institusi, infrastruktur wilayah, stabilitas makro ekonomi,



kesehatan dan pendidikan dasar. Pilar daya saing seperti tersebut di atas, khususnya faktor kunci untuk ekonomi faktor-*driven* dengan pilar-pilarnya sangat mirip dengan indikator MDGs (*Millennium Development Goals*), terutama kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Sehingga pada rancangan awal RKPD 2016 penekanan pada daya saing ekonomi dengan berbasis pada: sumberdaya alam, ilmu dan teknologi, dan sumberdaya manusia (SDM) dengan fokus dibidang agribisnis. Pembangunan sumberdaya manusia mencakup seluruh siklus hidup manusia dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Hasil analisis kondisi Indonesia di dalam the WEF GCR Indonesia (tahun 2011) menunjukkan bahwa hambatan (*barrier*) daya saing di Indonesia adalah kesehatan (kematian bayi, malnutrisi, penyakit degeneratif) dan kualitas tenaga kerja (pendidikan dan ketrampilan). Oleh karena itu Pembangunan di Kutai Timur menempatkan titik penekanan pada manusia sebagai pusat pembangunan (*people centred development*) yang didukung dengan pengelolaan keunggulan sumberdaya lokal yang berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur yang memadai di daerah pedesaan yang merupakan sentra agribisnis.

Peningkatan daya saing daerah Kabupaten Kutai Timur selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu meningkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/sektor dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian guna peningkatan nilai tambah produk lokal dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia berkualitas yang didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.

Pembangunan SDM pelaku utama agribisnis melalui kesehatan dan pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan karenanya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif, bukan sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat (*rate of return*). Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah diakui oleh Ranis dan Stewart (1998) dan (2005). Studi sejenis telah banyak dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil proses pendidikan. Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan mengambil data panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002. Berdasarkan studi tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam bidang pembangunan manusia sangat



diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Pembangunan yang berhasil adalah 1) pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkesinambungan (*sustained economic growth*) dan 2) Setiap orang mempunyai kemampuan dan bisa menjadi apa yang mereka inginkan (*to expand what people are able to do and be*). Dengan demikian pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) sebagai kunci pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur sudah tergolong tinggi namun masih mengalami fluktuasi yang signifikan pada tahun-tahun terakhir, dan disisi lain dampak terhadap kemakmuran masyarakat masih belum terbagi secara merata (kesenjangan). Kesenjangan terjadi karena adanya kesenjangan kesempatan (*inequality of opportunities*). Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur harus inklusif memungkinkan setiap penduduk Kutai Timur untuk berkontribusi dan mendapat manfaat. Pendidikan dasar dan kesehatan untuk semua, merupakan prasyarat kondisi untuk pertumbuhan inklusif. Namun pertumbuhan inklusif tidak harus menunggu tuntasnya pemenuhan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan. Secara paralel, pendidikan menengah dan tinggi (*skill formation development*) dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi.

Prioritas Rencana Kerja Program pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dijabarkan berdasarkan fokus penekanan dan agenda adalah sebagai berikut :

Prioritas 1: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Pangan memegang peranan penting bagi kebutuhan suatu bangsa, tanpa pangan negara dapat mengalami kekacauan sosial dan politik. Selain kelembagaan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan juga tidak lepas dari keberhasilan produksi pertanian. Permasalahan ketahanan pangan akan berjalan seiring dengan adanya permasalahan pertanian dan pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan sektor pertanian (BKP-Deptan, 2005). Masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk. Rendahnya kemampuan aksesibilitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan mengancam penurunan konsumsi makanan beragam bergizi seimbang dan aman, yang pada akhir akan berdampak terhadap semakin bertambahnya masalah gizi masyarakat.



Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi (ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.

Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah baik ketersediaan maupun kemudahan akses sehingga terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetitif daerah yang berbasis agribisnis. Pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara perlu lebih memperoleh penekanan.. Kondisi ini diarahkan agar ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan yang bertumpu pada agribisnis, secara bertahap akan mampu dicapai.

Agenda peningkatan ketahanan pangan, lebih diarahkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berdaya saing yang berorientasi pada sektor agribisnis dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil pangan (Nilai Tukar Petani) melalui: 1) Peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian dengan peningkatan ketrampilan pelaku utama produksi pangan (petani, peternak, nelayan dan pembudidaya); 2) Peningkatan ketersediaan pangan melalui produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sistem insentif baru (mulai benih, produksi dan pasca panen); 3) Peningkatan Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; 4) Mengantisipasi adanya penyusutan lahan tanaman pangan; 5) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi, dengan penekanan Dewan Ketahanan Pangan serta 6) Regulasi peredaran pangan, 7) Keberlangsungan pengembangan kawasan agropolitan Maloy dan 8) Pengembangan kawasan pertanian *One Village One Product* (OVOP) yang bervisi peningkatan nilai tambah untuk mendorong percepatan *food estate*. Selain itu perlu; 9) Inventarisasi data potensi pangan utama, lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi.



Prioritas 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Bahkan masalah kesehatan (kematian bayi, malnutrisi, penyakit degenerasi merupakan salah satu halangan (barrier) daya saing masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dapat terwujud.. Berbagai upaya peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di Kutai Timur, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif sebagai pondasi pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis yang berkelanjutan.

Peningkatan aksesibilitas kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebih difokuskan pada: 1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan yankes yang tersedia terutama Gakin; berperilaku PHBS dan sadar gizi serta *universal access & coverage* untuk pelayanan KIA termasuk KB; 2) Percepatan peningkatan UHH dengan intervensi pada prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan balita yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan; 3) Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan (RS) serta tenaga kesehatan antar wilayah; 4) Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawal pertumbuhan penduduk yang tinggi karena kontribusi migrasi dan 5) Revitalisasi posyandu. Selain itu perlu penguatan manajemen data dan informasi yang lebih representatif dan *ter-update*.



Prioritas 3: Peningkatan pembangunan pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Padahal seharusnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan terjadi mekanisme pertukaran sumberdaya yang saling menguntungkan sehingga hubungan yang saling memperkuat ini akan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang (Rustiadi dan Dardak, 2005).

Penduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar (klastering). Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti karakteristik usahatani atau infrastruktur (jalan dan komunikasi). Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk yang bermukim berpencar bertambah, sedangkan lahan usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investasi termasuk investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi, pendidikan maupun kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ternyata berkontribusi besar bagi pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran akhir setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu kawasan pedesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian.

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Pedesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala utama yaitu: masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan (SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah desa dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan yang lebih difokuskan pada upaya-upaya mengurangi kesenjangan akses pembangunan dengan mengatasi kendala kualitas SDM dan infrastruktur pedesaan: yaitu 1) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan, 2) Peningkatan jangkauan telekomunikasi untuk memperluas akses informasi pasar, teknologi dan pembiayaan serta 3) Kemudahan modal usaha kecil (UMKM, koperasi pasar) dan pembiayaan usaha pertanian terutama daerah-daerah tertinggal (Busang, Muara Ancalong, Muara Wahau dan Teluk Pandan), 4) Infrastruktur pedesaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan.



Prioritas 4: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar memberikan pengaruh berganda dalam pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis agribisnis, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja.

Struktur ekonomi Kutai Timur yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber pendapatan daerah dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Timur.

Pada tahun 2016, pembangunan ekonomi bertumpu pada upaya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah yaitu sektor agribisnis (pertanian dalam arti luas). Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang berpotensi dijadikan sebagai sektor unggulan daerah dibandingkan sektor yang lain di luar sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur konsisten bertumpu dan diarahkan menjadi daerah unggulan agribisnis. Hasil-hasil pertanian lokal diupayakan dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, *agrotechno park* (pertanian integratif) dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri pedesaan. Sebab, masalah pertanian tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi



per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pasca panen. Untuk mengoptimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan pengembangan kawasan Agropolitan Malloy.

Sektor Pertanian tanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan hortikultura, padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas unggulan. sektor perkebunan dikembangkan komoditas unggulan yakni kelapa sawit, karet, dan kakau. Sektor peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor kelautan dan perikanan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap. Sedangkan dalam pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) tersebut, perlu didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus, selain meningkatkan nilai tambah dan produktivitas, juga harus tetap diarahkan untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil, koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Guna mewujudkan sektor agribisnis yang tangguh, maju dan efisien sehingga menjadi *leading sector* dalam pembangunan Kutai Timur, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang maju dan efisien. Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian (*on farm agribusiness*) dan kegiatan lainnya dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu agenda, perlu lebih difokuskan pada: 1) pengembangan agroindustry di pedesaan, 2) memperkuat pertumbuhan koperasi dan lembaga keuangan (BPR dan LKM); 3) Kemitraan usaha besar dan kecil dengan skema contract-farming yang saling menguntungkan untuk memperbesar akses pasar serta 4) kemudahan berinvestasi.

Prioritas 5: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya termasuk pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dapat dimiliki oleh pikir setiap orang dan berkontribusi sangat penting untuk memajukan cara ber di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warganegara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global, *Sustainable Millennium Development Goals*



(SMDGs) yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100 persen. Pendidikan yang rendah seringkali dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Keterkaitan pendidikan dan kemiskinan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan ketrampilan. Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan dari SD ke SLTP disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga untuk membiayai anaknya. Menurut Sa'diyah (2012), Bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan diarahkan pada upaya-upaya: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Agenda peningkatan lebih difokuskan pada: 1) Percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui akses pendidikan masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait penduduk migrasi; 2) Peningkatan pendidikan usia dini (PAUD); 3) Peningkatan APM SLTA; 4) Peningkatan APS SLTP dan SLTA; 5) Penurunan angka putus sekolah (SMP dan SMA); 6) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan 7) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak mampu dan 8) Peningkatan sekolah yang terakreditasi dan mutu akreditasi.

Prioritas 6: Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman

Investasi infrastruktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan juga merupakan salah satu faktor berperan penting dalam peningkatan daya saing daerah. Masalah kesehatan dan lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.



Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk percepatan penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskan melalui: 1) Penyediaan akses air bersih dan listrik; serta 2) Penyediaan prasarana sanitasi, terutama penanganan sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman. Selain itu diperlukannya inventarisasi infrastruktur permukiman dan kawasan permukiman tertata.

Prioritas 7 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan daerah yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga secara layak (TNP2K, 2010). Kemiskinan merupakan realitas sosial yang bisa menimpa suatu kelompok masyarakat tertentu karena diltarbelakangi berbagai akar permasalahan. Penanggulangan kemiskinan bukan semata karena kemiskinan itu, namun karena memiliki korelasi sangat kuat dengan berbagai masalah sosial, terutama kriminalitas dan penyakit.

Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Kenyataan dilapangan yang menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutan yang lebih baik (TNP2K, 2011) Oleh karena itu persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu proses pembangunan yang mengikutsertakan dan komitmen semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik.

Kemiskinan berkaitan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, dimana ringginya tingkat kemiskinan (rendahnya pendapatan riil masyarakat) merupakan salah



setu faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatif terhadap IPM. IPM walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia, namun dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang rendah, maka dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga rendah. Agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan cara peningkatan mutu dari pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/keluarga miskin agar dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Agenda penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan kebijakan pengentasan kemiskinan lebih diarahkan untuk peningkatan mutu SDM dan kemandirian ekonomi keluarga miskin di daerah pedesaan dan sektor pertanian yang merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi, dengan melalui: 1) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan), 2) Pengembangan dan pemanfaatan sistem perlindungan sosial; 3) Peningkatan kemampuan [ketrampilan] melalui pendidikan; 4) Kemudahan berinvestasi untuk perluasan penyerap tenaga kerja penduduk lokal (ber KTP Kutai Timur) yang berorientasi sektor pertanian; 5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPD untuk membuat terobosan/inovasi dalam membuat program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan maupun pengangguran yang berbasis pada problem-problem bersifat lokal.

Pengentasan kemiskinan memerlukan komitmen dan kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemasaran maupun perlindungan usaha. Di samping itu, juga memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang kondusif. Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan, etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.



Prioritas 8: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Perkembangan suatu wilayah, seringkali berhubungan koneksitas dengan wilayah lain. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi, termasuk koneksitas antar wilayah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian dalam upaya meningkatkan daya saing tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran produk pertanian, terutama produk tanaman makin sensitif dan dominan dalam struktur biaya akhir sehingga menimbulkan erosi terhadap daya saing komoditas pertanian. Keluarga miskin di pedesaan dan penduduk pedalaman (daerah tertinggal) tidak akan mampu ikut menikmati dampak pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur wilayah.

Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan yang lebih diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur koneksitas berbagai wilayah pusat pertumbuhan (*connecting growth poles*) dalam meningkatkan menunjang daya saing agrobisnis melalui: 1) Pemerataan akses transportasi terutama di pedesaan, termasuk daerah terpencil (*remote areas*); 2) Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan jalan-jalan dalam rangka membuka akses sosial dan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan sentra perekonomian di beberapa wilayah penyangga ibukota kabupaten.

Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga perlu diperhatikan. Jalan penghubung untuk mempercepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota dan kabupaten yang merupakan sentra produksi pertanian dan perikanan, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan terminal serta angkutan pedesaan juga diutamakan agar mempermudah akses masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.

Prioritas 9. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Penguasaan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap teknologi yang masih rendah dan keterbatasan infrastruktur adalah dua faktor utama yang menyebabkan keteringgalan kawasan tersebut dari kawasan lainnya. Padahal kawasan perbatasan menjadi beranda depan daerah. Namun disisi lain *Hinterland* adalah daerah pedalaman yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan



daerah *Hinterland* cukup penting dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat lokal. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang sebagian wilayah masih merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah pembukaan isolasi wilayah dan pembangunan sarana kewilayahan.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*), kebijakan diarahkan pada pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas pada informasi dalam hubungan pengembangan ekonomi lokal, difokuskan untuk mendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan dan pedalaman) dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan mengurangi kesenjangan dan keterbatasan infrastruktur sosial ekonomi melalui: 1) Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya (air bersih dan jalan) untuk mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*), dan 2) Penguatannya "Integrated Rural Development (IRD) yang bertumpu pada aktivitas utama sector pertanian.

Prioritas 10. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)

Pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai berbagai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi SPM dan kualitas yang diharapkan, dimana salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Demikian juga opini BPK terhadap kinerja keuangan daerah yang masih diperlukan pembenahan. Oleh karena itu Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penata kelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man on the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.

Agenda peningkatan kapasitas pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip *good government* dan pelaksanaan *e-government*. Dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan, kegiatan perlu lebih difokuskan pada: peningkatan kapasitas pemerintahan, pada upaya-upaya. 1) Menegakan perda, 2) Meningkatkan kualitas layanan prima; 3) Mengoptimalkan layanan pengadaan sistem elektronik, 4) Mendorong SKPD melaksanakan SPM, 5) Perbaikan penyusunan laporan keuangan,



dan 6) Optimalisasi pelayanan perijinan satu atap. Selain itu, perlu dilakukan pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasi data Perda.

Disamping itu diperlukan pengembangan/pengkaderan sumberdaya manusia dalam organisasi (SKPD) khususnya tenaga perencana, sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan, kapasitas, dan perkembangan SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan indikator kinerja baik di tingkat Rencana Strategis maupun Rencana Kerja SKPD.

Prioritas 11: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup

Kabupaten Kutai Timur dalam bidang lingkungan hidup memiliki dua wajah yang berbeda. Di satu sisi kabupaten ini dikenal dengan sumberdaya alamnya, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak, yang sangat melimpah. Sumberdaya tersebut berada di daratan maupun di perairan (laut, sungai dan danau). Akan tetapi di sisi lainnya sumberdaya yang kaya tersebut pada umumnya merupakan ekosistem yang relatif rentan (*fragile*) dengan daya pertahanan (*resistance*) dan kemampuan lenting (*resilience*) yang rendah terhadap segala bentuk pemanfaatan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya (*carrying capacity*). Terlebih lagi secara klimatis dan fisiografis juga ada faktor pendorong lainnya, yaitu curah hujan di Kabupaten Kutai Timur yang relatif tinggi, serta di beberapa tempat topografi bergelombang hingga curam.

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup



mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk 1) menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah; 2) pengaturan zona rencana pola ruang; 3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten serta, 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk: (1) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (2) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (3) mendorong pengembangan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan; (4) mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (5) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (6) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (7) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup ;8) mengembangkan hutan kota serta 9) Kawasan ruang terbuka hijau..

Fokus kebijakan dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih, reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Dalam hal penataan ruang disamping percepatan penyelesaian revisi perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), perlu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional.

Prioritas 12 : Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi yang berbasis agrobisnis. Namun disisi lain minimnya jumlah perpustakaan yang dimiliki Pemda dan jangkauan telekomunikasi masih seringkali



menjadi penghambat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi. Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu, instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar. Namun demikian berbagai hambatan dan kendala, masih ditemukan, diantaranya . TIK masih dipandang sebagai *cost center* dan bukan sebagai *long term investment* sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya secara jelas. Selain itu, faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan fokus kegiatan melalui: 1) Peningkatan budaya baca dan kesadaran masyarakat tentang lptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaan yang merata, 2) Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media) ke masyarakat terutama daerah perdesaan dan tertinggal, dan 3) Penyempurnaan sistem pelayanan publik

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
1	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Sosial			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial	50.25%	Dinsos
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	81.83%	Dinsos
		Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terbiaya	Meningkat	Dinsos



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan pandi asuhan/ pandi jompo	Jumlah pandi asuhan/ pandi jompo yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	Meningkat	Dinsos
		Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan jaminan kesejahteraan sosial	Meningkat	Dinsos
		Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kecepatan Tanggap darurat: a. Bantuan Sosial korban bencana b. Sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkat	Dinsos
		Ketenagakerjaan			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat	Disnakertrans
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Kesempatan kerja	Meningkat	Disnakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	3,75%	
			Angka Pengangguran	3,68	
			Rasio penduduk yang bekerja	96,37	
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio serikat buruh/perusahaan	Meningkat	Disnakertrans
		Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	Perjanjian kerja dari perusahaan	Meningkat	Disnakertrans
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)	Jumlah peserta BLK Mandiri	Meningkat	Disnakertrans
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)	Rasio ketergantungan	33,45	Disnakertrans
		Pemberdayaan Masyarakat			
		Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan	Rasio penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk	Menurun	Bopemas
			Jumlah keluarga miskin yang berusaha di agribisnis	Meningkat	
		Ketranamigrasian			
		Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi	Penempatan transmigrasi		Disnakertrans
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS binaan	Meningkat	BPPKB
		Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkat	BPPKB
		Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkat	BPPKB
		Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) / Penyediaan dukungan operasional IMP	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)	Meningkat	BPPKB
		Ketahanan Pangan			
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		BKPP
			Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	10 - 19 Juta	
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Pendidikan			
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD per kecamatan	Meningkat	Disdik
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga pendidikan non formal	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang lulus uji kompetensi	Meningkat	Disdik
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	akreditasi sekolah	Meningkat	Disdik
		Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A	Minimal 99%	Disdik
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	Minimal 97%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) MA/SMK/MA/ Paket C	78.63%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	minimal 97.30%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	Minimal 76%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket	70%	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 82.56%	
			Angka melek huruf	98.00%	
			Angka rata-rata lama sekolah	9.02	
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SD)	57.95%	
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMP)	51.22%	
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMA/ SMK)	52.48%	
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Minimal 95%	
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0.05%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,17%	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,17%	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Minimal 99%	
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Minimal 99%	
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Minimal 95,55%	
			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Minimal 97,5%	
			Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SL/D-IV	60,79%	
		Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Jumlah peserta didik inklusi		Disdik
		Perpustakaan			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan	Kantor arsip
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat	
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat	
			Jumlah perpustakaan keliling	Meningkat	
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan			
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkat	Dinkes
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pusya per satuan penduduk	Minimal 0,45	Dinkes
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kasus keracunan	Menurun	Dinkes
			Kasus kadaluarsa obat dan makanan	Menurun	
			obat dan makanan tidak layak eder	Menurun	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RHBS Masyarakat		Dinkes, RSUD
			Angka usia harapan hidup	72,41	
			Rasio posyandu per satuan balita	1237	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	Dinkes, RSUD
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah tangga bersantasi	Meningkat	Dinkes
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Minimal 70%	Dinkes
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80%	RSUD
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas 24 jam (rawat inap) dan UGD	Meningkat	Dinkes
			Cakupan puskesmas	Minimal 105,56 %	
			Cakupan puskesmas pembantu	78,15%	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah sakit tersreditasi dengan 12 jenis pelayanan minimal	Meningkat	RSUD
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Meningkat	RSUD
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan layanan nakes profesional	Meningkat	RSUD
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %	Dinkes
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	
			Angka kelangsungan hidup bayi	95,67	
			Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %	
		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Minimal 55 %	Dinkes
		Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Minimal 0,02	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkat	Dinkes
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74	Dinkes
			Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Jumlah KB mandiri	Meningkat	BPPKB
		Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Bina keluarga Balita	Meningkat	BPPKB
		Program PIK - KRR			BPPKB
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%	BPPKB
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%	
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	35% - 50%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	
			Rasio KDRT	Menurun	
			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	
		Program Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	87.11	BPPKB
			Cekupan peserta KB aktif	87.11	
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/d 3 anak	
		Program Penguatan KKB	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	20.93%	BPPKB
		Kependudukan			
		Program Keluarga Berencana			Discapil
4	Peningkatan Sarana dan prasarana Perhubungan	Perhubungan			
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	pembangunan Terminal	13	Dishub
			jembatan timbang		
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas ULAJ	Rasio panjang jalan rusak/total panjang jalan		Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Angkutan Umum Darat	98.631	Dishub
			Angkutan Umum Laut/ Udara	624	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan darat	0.79	Dishub
		Program peningkatan dan pengemaran lalu lintas	Pengadaan marka jalan, pagar, rambu		Dishub
		Program peningkatan kelengkapan pengoperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Maksimal 1 hari	Dishub
			Rasio jin trayek	0.13	
			Jumlah uji kir angkutan umum	383	
			Kepemilikan KIR angkutan umum	Meningkat	
5	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Ketahanan Pangan			
		Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan	Jumlah penerapan TTG	Meningkat	BKPP
			Produktivitas hasil pertanian per satuan luas	Meningkat	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	55.410	BKPP
			Regulasi ketahanan pangan	Ada	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
			Daerah rawan pangan	Menurun	
			Lumbung pangan	Meningkat	
			Desa mandiri pangan	Meningkat	
		Pertanian			
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	produksi padi (ton)	50.372	Distan, Disbun
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Nilai tambah hasil pertanian/perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	7,39%	Distan, Disbun
			Kontribusi sektor pertanian (pelawija) terhadap PDRB	1,43%	
			Kontribusi sektor perkebunan (tanaman karet) terhadap PDRB	2,40%	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan kapasitas (TOT) SDM penyuluh	Meningkat	Distan, Disbun
			Fasilitas penyuluhan	Meningkat	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	kasus penyakit ternak	Menurun	Distan, Disbun
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi ternak/daging	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	56 kw/ha/tahun	Distan, Disbun
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	TTG peternakan	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Perluasan lahan perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
			Diversifikasi tanaman perkebunan berorientasi pasar	Meningkat	
		Program Peningkatan Perlindungan Tanaman	Hama dan penyakit	Menurun	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan	Rasio lahan produktif	Meningkat	Distan, Disbun
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rasio jumlah SDM pertanian/perkebunan per kecamatan		Distan, Disbun
			Cekupan bina kelompok petani	100%	
		Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan	Tersedianya kecukupan informasi perkebunan	Meningkat	Distan, Disbun
5	Peningkatan Pembangunan Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan tiap desa	Meningkat	Bapemas
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Bapemas
			PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
			Posyandu aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Jumlah dan jenis pelatihan untuk aparatur pemerintah desa	Meningkat	Bapemas
			memiliki APBDes	Meningkat	
			memiliki RPJMDes	Meningkat	
7	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kemudahan pemberian pinjaman usaha bagi UMKM	Meningkat	Diskop
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Meningkat	Diskop
			Jumlah Koperasi yang menyelenggarakan RAT	Meningkat	
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)	Jumlah pelatihan bagi SDM UKM	Meningkat	Diskop
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	Persentase masyarakat yang menjadi anggota koperasi per kecamatan	Meningkat	Diskop
		Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah		Meningkat	Diskop
		Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri		Meningkat	Diskop
			Jumlah UKM non BPR/LKM	Meningkat	
			Jumlah BPR/LKM	Meningkat	
		Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi	Rasio tenaga pendamping/jumlah usaha kecil dan koperasi	Meningkat	Diskop
		Penanaman Modal Daerah			
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	BPMD
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	BPMD
		Program Penyajian potensi sumberdaya, sarana dan prasana daerah	Buku panduan investasi daerah	Meningkat	BPMD



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
			Adanya informasi potensi investasi daerah	Meningkat	
		Pariwisata			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Buku dan brosur panduan wisata daerah	Meningkat	Disparpor
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	Disparpor
			Kunjungan wisecawan	Meningkat	
			Jumlah obyek wisata	meningkat	
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah MOU dengan perusahaan pada industri pariwisata	Meningkat	Disparpor
		Kelautan dan Perikanan			
		Program Peningkatan Kerjasama	Jumlah MOU dengan pihak terkait	0,25%	Diskanlaut
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	pendapatan per kapita masyarakat pesisir	65,64%	Diskanlaut
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah tenaga penyuluh di daerah pesisir	77%	Diskanlaut
			Jumlah dan jenis penyuluhan di daerah pesisir	Meningkat	
		Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah peserta sosialisasi tentang kesadaran dalam pendayagunaan sumberdaya laut	80,26%	Diskanlaut
		Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Meningkat	Diskanlaut
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	100%	Diskanlaut
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya produksi ikan tangkap	Meningkat	Diskanlaut
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Konsumsi ikan	47,20%	Diskanlaut
		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	85%	Diskanlaut
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi perikanan kelompok nelayan	85,02%	Diskanlaut
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkat	Diskanlaut
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Jumlah sumberdaya perikanan	Meningkat	Diskanlaut
		Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah ijin usaha perikanan	Meningkat	Diskanlaut
		Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah wilayah pesisir dan pulau yang tertangani	Meningkat	Diskanlaut
		Perdagangan			
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	8,44	Disperindag



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Dalam Negeri	PDGB		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Volume transaksi perdagangan industri kecil dan menengah		Disperindag
		Industri			
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor IKM terhadap PDGB	5.96%	Disperindag
			Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	Minimal 1	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu USD)	7.114.992	Disperindag
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penyuluhan terhadap konsumen	Meningkat	Disperindag
			Diseminasi informasi produk yang aman		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemetaan kawasan industri	Meningkat	Disperindag
		Kebudayaan			
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Meningkat	Disporpar
		Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Kunjungan wisata budaya	Meningkat	Disporpar
			Jumlah obyek wisata budaya	Meningkat	
		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Meningkat	Disporpar
		Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya	Laporan evaluasi Keanekaragaman Budaya	Meningkat	Disporpar
		Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	14 kali	Disporpar
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		
			Jumlah gedung Kesenian	3	
		Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Disporpar
		Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat	Jumlah kekayaan budaya yang dikelola masyarakat	100%	Disporpar
		Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	kerjasama budaya antar daerah		Disporpar
		Pemuda dan Olah Raga			
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
			Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
		Program Peminaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	3	Disporpar
		Pamantauan Kegiatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
			balai remaja per 1000 penduduk remaja	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	
		Program Pembinaan Olahraga Berbakat	Jumlah organisasi olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi saat ini	Disporpar
8	Peningkatan Kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)				
		Pendidikan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disdik
		Kesehatan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan nakes	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dinkes, RSUD
		Perhubungan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dishub
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Meningkat	Dishub
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan	Meningkat	Dishub
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dishub
		Arsip			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Kantor arsip
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Kantor arsip



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan	Meningkat	Kantor arsip
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Kantor arsip
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	Meningkat	Kantor arsip
		Pemberdayaan Perempuan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cekupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan perempuan	Meningkat	BPPKB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPPKB
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan	Meningkat	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya sertifikasi dan standarisasi mutu kelembagaan	Meningkat	
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah pelatihan dan kunjungan kerja	Meningkat	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Raker	Meningkat	
			Jumlah kunjungan kerja		
			Inspeksi Kepala Daerah		
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	SPJ lengkap dan tepat waktu	Meningkat	
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Laporan capaian kinerja dan keuangan entitas akuntansi dan pelaporan	Meningkat	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut temuan inspektoret	Menurun	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemendes dan aparatur pengawasan	Sertifikasi pelatihan audit	Meningkat	
		Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah aduan yang ditangani		
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MDU antar daerah	Meningkat	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah Perda	Meningkat	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah PAD	Meningkat	
			Serapan anggaran		
		Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri	Jumlah MDU dengan lembaga dalam negeri		
		Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri	Jumlah MDU dengan lembaga dalam negeri	Meningkat	
		Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	Jumlah MDU dengan lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	Meningkat	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah peserta diklat eselon	Meningkat	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Rasio pengajuan perijinan/ perijinan yang diterbitkan	Meningkat	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Cakupan wilayah program/ kegiatan pemerintahan desa	100%	
		Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jumlah pelanggaran hukum dan HAM	Menurun	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Cakupan wilayah program/ kegiatan pemerintahan daerah	Meningkat	
		Program Koordinasi, Sinkronisasi Fasilitas dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkat	
			Peningkatan pendapatan per kapita	Meningkat	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Diklat teknis dan tupoksi	Meningkat	
			Tingkat kelulusan sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Meningkat	
		Program Peningkatan Pelayanan Riwal/ Keagamaan	Poperta Lomba MTQ		
		Program Pengembangan Pendidikan	Jumlah Diklat		
			Jumlah Widyaiswara		
			Jumlah kurikulum		
		Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah riset	Meningkat	
			Jumlah peneliti		
		Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Adanya standarisasi harga satuan dasar		
			Adanya standarisasi harga satuan pokok kegiatan		
		Sosial			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Dinsos
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Dinsos
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Dinsos
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Dinsos
		Tenaga Kerja			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disnakertrans
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disnakertrans
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Disnakertrans
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disnakertrans
		Perdagangan, Industri			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang industri dan perdagangan	Meningkat	Disperindag
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan ijin usaha	Meningkat	Disperindag
		Perikanan dan Kelautan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Diskantaut
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Diskantaut
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perikanan dan kelautan	Meningkat	Diskantaut
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Diskantaut
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		100%	Diskantaut
		Penanaman Modal			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPMO
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPMO
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	BPMO
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal	Meningkat	BPMO
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPMO
		Koperasi dan UKM			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Diskop
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Diskop
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang koperasi dan UKM	Meningkat	Diskop
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Meningkat dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Diskop
		Pertanian			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Distan, Disbun
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pertanian	Meningkat	Distan, Disbun
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Distan, Disbun
		Ketahanan Pangan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BKPP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BKPP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan	Meningkat	BKPP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BKPP
		Pemberdayaan Masyarakat			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bapemas
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bapemas
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat	Meningkat	Bapemas
		Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bakesbang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bakesbang
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kehadiran	Meningkat	Bakesbang
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kesbangpol	Meningkat	Bakesbang
		Kependudukan dan Catatan Sipil			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Discepi
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Discepi
		Pekerjaan Umum			



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	DPU
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum	Meningkat	DPU
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			DPU
		Perencanaan Pembangunan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Bappeda
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Bappeda
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan	Meningkat	Bappeda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Bappeda
		Lingkungan Hidup			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BLH
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BLH
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang LH	Meningkat	BLH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BLH
		Pertanahan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan	Meningkat	BPLTR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	BPLTR
		Kehutanan			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat		Dishut
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan		Dishut
		Energi dan Sumberdaya Mineral			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkat	Distamben
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkat	Distamben
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang ESDM	Meningkat	Distamben
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Distamben
		Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan layanan masyarakat		Disporpar



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	Cakupan sarana dan prasarana aparaturnya yang memadai	Meningkat	Disporpar
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	Jumlah Pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata	Meningkat	Disporpar
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat	Disporpar
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program pemeliharaan kontribus dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat	Bakesbang
			Jumlah Unmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keterbukan dan keamanan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	Bakesbang
		Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan		Bakesbang
		Kependudukan dan Catatan Sipil			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %	Disdappil
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %	
			Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Lengkap	
			Penerapan KTP Nasional berbasis NK	85%	
			Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Minimal 90 %	
			e-KTP		
9	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Pekerjaan Umum			
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan rainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15	DPU
		Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	58,56%	DPU
			Rasio Jaringan Irigasi	70%	
			Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30,94%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	68%	OPU
			konservasi air tanah		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kualitas mutu air baku		OPU
		Program Pengendalian Banjir	terbangunnya embung		OPU
		Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			OPU
		Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Sempadan dan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0.07%	OPU
			Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %	
			Rasio permukiman layak huni	58.80%	
			Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80%	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Cakupan layanan		OPU
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Rasio tempat ibadah per satuan (satu) penduduk	3	OPU
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai Standar	
		Program Pembangunan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%	OPU
			Rasio panjang jalan dilalui Roda 4	0.0058	
		Program Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Meningkat	OPU
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang diperbaiki	Meningkat	OPU
			Jumlah jembatan yang diperbaiki	Meningkat	
		Pembuatan Sistem Informasi dan perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Masterplan pembangunan	Meningkat	OPU
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan	Rumah tangga pengguna air bersih	75.44	OPU
		DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota	Persentase rumah tinggal persanitasi	70.00%	OPU
		DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota	Rumah tangga pengguna air bersih	Meningkat	OPU
		Perumahan			
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah mobil pemadam kebakaran	Meningkat	OPU
			Jumlah personel pemadam kebakaran	Meningkat	
			Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Meningkat	
		Pemetaan Ruang			
		Program Pemertanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	minimal 40%	BPLTR
		Program Pengendalian Pemertanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	tidak minimal 10%	BPLTR
			Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	
			Ketaatan terhadap RTRW	100%	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Perencanaan Pembangunan			
		Program Pengembangan data/informasi	Tersusunnya Simreka	Ada	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Bappeda
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	
			Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Ada	Bappeda
		Program perencanaan sosial budaya	Tercapainya kinerja bidang sosial budaya	100%	Bappeda
		Program Perencanaan Tata Ruang	RTRW	Ada	Bappeda
10	Pemantapan, pemanfaatan, pengurusan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup	Lingkungan Hidup			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	70%	ELH
			Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	44%	BLH
			Penegakan hukum lingkungan	40%	
			Samping pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau		
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan umdal	Minimal 80 %	BLH
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Lokasi eks tambang yang telah direklamasi		BLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penetapan status mutu air	Meningkat	BLH
			Persentase Penduduk berakses air minum	Ada	
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Meningkat	
			Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	Ada	
		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan	Tersedianya ekowisata	Meningkat	BLH
			kerusakan kawasan konservasi yang terpulihkan	Meningkat	
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	prosentase RTH	Meningkat	BLH



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Minimal 80 %	BLH
		Program Pengelolaan Lingkungan Alam	Luasan kawasan konservasi	Meningkat	BLH
		Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola masyarakat	Meningkat	BLH
		Pertanahan			
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Nak Minimal 10%	BPLTR
		Program Penyelesaian Konflik/Konflik Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	BPLTR
		Program Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi	100%	BPLTR
		Kehutanan			
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,40%	Dishut
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	44%	Dishut
		Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kerusakan Kawasan Hutan	22%	Dishut
		Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan		Meningkat	Dishut
		Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan		Meningkat	Dishut
		Energi dan Sumberdaya Mineral			
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase Pertambangan tanpa ijin	0%	Distamben
			Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	80,01%	
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	penggunaan energi listrik alternatif	Meningkat	Distamben
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas	Jumlah peserta pelatihan	Meningkat	Distamben
		Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT	Model pengelolaan geologi dan sumber daya mineral	Meningkat	Distamben
		Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan		Distamben
		Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar	Konversi bahan bakar	Meningkat	Distamben
		Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur	Dokumen hasil evaluasi cadangan Batubara	Meningkat	Distamben
		Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur	Tersusunnya perda pertambangan dan energi	Meningkat	Distamben
11	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terbentuknya komisi informasi publik	Meningkat	Dishub
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkat	Dishub



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkat	
12	Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		Penetapan Tapal Batas Kabupaten	Adanya batas wilayah yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku		
		Lingkungan Hidup			
		Pengelolaan Sumber Daya Alam daerah perbatasan	Pemanfaatan SDA oleh masyarakat perbatasan	Meningkat	
		Pekerjaan Umum			
		Peningkatan akses pasar di daerah perbatasan	Terbangunnya pasar di daerah perbatasan	Meningkat	
		Pembangunan infrastruktur perbatasan	Tersedianya sarana dan prasarana memadai di daerah perbatasan	Meningkat	



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran {output} kegiatan maupun keluaran program {outcome}, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kutai Timur merupakan masa transisi RPJMD tahun 2011-2015 dengan RPJMD Tahun 2016-2020. Dalam rangka mengisi masa transisi dan perlunya menjembatani dokumen perencanaan yang sela, maka diperlukan adanya program indikatif 1 tahun ke depan setelah periode RPJMD 2011-2015 berakhir. RKPD tahun 2016 mempedomani RPJMD Tahun 2011-2015, selanjutnya RKPD tahun 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah terpilih periode 2016-2020. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan tema "*Peningkatan Daya Saing Keunggulan Daerah Berbasis Agribisnis*", dengan menetapkan 12 (dua belas) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan pembangunan pedesaan
4. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
6. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
7. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
8. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
9. Pengelolaan kawasan perbatasan {*hinterland*}



10. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)
11. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
12. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) Penataan Ruang.
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) KB dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial,
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal Daerah;
- 17) Kebudayaan
- 18) Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Pemerintahan Umum, otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21). Ketahanan Pangan
- 22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 23). Statistik
- 24). Kearsipan;



25). Komunikasi dan Informatika

26). Perpustakaan

b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Ketranasmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Berdasarkan alokasi tersebut diatas usulan program prioritas berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.01	Pendidikan	
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdik
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdik
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disdik
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disdik
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Disdik
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Disdik
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Disdik



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.01.34	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Disdik
1.01.41	Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Disdik
1.02.	Kesehatan	
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinkes, RSUD
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinkes, RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinkes, RSUD
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes, RSUD
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinkes, RSUD
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
1.02.16	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes, RSUD
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinkes, RSUD
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinkes
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	RSUD
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinkes
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Dinkes



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Dinkes, RSUD
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
1.03.	Pekerjaan Umum	
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPU
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPU
1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DPU
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	DPU
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	DPU
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	DPU
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPU
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	DPU
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DPU
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	DPU
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	DPU
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	DPU
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	DPU
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	DPU
1.03.37	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPU
1.03.38	Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	DPU
1.03.39	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan	DPU
1.03.40	DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota	DPU
1.03.41	DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota	DPU
1.03.42	Swakelola Bidang Cipta Karya	DPU
1.04.	Perumahan	
1.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	DPU



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.05.	Penataan Ruang	
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	BPLTR
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	BPLTR
1.06.	Perencanaan Pembangunan	
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bappeda
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bappeda
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda
1.06.15	Program Pengembangan data/informasi	Bappeda
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya	Bappeda
1.06.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Bappeda
1.07.	Perhubungan	
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dishub
1.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dishub
1.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dishub
1.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dishub
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishub
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dishub
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishub
1.07.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Dishub
1.07.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dishub
1.07.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dishub
1.07.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dishub



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.08.	Lingkungan Hidup	
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BLH
1.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BLH
1.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BLH
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BLH
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BLH
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BLH
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	BLH
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BLH
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	BLH
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	BLH
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BLH
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam	BLH
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	BLH
1.09.	Pertanahan	
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPLTR
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPLTR
1.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPLTR
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPLTR
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BPLTR
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	BPLTR
1.09.19	Program Pertanahan	BPLTR
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	
1.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Discapil
1.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Discapil



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Discapil
1.10.16	Program Keluarga Berencana	Discapil
1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPKB
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPPKB
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPPKB
1.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPKB
1.11.07	Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	BPPKB
1.11.08	Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	BPPKB
1.11.09	Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	BPPKB
1.11.10	Program PIK - KRR	BPPKB
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BPPKB
1.11.20	Program Keluarga Berencana	BPPKB
1.11.26	Program Penguatan KKB	BPPKB
1.11.27	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)/Penyediaan dukungan operasional IMP	BPPKB
1.11.28	Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	BPPKB
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	BPPKB
1.12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPKB
1.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPPKB
1.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPPKB
1.12.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	BPPKB
1.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPPKB
1.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPKB
1.12.15	Program Keluarga Berencana	BPPKB
1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	BPPKB



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.12.17	Program pelayanan kontrasepsi	BPPKB
1.12.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	BPPKB
1.12.19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	BPPKB
1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	BPPKB
1.12.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	BPPKB
1.12.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	BPPKB
1.12.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	BPPKB
1.12.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	BPPKB
1.12.25	Program peningkatan manajemen KB	BPPKB
1.12.26	Program Kesehatan Ibu dan Anak	BPPKB
1.13.	Sosial	
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinsos
1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinsos
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinsos
1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinsos
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsos
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsos
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Dinsos
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinsos
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Dinsos
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinsos
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsos
1.13.22	Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinsos



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.13.23	Program Kesiapaspagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	Dinsos
1.14.	Ketenagakerjaan	
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnakertrans
1.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Disnakertrans
1.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disnakertrans
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disnakertrans
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Disnakertrans
1.14.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Disnakertrans
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	Disnakertrans
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)	Disnakertrans
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)	Disnakertrans
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Diskop
1.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Diskop
1.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Diskop
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Diskop
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Diskop
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Diskop
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)	Diskop
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian	Diskop
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah	Diskop
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri	Diskop
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi	Diskop



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.16.	Penanaman Modal Daerah	
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPMD
1.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPMD
1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	BPMD
1.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BPMD
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPMD
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMD
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMD
1.16.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	BPMD
1.17.	Kebudayaan	
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disporpar
1.17.20	Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Disporpar
1.17.21	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Disporpar
1.17.22	Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya	Disporpar
1.17.23	Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah	Disporpar
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya	Disporpar
1.17.26	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat	Disporpar
1.17.27	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Disporpar
1.18.	Pemuda dan Olah Raga	
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disporpar
1.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Disporpar
1.18.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disporpar
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Disporpar
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Disporpar
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Disporpar



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Disporpar
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga	Disporpar
1.18.25	Program Pembibitan Olahraga Berbakat	Disporpar
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bakesbang
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bakesbang
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Bakesbang
1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bakesbang
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bakesbang
1.19.16	Program pemeliharaan kontributifitas dan pencegahan tindak kriminal	Bakesbang
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Bakesbang
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Bakesbang
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah	Bakesbang
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri	
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri	
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1.20.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	
1.20.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1.20.48	Program Peningkatan Pelayanan Ritual/ Keagamaan	
1.20.49	Program Pengembangan Kediklatan	
1.20.50	Program Penelitian dan Pengembangan	
1.20.51	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	
1.21.	Ketahanan Pangan	
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPP



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPP
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPP
1.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKPP
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	BKPP
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan	BKPP
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPP
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapemas
1.22.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bapemas
1.22.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bapemas
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Bapemas
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Bapemas
1.22.21	Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan	Bapemas
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Bapemas
1.23.	Statistik	
1.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.23.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1.23.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	
1.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.23.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.23.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	
1.24.	Kearsipan	
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kantor arsip



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
1.25.	Komunikasi dan Informatika	
1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.25.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1.25.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	
1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.25.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dishub
1.25.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Dishub
1.25.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Dishub
1.25.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Dishub
1.25.19	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dishub
1.25.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dishub
1.26.	Perpustakaan	
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor arsip
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor arsip
1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor arsip
1.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor arsip
1.26.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor arsip
2.	Urusan Pilihan	
2.01.	Pertanian	
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Distan, Disbun
2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Distan, Disbun
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Distan, Disbun
2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Distan, Disbun
2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Distan, Disbun



Kode	Urusan/Program	SKPD
[1]	[2]	[3]
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distan, Disbun
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Distan, Disbun
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Distan, Disbun
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distan, Disbun
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Distan, Disbun
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Distan, Disbun
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Distan, Disbun
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Distan, Disbun
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Distan, Disbun
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Distan, Disbun
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman	Distan, Disbun
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan	Distan, Disbun
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Distan, Disbun
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan	Distan, Disbun
2.02.	Kehutanan	
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dishut
2.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dishut
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dishut
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dishut
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Dishut
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan	Dishut
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan	Dishut
2.03.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Distamben
2.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Distamben
2.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Distamben
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Distamben
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Distamben
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Distamben



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
2.03.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas	Distamben
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT	Distamben
2.03.21	Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Distamben
2.03.22	Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar	Distamben
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur	Distamben
2.03.24	Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur	Distamben
2.04.	Pariwisata	
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Disparpor
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Disparpor
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan	Disparpor
2.05.	Kelautan dan Perikanan	
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Diskanlaut
2.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Diskanlaut
2.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Diskanlaut
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Diskanlaut
2.05.07	Program Peningkatan Kerjasama	Diskanlaut
2.05.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Diskanlaut
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Diskanlaut
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Diskanlaut
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Diskanlaut
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Diskanlaut
2.05.20	Program pengembangan budaya perikanan	Diskanlaut
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Diskanlaut
2.05.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Diskanlaut
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Diskanlaut
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Diskanlaut
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Diskanlaut
2.05.27	Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan	Diskanlaut



Kode	Urusan/Program	SKPD
(1)	(2)	(3)
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Diskanalaut
2.06.	Perdagangan	
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Disperindag
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Disperindag
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Disperindag
2.07.	Industri	
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disperindag
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disperindag
2.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disperindag
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disperindag
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Disperindag
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Disperindag
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Disperindag
2.07.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Disperindag
2.08.	Ketransmigrasian	
2.08.18	Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi	Disnakertrans

5.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Matrik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Per Bidang Urusan Pemerintahan. Dan SKPD sebagai berikut:



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kutai Timur merupakan masa transisi RPJMD tahun 2011-2015 dengan RPJMD Tahun 2016-2020. Dalam rangka mengisi masa transisi dan perlunya menjembatani dokumen perencanaan yang sela, maka diperlukan adanya program indikatif 1 tahun ke depan setelah periode RPJMD 2011-2015 berakhir. RKPD tahun 2016 mempedomani RPJMD Tahun 2011-2015, selanjutnya RKPD tahun 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah terpilih periode 2016-2020..

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2016 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 12 (dua belas) prioritas pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

6.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2016 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2016. Selanjutnya RKPD tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun



kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD Kabupaten Kutai Timur harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. SKPD Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a) gambaran pelayanan SKPD;
 - b) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - d) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - e) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2016.

6.2 Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*corporate social responsibility*).

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2016 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.



2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
 - d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha.
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.
 - d. Pengembangan berbagai kebijakan program pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
 - e. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat

P l t . BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN